# Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat

**(Studi Pada Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek)**

## SKRIPSI

Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana pada
Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya


Disusun Oleh:
**DHANI WAHYU KARUNIAWAN**
**0610313034**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK**
**KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN**
**MALANG**
**2012**


repository.ub.ac.id

# Motto

Apabila Di Dalam Diri Seseorang
Masih Ada Rasa Malu Dan Takut
Untuk Berbuat Suatu Kebaikan,
Maka Jaminan Bagi Orang Tersebut
Adalah Tidak Akan Bertemunya Ia
Dengan Kemajuan Selangkah Pun.

(Bung Karno)

Perseguire La Sua ambizione con vespa...
(Kejarlah Cita-Citamu Dengan Vespa...)

(Enrico Piaggio)

Just because you fail once,
doesn't mean you're gonna fail at everything.
Keep trying, hold on, and always, always,
always believe in your self,
because if you don't, then who will?

(Marilyn Monroe)

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**

| | |
|---|---|
| Judul | :UPAYA PEMERINTAH DALAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL MENENGAH (UKM) DAN DAMPAKNYA TERHADAP SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT (STUDI PADA DINAS KOPERASI INDUSTRI PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN TRENGGALEK) |
| Disusun oleh | : DHANI WAHYU KARUNIAWAN |
| NIM | : 0610313044 |
| Fakultas | : ILMU ADMINISTRASI |
| Jurusan | : ADMINISTRASI PUBLIK |
| Konsentrasi | : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN |

Malang, 17 Januari 2012

Komisi Pembimbing

| Ketua | Anggota |
|---|---|
| **Dr.H. Imam Hardjanto, MBA,MAP, DipSp** | **Drs. Suwondo, MS** |
| **NIP. 19460619 197412 1 001** | **NIP. 19530201 198010 1 001** |

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**TANDA PENGESAHAN**

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada :

| | | |
|---|---|---|
| Hari | : | Senin |
| Tanggal | : | 6 Februari 2012 |
| Jam | : | 09.00 wib |
| Skripsi atas nama | : | Dhani Wahyu Karuniawan |
| Judul | : | Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) Dan Danpaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan Dan Energi Kabupaten Trenggalek) |

**dan dinyatakan LULUS**

MAJELIS PENGUJI

Ketua

**Dr. Imam Hardjanto, MAP**
**NIP. 19460619 197412 1 001**

Anggota

**Drs. Suwondo, MS**
**NIP. 19530201 198010 1 001**

Anggota

**Drs. Minto Hadi, M.Si, MS**
**NIP. 19540127 198103 1 003**

Anggota

**Drs. Riyanto, M.Hum.**
**NIP. 19600430 198601 1 001**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI**

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan pasal 70)

Malang, 17 Januari 2012

METERAI TEMPEL

111F9AAF915194138

6000

Nama : Dhani Wahyu Karuniawan

NIM : 0610313044

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# RINGKASAN

Dhani Wahyu Karuniawan. 2012, **Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek)**, Dr. Imam Hardjanto, MAP; Drs. Suwondo, MS. 149+xii.

Pada era globalisasi saat ini sangat diperlukan adanya pembangunan diberbagai sektor terutama sektor ekonomi. Dalam hal ini yang paling terasa adalah karena masih banyaknya keterbelakangan ekonomi di kalangan masyarakat, dan pembangunan dalam bidang ekonomi ini menempati prioritas teratas dalam upaya pencapain tujuan atau dalam memberikan dorongan perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat.

Pada era globalisasi seperti saat ini, industri kecil dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, industri kecil dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan industri kecil harus dihilangkan. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan industri kecil saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, sehingga kemandirian industri kecil diharapkan dapat tercapai di masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dalam pemberdayaan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek , (2) mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar sentra industri dari adanya UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Penelitian ini bertempat di kantor Dinas KOPERINDAGTAMBEN Kabupaten Trenggalek. Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer yang merupakan data yang diperoleh peneliti secara langsung dari Kabid dan staf kantor KOPERINDAGTAMBEN Kabupaten Trenggalek, dan UKM tempe kripik di Kelurahan Ngantru. Sedangkan data sekunder yang merupakan data berupa catatan-catatan resmi, dokumen, arsip-arsip, petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan dan laporan yang ada di kantor Dinas KOPERINDAGTAMBEN Kabupaten Trenggalek. Metode yang digunakan untuk menganalisa data adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Program pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek meliputi Identifikasi potensi dan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. Hal ini dilakukan dengan pengembangan dan Sumberdaya Manusia (SDM) UKM itu sendiri, Pembinaan dalam peningkatan sarana dan prasarana usaha industri. Pembinaan terhadap majamenen pengelolaan industri dan meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UKM. Pengembangan pemasaran dalam upaya meningkatkan akses

pasar melalui peningkatan kualitas produk serta pemasaran produk. Dampak pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Diskorenindagtamben Trenggalek antara lain Produktivitas pengusaha keripik tempe dengan adanya pemberdayaan UKM sudah menampakan hasil yang optimal Dampak dari adanya pemberdayaan UKM tersebut selain berpengaruh pada peluang kerja pada masyarakat sekitar, tentu saja juga berimbas terhadap pendapatan masyarakat sekitar.

**Kata Kunci** : Pemberdayaan, Usaha Kecil Menengah, Sosial Ekonomi Masyarakat

repository.ub.ac.id


## SUMMARY

Dhani Wahyu Karuniawan. 2012, **The Governmental Effort in the Empowerment of Small-Medium Enterprises and Its Impact on Community Socioeconomic (A Study at Department of Cooperation Industry Trading Energy and Mining)**, Dr. Imam Hardjanto, MAP; Drs. Suwondo, MS. 149+xii.

In the globalization era is necessary to development across various sectors, particularly the economic sector. In this case most noticeably is because there are many economic backwardness in the community. and development in the economic field, occupy top priority in the effort or goal achievement in encouraging changes and reforms in public life.

In the era of globalization such as this, small industry can survive and have the potential to grow. Thus, small industries can be reliable for the foreseeable future and must be supported by policies ¬-conducive policies, and problems that hinder efforts to empower small-scale industries should be eliminated. Therefore, the establishment and development of small industries currently feels more urgent and very strategic to lift the economy, so that the independence of small industries is expected to be achieved in the future.

The objective of research is (1) to understand, to describe and to analyze the role of the government in the empowerment of small-medium enterprises of Tempe Chip at Ngantru Village, Trenggalek Subdistrict, Trenggalek Regency; (2) to acknowledge the socioeconomic impact perceived by the community around the industry center of Tempe Chip at Ngantru Village, Trenggalek Subdistrict, Trenggalek Regency.

This research located at the Service office KOPERINDAGTAMBEN Trenggalek regency.Two types of data source are primary and secondary data. Primary data are collected directly from the head of The Office and the staff of KOPERINDAGTAMBEN of Trenggalek Ragency, and the small-medium enterprises of Tempe Chip at Ngantru Village. Secondary data involve official documents, archives, manuals, regulations, and reports available at the Office of KOPERINDAGTAMBEN of Trenggalek Regency. Method of data analysis is qualitative method, which is one without statistic-based calculation.

Result of research indicates that the empowerment program operated by Diskoperindagtamben of Trenggalek Regency involves the identification of potential and program of community empowerment in the economic field. It is realized by empowering the human resource in the small-medium enterprises, fostering the industrial structure and infrastructure, improving industrial-based management and entrepreneurship competence of the small-medium enterprises, and developing the marketing to increase access to market through increasing product quality and product marketing. The impact of the empowerment of small-medium enterprises by Diskoernindag of Trenggalek is that the productivity of Tempe Chip entrepreneurs is increased after the empowerment of the small-medium enterprises. It also results in positive impact on the job opportunity for the community around and thus, also on the income of the community.




UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Keywords**: Empowerment, Small-Medium Enterprises, Community Socioeconomic

# KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi pada sentra industri dan ukm kripik tempe Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini saya berterimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Sumartono, M.S. selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Dr. M.R. Khairul Muluk, S.Sos,M.Si selaku ketua jurusan Ilmu Administrasi Publik beserta seluruh staff Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
3. Dr. Imam Hardjanto, MAP. selaku dosen pembimbing, terima kasih telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikanbimbingan, saran dan masukannya dalam penyempurnaan skripsi ini.
4. Drs. Suwondo, MS. selaku dosen pembimbing, terima kasih telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, saran dan masukannya dalam penyempurnaan skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang atas segala ilmu yang diberikan selama belajar di Fakultas Ilmu Administrasi.
6. Seluruh staff dan karyawan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi kepada penulis selama ini.



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

7. Kepala Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek, Drs. I Gede Siama,
8. Para Kepala Bidang dan Staff Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek yang telah banyak membantu dan memberikan informasi.
9. Bapak-bapak dan ibu-ibu pengusaha di sentra industri dan ukm keripik tempe Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek beserta seluruh karyawan yang telah banyak membantu dan memberikan informasi kepada peneliti.
10. Semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara moril maupun spirituil, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa membalas budi baik semua pihak yang telah membantu sampai akhir penyusunan skripsi ini.

Demi kesempuranaan skripsi ini saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi fihak yang membutuhkan.

Malang, Januari 2012

Penulis



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# DAFTAR ISI

Halaman

MOTTO
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI
TANDA PENGESAHAN
RINGKASAN .....i
SUMMARY .....iii
KATA PENGANTAR .....v
DAFTAR ISI .....vii
DAFTAR TABEL .....x
DAFTAR GAMBAR/BAGAN .....xi
DAFTAR LAMPIRAN .....xii

**BAB I PENDAHULUAN.....1**
A. Latar Belakang .....1
B. Rumusan Masalah .....12
C. Tujuan Penelitian .....12
D. Kontribusi Penelitian .....13
E. Sistematika Pembahasan .....13

**BAB II KAJIAN PUSTAKA .....15**
A. Pembangunan .....15
1. Pengertian Pembangunan .....15
2. Administrasi Pembangunan .....17
B. Pemberdayaan .....19
1. Pengertian Pemberdayaan .....19
2. Tahapan dan Langkah-Langkah Pemberdayaan .....24
3. Tujuan Pemberdayaan .....27
4. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan UKM .....29
5. Strategi Pemberdayaan UKM .....32
C. Dampak .....36
1. Pengertian Dampak .....36
2. Dimensi-Dimensi Dampak .....36
3. Dampak UKM Terhadap Masyarakat .....38
4. Dampak UKM Terhadap Sosial Ekonomi .....40
D. Usaha Kecil dan Menengah (UKM) .....43
1. Pengertian dan Kriteria UKM .....43
2. Karakteristik dan Peranan UKM .....45
3. Kelemahan dan Kelebihan UKM .....49
4. Masalah Yang Dihadapi UKM .....52



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

5. Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan UKM ..... ....54

**BAB III METODE PENELITIAN .....57**
A. Jenis Penelitian .....57
B. Fokus Penelitian .....58
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....60
D. Sumber Data .....60
E. Teknik Pengumpulan Data .....61
F. Instrumen Penelitian .....62
G. Analisis Data .....63

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....65**
A. Penyajian Data Umum .....65
1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek .....65
a. Profil Kabupaten Trenggalek .....65
b. Kondisi Geografis .....67
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek .....70
a. Kedudukan Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan , Pertambangan dan Energi .....70
b. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan .....71
c. Susunan dan Struktur Organisasi .....73
d. Aspek Sumber Daya Aparatur Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek .....82
3. Profil UKM Kripik Tempe Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek .....86
a. Sejarah Perkembangan UKM Kripik Tempe Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek .....87
b. Proses Produksi Kripik Tempe .....89
c. Kapasitas Produksi dan Nilai Produksi .....93
B. Penyajian Data Fokus .....96
1. Peran Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam Pemberdayaan UKM kripik tempe di Kelurahan Ngantru .....96
a. Identifikasi Potensi dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi .....96
b. Meningkatkan Kewirausahaan dan Kemampuan UKM .....107
c. Pengembangan Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Akses Pasar .....115

2. Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ngantru .....121
a. Peningkatan Pendapatan: Perbandingan Pendapatan Antara Sebelum dan Sesudah Adanya Industri Kripik Tempe...121



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

b. Lapangan Kerja Baru: Memberikan Kesempatan Baru dalam Peluang Kerja dan Usaha Baru .....124
C. Pembahasan .....128
1. Peran Pemerintah dalam Pemberdayaan UKM kripik tempe di Kelurahan Ngantru .....128
a. Identifikasi Potensi dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Ekonomi .....128
b. Meningkatkan Kewirausahaan dan Kemampuan UKM.....131
c. Pengembangan Pemasaran dalam Upaya Meningkatkan Akses Pasar ……... 134

2. Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat Kelurahan Ngantru ……... 136
a. Peningkatan Pendapatan: Perbandingan Pendapatan Antara Sebelum dan Sesudah Adanya Industri Kripik Tempe...138
b. Lapangan Kerja Baru: Memberikan Kesempatan Baru dalam Peluang Kerja dan Usaha Baru…… 140

**BAB V KESIMPULAN DAN SARAN……143**
A. Kesimpulan ……..143
B. Saran ……145

**DAFTAR PUSTAKA…….. 146**

## DAFTAR TABEL


| No. | Judul | Hal. |
|---|---|---|
| 1. | Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek | 68 |
| 2. | Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Bidang Kerjanya Tahun 2011 | 84 |
| 3. | Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Golongan Tahun 2011 | 85 |
| 4. | Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011 | 85 |
| 5. | Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010 | 85 |
| 6. | Jumlah UKM, Kapasitas dan Nilai Produksi Kripik Tempe di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011 | 94 |

## DAFTAR GAMBAR/BAGAN


| No. | Judul | Hal. |
|---|---|---|
| 1. | Peta Kabupaten Trenggalek. | 69 |
| 2. | Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Industrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek. | 81 |

## DAFTAR LAMPIRAN


| No. | Judul | Hal. |
|---|---|---|
| 1. | Pedoman Wawancara | 150 |
| 2. | Struktur Organisasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambang dan Energi Kabupaten Trenggalek | 152 |
| 3. | Rekomendasi Penelitian | 153 |
| 4. | Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah | 156 |
| 5. | Dokumentasi | 179 |
| 6. | Riwayat Hidup | 184 |

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas manusia dan masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan nasional, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta memperhatikan tantangan global. Dalam pelaksanaanya mengacu pada kepribadian bangsa dan nilai luhur yang universal untuk mewujudkan kehidupan bangsa yang berdaulat, mandiri, berkeadilan, sejahtera, maju, dan kukuh kekuatan moral dan etikanya.

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib dan damai. Pembangunan merupakan suatu proses perubahan untuk menuju kemakmuran yang mutlak dilakukan oleh negara dalam rangka mengisi kemerdekaannya.

Proses perubahan menuju kemakmuran ini, seringkali dikaitkan dengan proses industri dimana dengan adanya industrialisasi tenaga kerja yang terserap akan banyak dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang nantinya meningkatkan kemakmuran. Akan tetapi bukan berarti bahwa pembangunan



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

selalu berarti industrialisasi saja, melainkan juga pembangunan diseluruh bidang kehidupan.

Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional tersebut mutlak dilaksanakan pembangunan di segala bidang dengan titik berat diletakkan pada bidang ekonomi seiring dengan kualitas sumber daya manusia tetap bertumpu pada aspek pemerataan, pertumbuhan dan stabilitas.

Di era globalisasi saat ini sangat diperlukan adanya pembangunan diberbagai sektor terutama sektor ekonomi. Dalam hal ini yang paling terasa adalah karena masih banyaknya keterbelakangan ekonomi di kalangan masyarakat, dan pembangunan dalam bidang ekonomi ini menempati prioritas teratas dalam upaya pencapain tujuan atau dalam memberikan dorongan perubahan-perubahan dan pembaharuan dalam kehidupan masyarakat. Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang, dengan demikian arah pembanguanannya akan diarahkan pada kemampuan mengahapuskan masalah kemiskinan dan keterbelakangan ekonomi masyarakat, baik yang berada di lingkungan perkotaan maupun di lingkungan pedesaan.

Pada saat ini sektor ekonomi lebih diarahkan pada bidang ini dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang mendukung seperti UU No 5 Tahun 1984 tentang perindustrian untuk mengatur serta memberikan perlindungan terhadap pembangunan industri-industri di Indonesia. Pengembangan sektor industri yang sesuai dengan kondisi bangsa ini adalah sektor industri kecil. Peran industri kecil yang sangat besar pada masa resesi ekonomi 1998 dan selama proses pemulihan

ekonomi semakin mengukuhkan posisi usaha kecil sebagai pelaku ekonomi yang sangat penting.

Dalam pelaksanaan pembangunan industri, perlu diusahakan agar struktur industri makin kokoh dan mempererat keterkaitan sektor-sektor yang mendukung pembangunan lainnya. Perlu pula diciptakan keterkaitan yang menguntungkan dan saling menunjang antara industri besar, industi menengah dan industri kecil. Keberadaan industri ini juga didukung oleh adanya kebijakan pemerintah yaitu Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Kecil, industri memegang peranan yang sangat penting, oleh karena itu perlu dikembangkan secara seimbang dan terpadu dengan :

a. Meningkatkan peran serta masyarakat secara aktif
b. Mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya alam
c. Mendayagunakan secara optimal seluruh sumber daya manusia
d. Mendayagunakan secara optimal seluruh sumber dana yang tersedia.

Dengan mengacu pada landasan tersebut, perkembangan sektor industri yang sesuai adalah industri kecil, mengingat jangkauan dari industri kecil sangatlah luas sehingga mampu mencapai daerah-daerah terpencil dan keberadaannya disesuaikan dengan potensi sumber daya alam disekitarnya dan juga industri kecil nantinya dapat menjadi tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional.

Industri kecil merupakan bagian integral dari dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Mengingat peranannya dalam

pembangunan, usaha kecil harus terus dikembangkan dengan semangat kekeluargaan, saling isi mengisi, saling memperkuat antara usaha yang kecil dan besar dalam rangka pemerataan serta mewujudkan kemakmuran yang sebesar-besarnya bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat sebagai pelaku utama pembangunan, sedangkan pemerintah berkewajiban untuk mengarahkan, membimbing, melindungi serta menumbuhkan iklim usaha.(www.damandiri.or.id/file/arirahmathakimundipbab1.pdf). Beberapa keunggulan industri kecil dibandingkan industri besar antara lain (Subanar, 2001:6):

1. Inovasi dalam teknologi dapat dengan mudah dilakukan dalam upaya pengembangan produk.
2. Hubungan kemanusiaan yang akrab di dalam industri kecil.
3. Kemampuan menciptakan kesempatan kerja yang cukup banyak atau penyerapannya terhadap tenaga kerja cukup tinggi.
4. Fleksibilitas dan kemampuan menyesuaikan diri terhadap kondisi pasar yang berubah dengan cepat dibanding dengan perusahaan skala besar yang pada umumnya birokratis.
5. Terdapatnya dinamisme manajerial dan peranan kewirausahaan.

Keberadaraan industri kecil disamping mempunyai beberapa keunggulan juga sangatlah berjasa dalam pendistribusian pendapatan masyarakat serta mampu menciptakan kreativitas yang sejalan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan unsur-unsur tradisi dan kebudayaan masyarakat setempat. Sehingga tradisi dan kebudayaan yang ada tidak hilang dan tetap mengakar kuat,

karena tradisi dan kebudayaan tersebut merupakan ciri khas dari masyarakat setempat yang perlu dilestarikan dan dipertahankan.

Selain itu industri kecil juga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar, mengingat jumlah penduduk indonesia yang banyak dan bisa mengurangi banyaknya pengangguran. Industri kecil yang berkembang di masyarakat terutama di pedesaan juga dapat mengurangi arus urbanisasi dan migrasi ke kota. Industri kecil yang padat karya, menggunakan teknologi yang sederhana dan mudah dipahami dapat menjadi wadah bagi masyarakat untuk bekerja. Bagi orang-orang yang kreatif dan inovatif, hal demikian kurang menarik dan terdapat kecenderungan mendirikan usaha sendiri; berwiraswasta biasanya dimulai dengan industri-industri skala kecil dan dapat berpotensi dan berkembang.

Keberadaan Industri kecil di daerah selain banyak mendapat keuntungan, juga banyak mengalami kendala, bahkan tidak jarang pula yang mudah gulung tikar. menurut Tambunan (2002:73), masalah yang sering dihadapi oleh kebanyakan industri kecil adalah sebagai berikut:

a. Masalah kesulitan pemasaran.
b. Masalah keterbatasan finansial.
c. Masalah keterbatasan sumber daya manusia.
d. Masalah bahan baku.
e. Masalah keterbatasan teknologi.

Selanjutnya menurut Hiro Tugiman (1995:9), permasalahan pokok yang sering dihadapi oleh Usaha Kecil adalah:

1. Masalah sumber daya manusia.
2. Masalah pemasaran.
3. Masalah permodalan.
4. Masalah penyediaan bahan baku.
5. Masalah teknologi (berkaitan dengan standart industri).
6. Masalah organisasi dan manajemen.
7. Masalah infrastruktur.
8. Masalah kerjasama usaha.
9. Kurangnya wawasan usaha (budaya).
10. Masalah pesaing.
11. Masalah generasi penerus.
12. Tidak adanya akses kepada usaha besar/ pemerintah.
13. Masalah dari segi konsumen.

Beberapa kendala atau permasalahan inilah yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan agar industri kecil di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Industri kecil menghadapi kendala-kendala dalam mempertahankan atau mengembangkan industri (bisnis), antara lain kurang pengetahuan pengelolaan usaha, kurang modal, dan lemah di bidang pemasaran. Selain itu, kondisi pasar yang dihadapi industri kecil adalah situasi pasar yang *monopolistik* juga merupakan masalah tersendiri sehingga industri kecil sulit berkembang.

Dalam pembangunan ekonomi di Indonesia, industri kecil selalu digambarkan sebagai sektor yang mempunyai peranan yang penting, karena

sebagian besar jumlah penduduknya berpendidikan rendah dan hidup dalam kegiatan industri kecil baik di sektor tradisional maupun modern. Peranan industri kecil tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua kementerian, yaitu (1) Kementerian Perindustrian dan Perdagangan; (2) Kementerian Koperasi dan UKM. Namun demikian, usaha pengembangan yang telah dilaksanakan masih belum memuaskan hasilnya, karena pada kenyataannya kemajuan industri kecil sangat kecil dibandingkan dengan kemajuan yang sudah dicapai industri besar. Pelaksanaan kebijaksanaan industri kecil oleh pemerintah selama orde baru, hanya sedikit yang dilaksanakan, lebih banyak hanya merupakan semboyan saja, sehingga hasilnya sangat tidak memuaskan. Pemerintah lebih berpihak pada pengusaha besar pada hampir semua sektor, antara lain perdagangan, perbankan, kehutanan, pertanian, dan industri.

Sektor perbankan yang juga terpuruk ikut memperparah sektor industri dari sisi permodalan. Banyak perusahaan yang tidak mampu lagi meneruskan usaha karena tingkat bunga yang tinggi. Menurut Saleh (1986:6) berbeda dengan industri kecil yang sebagian besar tetap bertahan, bahkan cenderung bertambah. Alasan-alasan usaha kecil bisa bertahan dan cenderung meningkat jumlahnya pada masa krisis adalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar industri kecil memproduksi barang konsumsi dan jasa-jasa dengan elastisitas permintaan terhadap pendapatan yang rendah, maka tingkat pendapatan rata-rata masyarakat tidak banyak berpengaruh

terhadap permintaan barang yang dihasilkan. Sebaliknya kenaikan tingkat pendapatan juga tidak berpengaruh pada permintaan.

2. Sebagian besar industri kecil tidak mendapat modal dari bank. Implikasinya keterpurukan sektor perbankan dan naiknya suku bunga, tidak banyak mempengaruhi sektor ini. Berbeda usaha skala besar yang banyak tergantung kepada perbankan, jika sektor perbankan bermasalah, maka ikut terganggu kegiatan usahanya, sedangkan industri kecil dapat bertahan. Di Indonesia, industri kecil mempergunakan modal sendiri dari tabungan dan aksesnya terhadap perbankan sangat rendah.
3. Industri kecil mempunyai modal yang terbatas dan pasar yang bersaing. Dampaknya industri kecil mempunyai spesialisasi produksi yang ketat. Hal ini memungkinkan industri kecil mudah untuk pindah dari usaha yang satu ke usaha lain, hambatan keluar-masuk tidak ada.
4. Reformasi menghapuskan hambatan-hambatan di pasar, proteksi industri hulu dihilangkan, industri kecil mempunyai pilihan lebih banyak dalam pengadaan bahan baku. Akibatnya biaya produksi turun dan efisiensi meningkat. Akan tetapi, karena bersamaan dengan terjadinya krisis ekonomi, maka pengaruhnya tidak terlalu besar.
5. Dengan adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan menyebabkan sektor formal banyak memberhentikan pekerja-pekerjanya. Para penganggur tersebut memasuki sektor informal, melakukan kegiatan usaha yang umumnya berskala kecil, akibatnya jumlah industri kecil meningkat.

Pada masa krisis ekonomi yang berkepanjangan, industri kecil dapat bertahan dan mempunyai potensi untuk berkembang. Dengan demikian, industri kecil dapat dijadikan andalan untuk masa yang akan datang dan harus didukung dengan kebijakan-kebijakan yang kondusif, serta persoalan-persoalan yang menghambat usaha-usaha pemberdayaan industri kecil harus dihilangkan. Sebagai suatu area usaha tempat orang menggantungkan nasibnya, industri kecil tidak boleh mati. Ia harus tumbuh dan berkembang, atau sekurang-kurangnya bertahan *(survive)*. Tekat untuk *survive* dan tumbuh tersebut menuntut kemampuan industri kecil dan para pendukungnya untuk memahami situasi internal (kekuatan dan kelemahan) maupun situasi eksternalnya (peluang dan tantangan). Termasuk ke dalam situasi internal adalah: sumber daya yang dimiliki, kebijakan yang telah dijalankan serta hasilnya. Sedangkan situasi eksternal adalah kekuatan dan kecenderungan politik, ekonomi, sosial dan teknologi serta kondisi kelompok pesaing ataupun kelompok pendukungnya.

Pada saat sekarang ini yang berada di era globalisasi industri kecil menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena keikutsertaan negara kita dalam persaingan pasar bebas dan semakin terbukanya pasar di dalam negeri, merupakan ancaman bagi industri kecil dengan semakin banyaknya barang dan jasa yang masuk dari luar akibat dampak globalisasi. Oleh karena itu, pembinaan dan pengembangan industri kecil saat ini dirasakan semakin mendesak dan sangat strategis untuk mengangkat perekonomian rakyat, sehingga kemandirian industri kecil diharapkan dapat tercapai di masa mendatang. Dengan berkembangnya

industri kecil diharapkan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, membuka kesempatan kerja, dan memakmurkan masyarakat secara keseluruhan.

Mengingat pengembangan dan perkembangan industri kecil kripik tempe sangatlah penting bagi masyarakat kelas menengah ke bawah di Trenggalek, maka rencana yang diambil oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek melalui Dinas Koperasi Industri Perdagangan Tambang dan Energi lebih mengacu pada manajemen pengembangan industri kecil yang tertuang dalam Rencana Pemerintah Kabupaten Trenggalek yang kemudian dirinci lebih lanjut ke dalam Rencana Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pengembangan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Trenggalek diharap nantinya mengarah pada ekonomi mikro yang berbasis kerakyatan dalam arti usaha kecil yang dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan dari usaha kecil menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta dapat berkembang menjadi usaha menengah dan juga meningkatkan peranan usaha kecil dalam pembentukan produk nasional, perluasan kesempatan kerja dan berusaha, meningkatkan ekspor, serta peningkatan dan pemerataan pendapatan untuk mewujudkan dirinya sebagai tulang punggung serta memperkukuh struktur perekonomian nasional dimana hal ini sesuai dengan amanat Undang- undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil.

Untuk mewujudkan hal diatas maka ditunjang dengan adanya Pengembangan kemampuan pemerintah kota dengan cara/upaya melalui pembentukan sentra industri kecil yang banyak dan formal yang nantinya dirangkum dalam suatu wadah yang dapat menjadikan mereka untuk bertukar

pikiran dalam bentuk paguyuban serta memberikan bentuk-bentuk pemberdayaan pengembangan usaha/industri mereka. Terlepas dari hal itu maka pemerintah dan masyarakat industri tidak akan bekerja sendirian maka harus terdapat hubungan yang selaras antara pemerintah, masyarakat dan swasta hal ini bertujuan agar nantinya terdapat hubungan timbal balik yang saling menguntungkan yang nantinya mampu mendongkrak kegiatan ekonomi industri kecil/usaha kecil.

Industri kecil keripik tempe ini merupakan salah satu produk unggulan dari kabupaten Trenggalek yang nantinya diharapkan dapat membantu menyerap tenaga kerja dan mampu mendistribusikan penghasilan yang merata di daerah pedesaan tempat industri kecil keripik tempe berada serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat terhadap industri kecil keripik tempe diharapkan untuk kedepannya agar lebih baik lagi seperti halnya memiliki kualitas dan kuantitas yang tinggi guna peningkatan pengembangan/produksi yang ditunjang dengan berbagai aspek yang sehingga terwujud suatu efektifitas dan efisiensi dalam bekerja dan dapat memberikan dampak sosial ekonomi yang lebih baik untuk masyarakat.

Berdasarkan pemikiran diatas, bahwa betapa pentingnya keberadaan industri kecil keripik tempe ini dalam perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek, maka dengan paparan diatas peneliti tertarik untuk menuangkan dalam skripsi yang berjudul :

**"Upaya Pemerintah Dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek)".**

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka diidentifikasi dan rumusan masalah yang akan menjadi kajian adalah :

1. Bagaimana upaya pemerintah dalam pemberdayaan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?
2. Bagaimana dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar sentra industri dari adanya UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan dan menganalisis upaya pemerintah dalam pemberdayaan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengetahui dampak sosial ekonomi masyarakat sekitar sentra industri dari adanya UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

## D. Kontribusi Penelitian

Kontribusi yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi peneliti merupakan suatu kesempatan yang berharga untuk menerapkan teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktek yang sesungguhnya untuk menganalisis masalah yang timbul serta dapat memberikan masukan dalam pengembangan wawasan berpikir.
2. Bagi akademi digunakan sebagai evaluasi sampai sejauh mana kesesuaian antara progam mata kuliah dengan dunia kerja yang dihadapi serta dapat digunakan sebagai masukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Bagi daerah yang menjadi objek penelitian adalah sebagai bahan masukan dalam mengatasi masalah-masalah yang timbul guna peningkatan taraf sosial ekonomi .

**E. Sistematika Pembahasan**

**BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan mengenai landasan-landasan teori yang akan digunakan untuk mendasari penulisan skripsi yang terdiri dari industri kecil, pengembangan indusri kecil guna peningkatan taraf sosial ekonomi masyarakat.

**BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian dan situs penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, instrument penelitian serta analisis data.

**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang berisikan penyajian data (yang terkait dengan fokus penelitian), analisis data dan interprestasi data (mensinkronkan fokus , temuan data dan sejumlah teori yang ada).

**BAB V PENUTUP**

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil pembahasan dan juga saran untuk masalah yang dihadapi. Kesimpulan dan saran hasil penelitian diuraikan secara garis besar merupakan temuan pokok, baik yang bersifat substansial maupun metode teknis dari hasil pembahasan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB II

# KAJIAN PUSTAKA

## A. Pembangunan

### 1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan merupakan usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Siagian dalam Suryono, 2004:21). Menurut Moeljadi Banoewidjojo, pembangunan adalah proses dimana dapat tercapainya secara terus-menerus adanya perubahan sosial/struktur sosial serta pertumbuhan ekonomi yang dipercepat (Riyadi, 2002:16). Dengan demikian, ide pokok pembangunan adalah pembangunan merupakan suatu proses; pembangunan merupakan suatu usaha yang secara sadar dilaksanakan; pembangunan dilakukan secara berencana dan perencanaannya berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan; pembangunan mengarah pada modernitas; modernitas yang dicapai melalui pembangunan bersifat multi dimensional; proses dan kegiatan pembangunan ditujukan kepada usaha membina bangsa dalam rangka pencapaian tujuan bangsa dan negara yang telah ditentukan.

Menurut Riyadi, pembangunan secara minimal telah dapat diketemukan beberapa persamaan minimal yang masih universal yaitu:



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

1. Bahwa pembangunan harus mencakup pengertian kemajuan dalam kondisi hidup.
2. Pembangunan nasional berbagai negara khususnya yang diklasifir sebagai baru atau sedang berkembang memang perlu dimulai dari pembangunan ekonomi.
3. Pembangunan harus mengandung arti adanya perubahan yang mendasar dari seluruh struktur ekonomi dan sosial dengan kemampuan positif dalam perubahan sistem produksi dan permintaan, maupun adanya peningkatan dalam distribusi pendapatan dan pekerjaan.
4. Pertumbuhan hasil pembangunan juga tidak boleh hanya puas bila telah mencakup unsur-unsur pokok kesejahteraan sosial atau hal-hal individu (Riyadi, 2002:15).

Menurut Dadang Solihin, pembangunan memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan antar daerah dan antar sub-daerah serta antar warga masyarakat (pemerataan dan keadilan).
2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
3. Menciptakan atau menambah lapangan kerja.
4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah.
5. Mempertahankan atau menjaga kelestarian sumber daya alam agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).(http://www.slideshare.com).

Dengan demikian, pembangunan berarti upaya yang terus-menerus dilakukan dengan tujuan menempatkan manusia pada posisi dan peranannya

secara wajar yakni sebagai subjek dan objek pembangunan untuk mampu mengembangkan dan memberdayakan dirinya, sehingga keluar dapat berhubungan secara serasi, selaras, dan dinamis; sedangkan ke dalam mampu menciptakan keseimbangan.

**2. Administrasi Pembangunan**

Administrasi Pembangunan mempunyai dua kata, yang pertama kata administrasi dan yang kedua kata pembangunan. Kita akan membahas terlebih dahulu dari kata administrasi dan kemudian baru kata pembangunan.

a) *Administrasi* adalah keseluruhan proses pelaksanaan dari pada keputusan-keputusan yang telah diambil dan dilaksanakan, pelaksanaanya itu pada umumnya dilakukan oleh dua orang manusia atau lebih untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumya.

b) *Pembangunan* adalah "suatu usaha atau rangkaian usaha untuk mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar, apa yang akan ditempuh oleh suatu Negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa *(nation-building)*".

Kita dapat menggaris bawahi dari kata-kata diatas dan kemudian menyimpulkan maksud diatas sebagai berikut:

- Proses yang berarti suatu kegiatan yang terus-menerus dilaksanakan.
- Usaha maksudnya kegiatan itu kita lakukan secara sadar.
- Berencana dan perencanaan itu berorientasi pada pertumbuhan dan perubahan.
- Modernitas maksudnya cara hidup yang lebih baik dari pada sebalumnya serta kemampuan untuk menguasai alam lingkungan dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain.
- Multi-deminsionil maksudnya bahwa modernisasi itu mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa dan Negara terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional dan administrasi.

Setelah menguraikan satu persatu dari kata administrasi dan kata pembangunan. Maka kita dapat mendefinisikan ***Adminstrasi Pembangunan*** adalah seluruh usaha yang dilakukan suatu masyarakat untuk memperbaiki tatanan kehidupannya sebagai suatu bangsa dalam berbagai aspek kehidupan bangsa tersebut yang meliputi berbagai bidang politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, keamanan nasional, dan administrasi dalam rangka usaha pencapaian tujuan yang telah ditentukan (Siagian, 2001:168).

## B. Pemberdayaan

### 1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi

yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan mencapai kemajuan (Syarif, 2001).

Sedangkan Sulistiyani (2004), menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasar dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Berdasarkan beberapa pengertian pemberdayaan yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahnya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri.

**a. Pemberdayaan Masyarakat**

Ginandjar Kartasasmita (1997:20) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai berikut:

> ”Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan, dan berkelanjutan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses

> pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu."

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakanan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Upaya pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan dipahami sebagai suatu proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya, dan politik masyarakat. Perubahan struktural yang diharapkan adalah proses yang berlangsung secara alamiah, yaitu yang menghasilkan harus menikmati. Begitu pula sebaliknya, yang menikmati haruslah yang menghasilkan. Pemberdayaan masyarakat dapat dipandang sebagai jembatan bagi konsep-konsep pembangunan makro dan mikro. Dalam kerangka pemikiran itu berbagai input seperti dana, prasarana dan sarana yang dialokasikan kepada masyarakat melalui berbagai program pembangunan harus ditempatkan sebagai rangsangan untuk memacu percepatan kegiatan sosial ekonomi masyarakat. Proses ini diarahkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat (*capacity building*) melalui pemupukan

modal yang bersumber dari surplus yang dihasilkan dan pada gilirannya dapat menciptakan pendapatan yang dinikmati oleh masyarakat. Dengan demikian, proses transformasi itu harus digerakkan oleh masyarakat sendiri.

Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan adalah bahwa masyarakat tidak dijadikan objek dari berbagai proyek pembangunan, tetapi merupakan subjek dari upaya pembangunannya sendiri. Berdasarkan konsep demikian, maka pemberdayaan masyarakat harus mengikuti pendekatan sebagai berikut ; *pertama*, upaya itu harus terarah. Ini yang secara populer disebut pemihakan.Upaya ini ditujukan langsung kepada yang memerlukan, dengan program yang dirancang untuk mengatasi masalahnya dan sesuai kebutuhannya. *Kedua*, program ini harus langsung mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran. Mengikutsertakan masyarakat yang akan dibantu mempunyai beberapa tujuan, yakni agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendakdan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka. Selain itu, sekaligus meningkatkan kemampuan masyarakat dengan pengalaman dalam merancang, melaksanakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonominya. *Ketiga*, menggunakan pendekatan kelompok, karena secara sendiri-sendiri masyarakat miskin sulit dapat memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya. Juga lingkup bantuan menjadi terlalu luas jika penanganannya dilakukan secara individu. Pendekatan kelompok ini paling efektif dan dilihat dari penggunaan sumber daya juga lebih efisien. Implementasi program pembangunan yang menerapkan strategi pemberdayaan masyarakat tersebut merupakan suatu konsukensi dari pergeseran paradigma pembangunan

nasional yang mengarah pada tercapainya upaya pembangunan yang berpusat pada manusia. *(www.ginandjar.com)*

Sedangkan berkaitan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, Sulistiyani (2004) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya/kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik/material. Kondisi kognitif pada hakikatnya merupakan kemampuan berpikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melaku-kan aktivitas pembangunan.

**b. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Bidang Ekonomi**

Menurut Sumodiningrat (1999), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah usaha untuk menjadikan ekonomi yang kuat, besar, modern, dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang benar. Karena kendala pengembangan ekonomi rakyat adalah kendala struktural, maka pemberdayaan ekonomi rakyat harus dilakukan melalui perubahan struktural.

Perubahan struktural yang dimaksud adalah perubahan dari ekonomi tradisional ke ekonomi modern, dari ekonomi lemah ke ekonomi kuat, dari ekonomi subsisten ke ekonomi pasar, dari ketergantungan ke kemandirian. Langkah-langkah proses perubahan struktur, meliputi:

1. Pengalokasian sumber pemberdayaan sumberdaya
2. Penguatan kelembagaan
3. Penguasaan teknologi
4. Pemberdayaan sumberdaya manusia.

Pemberdayaan ekonomi rakyat, tidak cukup hanya dengan peningkatan produktivitas, memberikan kesempatan berusaha yang sama, dan hanya memberikan suntikan modal sebagai stumulan, tetapi harus dijamin adanya kerjasama dan kemitraan yang erat antara yang telah maju dengan yang masih lemah dan belum berkembang. Kebijakan dalam pembedayaan ekonomi rakyat adalah:

1. Pemberian peluang atau akses yang lebih besar kepada aset produksi (khususnya modal).
2. Memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat, agar pelaku ekonomi rakyat bukan sekadar *price taker*.

3. Pelayanan pendidikan dan kesehatan.

4. Penguatan industri kecil.

5. Pendorong munculnya wirausaha baru.

6. Pemerataan spasial.

Kegiatan pemberdayaan rakyat mencakup: Peningkatan akses bantuan modal usaha, peningkatan akses pengembangan SDM, dan peningkatan akses ke sarana dan prasarana yang mendukung langsung sosial ekonomi masyarakat lokal

**2. Tahapan dan Langkah-Langkah Pemberdayaan**

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. (Randy R Wrihatnolo dan Riant Nugroho Dwidjowijoto, 2007). Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Di samping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Tahap Pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola paluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakaya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life*

*skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatann mewujudkan harapan dan eksistessi dirinya.

Tahap Pendayaan, pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Dalam praktek pemberdayaan UKM, menurut (Karsidi, 2005) langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

**a. Identifikasi Potensi**

Identifikasi potensi, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumberdaya Manusia (SDM) UKM dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi dan Sumberdaya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal UKM. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayah masing-masing. Dalam identifikasi ini melibatkan *stakeholder* UKM dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait.

**b. Analisis Kebutuhan**

Analisis kebutuhan, tahapan analisis ini dilakukan oleh perwakilan UKM yang dapat difasilitasi oleh Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait tentang berbagai kebutuhan dan kecenderungan produk dan pasar. Dengan

pola analisis kebutuhan semacam ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya manifestasi kebutuhan UKM selaku individu pengusaha dan sebagai anggota kelompok. Dengan demikian antara individu pelaku UKM dan kelompok dapat diharapkan saling beriringan dan saling mendukung dalam mencapai tujuan kemajuan bersama.

**c. Rencana Kerja Bersama**

Rencana program kerja bersama, setelah kebutuhan dapat ditentukan maka kemudian disusun sebuah rencana program kerja bersama untuk mencapai kondisi yang diinginkan berdasarkan skala prioritas yang ditetapkan bersama. Dalam tahap ini baik Perguruan Tinggi/LSM/Swasta, maupun instansi terkait sebagai fasilitator.

**d. Pelaksanaan Program Kerja Bersama**

Pelaksanaan program kerja bersama, jikalau program kerja telah disepakati maka langkah berikutnya adalah pelaksanaan program kerja. Dalam tahap ini fungsi instansi pemerintah terkait selaku fasilitator, sedangkan Perguruan Tinggi/LSM/Swasta dapat bertindak selaku pemberi jasa konsultansi. Sebagai konsultan, idealnya Perguruan Tinggi harus mendapatkan jasa dari layanan yang diberikan kepada UKM.

**e. Monitoring dan Evaluasi.**

Monitoring adalah suatu usaha pengawasan terhadap pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi merupakan usaha penilaian terhadap hasil dari program yang dilaksanakan.

**3. Tujuan Pemberdayaan**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Kegiatan yang dilakukan oleh salah satu pihak tentunya memiliki sebuah tujuan yang ingin dicapai dan telah ditentukan sebelumnya. Begitu juga program pemberdayaan yang dilakukan.

Adapun tujuan pemberdayaan menurut Suharto (2005) adalah :

> Masyarakat tumbuh keterampilannya dalam hal memulai dan mengelola kelembagaan serta jaringan yang berbasis pada minat, kebutuhan, keswadayaan, dan kemandirian. Selain itu, Masyarakat tumbuh kesadaran, motivasi dan mau berperanserta nyata dalam proses maupun mengembangkan hasil pembangunan.

Sedangkan tujuan pemberdayaan menurut Sulistiyani (2004) antara lain sebagai berikut:

> Pada hakikatnya tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, efektif dengan pengerahan sumber daya yang dimilki oleh lingkungan internal, masyarakat tersebut. Dengan demikian untuk menjadi mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan efektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisik-material.

Berdasarkan pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2008, terdapat asas dan tujuan itu sendiri, yaitu usaha kecil berasaskan kekeluargaan, demokrasi ekonomi, kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, keseimbangan kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Selain itu berdasarkan undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 bab III bagian kesatu pasal 4 terdapat prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Penumbuhan kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil dan menengah
4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah
5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu.

Dan pada bagian kedua pasal 5 terdapat tujuan pemberdayaan, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadialan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi rakyat.

Berdasarkan tujuan dari pemberdayaan secara umum, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tujuan dilakukan pemberdayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk menguatkan peran dan potensi industri kecil dengan memandirikan masyarakat yang berkecimpung di industri kecil maupun untuk masyarakat di sekitarnya agar bisa meningkatkan pembangunan yang berawal dari masyarakat yang mandiri. Peningkatan kemandirian untuk masyarakat industri

kecil ini adalah bertujuan agar masyarakat dapat meningkatkan taraf hidupnya dan menciptakan pembangunan yang adil dan merata serta berkelanjutan.

**4. Bentuk-Bentuk Pemberdayaan UKM**

Pengembangan industri kecil menengah sebagai salah satu strategi dan kebijakan nasional memiliki peran penting dalam pembangunan dan mendukung dalam pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh. Sumbangan industri kecil menengah dakam sektor pembangunan nasional merupakan wujud nyata yang tidak perlu disangsikan lagi, seperti dapat banyak menyerap tenaga kerja. Disisi lain, potensi yang dimiliki industri kecil yang cukup besar dan tersebar diseluruh pelosok tanah air, utamanya didaerah pedesaan. Oleh karena itu langkah-langkah pengembangan harus segera diterapkan untuk membantu mengatasi kesulitan-kesuliatan yang ada.

Upaya pengembangan dapat dilakukan melalui berbagai kegiatan berupa perangkat lunak maupun keras. Menurut Syahrial Syarif (1991:3), bahwa bentuk-bentuk pemberdayaan meliputi:

1. Perangakat lunak, meliputi:
   - penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan,
   - pembinaan usaha,
   - bantuan promosi dagang,
   - keringanan dan kemudahan yang diberikan kepada pengusaha kecil dalam rangka mendorong berkembangannya usaha.
2. Perangkat keras, meliputi:

- menyediakan fasilitas bersama, misalnya koperasi sentra usaha pada sentra-sentra industri kecil,
- bantuan langsung kepada pengusaha kecil seperti penyediaan tempat usaha dan bantuan permodalan.

Disisi lain, pembinaan atas iklim usaha sebagai factor eksternal dalam berusaha juga perlu mendapatkan perhatian karena hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan industtri kecil.

Menurut Hetifah Syaifudin (1995:24) diperlukan kebijakan-kebijakan yang mampu:

1. Menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi tumbuh dan kembangnya usaha kecil dan menengah. Yang dalam hal ini diperlukan kebijakan-kebijakan yang dapat:
   a. Memperbesar partisipasi golongan ekonomi lemah dalam kegiatan ekonomi.
   b. Menciptakan situasi yang distribusif sehingga pembangunan yang cenderung padat modal bergeser pada situasi yang lebih memperluas kesempatan bagi mata pencaharian orang banyak.
   c. Mengubah situasi ekonomi yang terlanjur terpusat dan ekstraktif menjadi lebih tersebar manfaatnya bagi masyarakat.
   d. Mendistribusikan faktor produksi yang terlanjur dikuasai sekelompok orang, agar kepemilikan dan penguasaannya lebih terdistribusikan oleh rakyat banyak.

2. Mewujudkan usaha kecil menengah menjadi usaha yang efisien, sehat dan memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi sehingga mampu menjadi kekuatan ekonomi rakyat dan dapat memberikan sumbangan yang besar bagi pembangunan ekonomi nasional.
3. Menciptakan bentuk-bentuk kerjasama yang dapat memperkuat kedudukan usaha kecil menengah dalam kompetisi ditingkat nasional maupun tingkat internasional.

Perhatian yang serius dari pemerintah sangat diperlukan dalam pembinaan usaha kecil menengah. Pembinaan dan pengembangan ini sangat diperlukan dalam meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, teknologi, permodalan, dan perluasan pasar.

**5. Strategi Pemberdayaan UKM**

Usaha kecil dan menengah telah diakui sangat strategis dan penting tidak hanya bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga untuk pembagian pendapatan yang merata. Karena peranannya yang sangat strategis dan penting, Indonesia memberikan perhatian khusus bagi perkembangan-perkembangan mereka, termasuk membina lingkungan dengan iklim usaha yang kondusif, memfasilitasi dan memberikan akses pada sumberdaya produktif dan memperkuat kewirausahaan serta daya saingnya.

Untuk memperkuat UKM, salah satu strategi yang penting adalah kemitraan. Untuk membentuk kemitraan-kemitraan ini, peranan pemerintah dan instansi-instansi pendukung lainnya adalah strategis dan penting. Peranan pemerintah dapat dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif untuk

menciptakan kemitraan dan dapat pula memberikan fasilitas dan dukungan-dukungan lain seperti misalnya fasilitas penciptaan keserasian (*match making*), menyediakan bantuan keuangan dan keperluan-keperluan yang lainnya untuk menjembatani kemitraan antara kedua pihak tersebut.

Stategi pengembangan UKM menurut Wayan (2008) antara lain sebagai berikut :

a. Menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

   Penumbuhan iklim usaha yang kondusif ditujukan untuk memberi kesempatan yang sama kepad pelaku usaha dalam mengembangkan usahanya. Dalam kaitan ini, tidak ada perbedaan perlakuan antara usaha besar dan UKM semuanya diperlakukan sama secara proporsional. Penumbuhan iklim usaha kondusif ini lebih banyak ditujukan dalam aspek regulasi dan deregulasi.

b. Meningkatkan akses pasar.

   Perlu ada pelatihan keterampilan dan manajemen untuk meningkatkan kemampuan UKM dalam memproduksi produk yang berkualitas dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Di samping pelatihan, temu bisnis dan eksibisi di dalam dan luar negeri perlu terus digalakkan dalam rangka memperkenalkan produk yang dihasilkan oleh UKM.

c. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UKM.

   Jiwa dan semangat kewirausahaan yang dimiliki oleh UKM Indonesia secara umum masih rendah. Oleh karena itu, ke depan harus mampu mengembangkan wirausaha-wirausaha yang tangguh yang berbasis pada

sumberdaya lokal. Untuk pengembangan kewirausahaan ini, pemerintah akan terus mendorong pengembangan bisnis, baik di perguruan tinggi maupun melalui peran dunia usaha besar. Selain itu, pengembangan modal ventura juga akan lebih digalakkan agar para pengusaha-pengusaha baru ini dapat kemudahan akses permodalan awal melalui modal ventura.

d. Pemberdayaan Usaha Skala Mikro.

Program ini ditujukan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha mikro, terutama yang masih berstatus keluarga miskin dalam rangka memperoleh pendapatan yang tetap, melalui upaya peningkatan kapasitas usaha, sehingga menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, dan siap untuk tumbuh serta bersaing.

Menurut Ginandjar kartasasmita dalam makalahnya yang berjudul ”Konsep Pembangunan Yang Berakar Pada Masyarakat” (Disampaikan pada Sarasehan DPD GOLKAR Tk. I Jawa Timur Surabaya, 14 Maret 1997) beberapa langkah strategis harus ditempuh untuk mengembangkan ekonomi rakyat melalui pemberdayaannya.

*Pertama***,** peningkatan akses ke dalam aset produksi. Masalah yang paling mendasar dalam rangka transformasi struktural ini ternyata adalah akses ke dalam dana. Tersedianya kredit yang memadai dapat menciptakan pembentukan modal bagi usaha rakyat sehingga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan, serta menciptakan surplus yang dapat digunakan untuk membayar kembali kreditnya dan melakukan pemupukan modal.

Permasalahannya adalah adanya prasyarat perbankan yang membuat masyarakat lapisan bawah umumnya dinilai tidak *bankable*. Keadaan ini menyebabkan terbatasnya interaksi antara lembaga keuangan yang melayani pemberian kredit dengan masyarakat kecil yang memerlukan kredit. Akhirnya, modal makin banyak terkonsentrasi pada sektor modern, khususnya pada usaha besar, yang berakibat makin lebarnya jurang kesenjangan. Karena itu, langkah yang amat mendasar yang harus ditempuh adalah membuka akses ekonomi rakyat ke dalam modal. Untuk itu memang diperlukan pendekatan yang berbeda dengan cara-cara perbankan konvensional.

Akses ke dalam modal harus diartikan sebagai keterjangkauan, yang memiliki dua sisi: *pertama*, ada pada saat diperlukan, dan *kedua*, dalam jangkauan kemampuan untuk memanfaatkannya. Dengan demikian, persyaratan teknis perbankan seperti yang biasa digunakan di sektor modern, tidak dapat diterapkan di sini, paling tidak pada tahap awal. Misalnya, penilaian pemberian kredit tidak harus berdasarkan agunan, tetapi berdasarkan prospek kegiatan usaha. Demikian pula penentuan tingkat suku bunga harus memperhatikan kondisi ekonomi rakyat yang senyatanya, dan menguntungkan usaha ekonomi rakyat.

*Kedua***,** memperkuat posisi transaksi dan kemitraan usaha ekonomi rakyat. Sebagai produsen dan penjual, posisi dan kekuatan rakyat dalam perekonomian sangatlah lemah. Mereka adalah *price taker* karena jumlahnya yang sangat banyak dengan pangsa pasar masing-masing yang sangat kecil. Lebih jauh lagi, dalam operasinya mereka biasanya menghadapi kekuatan usaha besar yang melalui persaingan tak seimbang akan mengambil keuntungan yang lebih besar.

Akibatnya, tidak ada insentif untuk meningkatkan mutu, karena keuntungan dari peningkatan mutu justru akan ditarik oleh usaha besar.

Tugas pemerintah yang amat penting adalah pengelolaan ekonomi makro yang menunjang bagi ekonormi rakyat. Stabiltas ekonomi amat penting bagi ekonomi rayat. Karena yang pertama-tama dirugikan jika terjadi gejolak adalah rakyat. Kebijaksanaan harga, baik yang secara langsung dikuasai pemerintah atau secara tidak langsung, juga harus diarahkan untuk meningkatkan ekoncmi rakyat. (*www.ginandjar.com*)

**C. Dampak**

**1. Pengertian Dampak**

Dampak menurut Dunn (1984:280) adalah perubahan kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Dan dapat dibedakan dua jenis dampak yaitu:

1. Dampak (*Impact*)

   Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, dimana akibat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh intervensi program, dan akibat tersebut mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran.

2. Dampak/Pengaruh (*Effect*)

   Akibat yang dihasilkan oleh suatu intervensi program pada kelompok sasaran, baik akibat tersebut sesuai dengan yang diharapkan oleh intervensi program atau tidak, dan akibat tersebut tidak mampu menimbulkan pola perilaku baru pada kelompok sasaran.

**2. Dimensi-Dimensi Dampak**

Pengamatan terhadap dampak kebijakan selain harus dengan kerangka berfikir kausalitas yang kritis dan wawawsan yang komprehensif juga harus dilakukan dengan cermat. Ketiga keharusan ini dapat dipisahkan satu sama lain. Sekedar untuk menuntun kecermatan evaluasi, dapat dipilahkan adanya empat macam dimensi dampak yang penting untuk diperhatikan, yaitu:

1. Waktu

   Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Seorang analis kebijakan atau evaluator harus menyadari hal ini, terutama untuk analisis yang dilakukan setelah kebijakan berjalan. Studi evaluasi sebaiknya tidak dilakukan lama setelah dampak terjadi, karena ada kemungkinan dampak yang dikira akan muncul pada jangka panjang ternyata muncul segera setelah program berakhir. Jika penelitian terlambat dilakukan, maka evaluator akan kesulitan mencari data dan menelisik pengaruh program yang diamati.

2. Selisih antara Dampak Aktual dan yang Diharapkan

   Evaluator tidak saja dianjurkan untuk melihat efektivitas program, melainkan juga untuk melihat berbagai dampak yang tidak diinginkan, dampak yang hanya sebagian saja yang diinginkan dan dampak yang sama sekali bertentangan dengan dampak yang tidak diinginkan.

3. Tingkat Agregasi Dampak

Dampak juga bersifat agregatif, dalam arti dampak yang dirasakan secara individual mungkin akan merembes pada perubahan masyarakat di suatu desa.

4. Jenis Dampak

Dampak dapat menyentuh aspek ekonomi maupun politik dari suatu unit sosial. Suatu kebijakan tidak hanya menyejahterakan sekelompok mayoritas masyarakat dan menyengsarakan minoritas melainkan dapat berpengaruh terhadap sistem nilai masyarakat yang pada akhirnya, meskipun tidak radikal mengubah proses politik secara keseluruhan (Wibawa, 1994).

Dalam penilitian ini yang dimaksud dengan dampak adalah akibat yang dihasilkan dari suatu intervensi program pada kelompok sasaran dengan harapan pengaruh dari pemberdayaan UKM home industri tempe kripik terhadap sosial ekonomi masyarakat keluaran Ngantru nantinya dapat dapat memberikan pengaruh yang positif bagi kehidupan dan kesejahteraan masyarakat.

**3. Dampak UKM Terhadap Masyarakat**

Antara UKM dan masyarakat mempunyai hubungan saling mempengaruhi. Dalam arti luas, industri yang berkaitan dengan teknologi ekonomi, perusahaan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya telah sangat mempengaruhi masyarakat.

Usaha kecil menengah mempengaruhi nilai dalam masyarakat berarti industri tersebut telah memberi input kepada masyarakat sehingga membentuk tingkah laku dan sikap yang tercermin dalam sikap bekerja. Masyarakat pada umumnya harus menerima posisi mereka baik didalam struktur industri maupun pada struktur social yang lebih luas. Untuk itulah diperlukan nilai dalam

masyarakat sehingga mereka dapat bekerja sesuai dengan nilai-nilai yang ada. Nilai dalam masyarakat inilah yang akhirnya membentuk statifikasi. Jika seseorang mendapatkan suatu pekerjaan skaligus akan mendapatkan suatu tingkat kelas sosial tertentu. Statifikasi dalam masyarakat industri memiliki dua bentuk yaitu kelas dan status. Kelas pada umumnya digunakan untuk menunjukkan pembagian didalam masyarakat sedangkan status menunjukan tingkat posisi seseorang yang ditentukan oleh beberapa faktor. Dalam industri ada yang berkedudukan sebagai atasan dan buruh. Industri, khususnya sektor UKM memiliki pengaruh yang menimbulkan akibat fisik didalam masyarakat. Akibat yang dirasakan oleh masyarakat dengan adanya industri bisa dalam berbagai bentuk yang berbeda. Seperti berubahnya wilayah yang menjadi kawasan industri, bisa semakin padat dan semakin berkembang. Perubahan fisik yang dirasakan masyarakat desa sejak berdirinya industri di wilayahnya adalah perbaikan jalan, masuknya jaringan listrik, air bersih dan telefon. Dengan adanya industri di desa mengalami kemajuan yang sangat pesat. Industri dpat mendukung wilayah desa untuk pelaksanaan pembangunan desa.

Usaha yang dilakukan industri untuk mempengaruhi masyarakat adalah usaha yang berupa usaha untuk memberikan gambaran yang menarik dari suatu produk terhadap masyarakat. Salah satu bentuk usaha industri adalah membuat iklan surat kabar. Cara mempengaruhi masyarakat pada awal berdirinya indutri adalah dengan memberikan pendekatan kepada masyarakat sekitar industri, sehingga masyarakat mengetahui dan mengerti seluk beluk industri tersebut.

Selain ketiga hal diatas dari hasil pengamatan bahwa industri juga mempengaruhi masyakat pada bidang perekonomian dan bidang pendidikan. Pengaruh industri terhadap perekonomian masyarakat terlihat pada meningkatnya kemakmuran masyarakat desa. Kemakmuran dapat diukur dengan melihat bagaimana perubahan masyarakat sebelum berdirinya industri. Jika masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, maka kemakmuran telah diperoleh.

Kemakmuran pada masyarakat desa sudah tampak sebelum adanya industri. Tetapi dengan adanya industri kehidupan masyarakat sudah berubah dan kebutuhan hidupnya juga ikut meningkat. Industri berdiri di tengah-tengah masyarakat dapat member variasi lapangan pekerjaan yang sangat luas. Variasi pekerjaan inilah yang memberikan kesempatan kesempatan kepada masyarakat desa untuk bekerja guna untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus meningkat. Tidak hanya pada industri saja masyarakat bekerja. Masyarakat juga bisa membuka usaha berjualan disekitar industri.

Bidang pendidikan juga merupakan salah satu bidang yang dipengaruhi adanya industri. Dengan adanya variasi pekerjaan tertentu juga memerlukan tenaga yang terampil. Tenaga terampil dalam industri diperlukan dalam mengoperasikan alat-alat yang menggunakan teknologi modern yang ada dalam industri. Untuk itu pihak industri sendiri menghendaki suatu metode pendidikan yang memungkinkan lulusan sekolah atau perguruan tinggi mempunyai tenaga terampil yang siap pakai. Sejak adanya industri masyarakat desa yang dulunya tidak peduli dengan pentingnya pendidikan mulai percaya bahwa pendidikan berfungsi mempersiapkan masyarakat untuk dapat terjun langsung ke dunia kerja

dan menganggap bahwa sekolah adalah sarana yang paling tepat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak.

**4. Dampak UKM Terhadap Sosial Ekonomi**

Menurut Saleh (1986:5) menyatakan bahwa UKM sangat berarti dalam pembangunan perekonomian.

> "*Pertama* : UKM dapat menciptakan peluang usaha yang luas dengan pembiayaan yang relatif murah. Hal ini sejalan dengan kenyataan bahwa tingkat keahlian dan daya dukung permodalan dari pengusaha di negara-negara ASEAN pada umumnya masih rendah. *Kedua* : UKM turut mengambil peranan penting dalam peningkatan dan mobiltas tabungan domestik. Ini dimungkinkan oleh kenyataan bahwa industri kecil cenderung memperoleh modal dari tabungan si pengusaha sendiri, atau dari tabungan keluarga dan kerabatnya. *Ketiga* : UKM mempunyai kedudukan komplementer terhadap industri besar dan sedang, karena UKM menghasilkan produk yang relatif murah dan sederhana, yang biasanya tidak dihasilkan oleh industri besar dan sedang"

Sektor industri telah berperan sebagai penggerak utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan meningkatkan produktifitas masyarakat. Di samping itu ukm juga berperan menciptakan lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan serta memeratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. Proses industrialisasi juga penting dalam mendukung berlangsungnya perubahan tata nilai masyarakat dan pranata sosial yang lebih dinamis dan berkualitas. Sektor industri telah menyumbang porsi utama dalam pendapatan devisa negara pada porsi yang lebih besar, meningkatkan pendapatan nasional, menyerap tenaga kerja cukup banyak, sementara kondisi sosial dan budaya masyarakat telah menjadi masyarakat industri (Laporan Pelaksanaan Tupoksi Depperindag 1997/1998).

Beberapa komponen-komponen yang selalu dianggap penting untuk penetapan komponen sosial ekonomi diantaranya adalah (Suratmo, 2002:109):

a. Pola perkembangan penduduk (jumlah, umur, perbandingan kelamin, dan lain sebagainya)
b. Pola perpindahan erat hubungannya dengan perkembangan penduduk. Pola perpindahan yang perlu diketahui meliputi pola perpindahan keluar dan masuk kesuatu daerah secara umum, serta pola perpindahan musiman dan tetap.
c. Pola perkembangan ekonomi erat hubungannya dengan pola perkembangan penduduk, perpindahan, keadaan sumber daya alam, dan sumber pekerjaan yang tersedia.

Komponen sosial ekonomi yang akan ditetapkan sebagai indikator sosial ekonomi masyarakat tidak akan lepas dari jaringan pola-pola perkembangan tersebut. Dalam memilih komponen-komponen lainnya perlu diprioritaskan komponen-komponen yang merupakan komponen kritis atau sangat penting dan menentukan kehidupan masyarakat setempat. Adapun indikator terdiri dari (Suratmo, 2002:110):

a. Penyerapan tenaga kerja. Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung tetapi juga dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber pekerjaan baru dan merupakan komponen berikutnya yang penting.
b. Berkembangnya struktur ekonomi. Dimaksudkan dengan timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat adanya proyek sehingga merupakan

sumber-sumber pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang tersebar oleh proyek.

c. Peningkatan pendapatan masyarakat. Keadaan umum masyarakat yang ada di negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dari proyek akan memberikan dampak yang berarti.

d. Perubahan lapangan pekerjaan. Dengan timbulnya lapangan pekerjaan yang baru baik yang langsung maupun tidak langsung karena perubahan struktur ekonomi perlu diperhatikan karena tidak selalu peerubahan itu menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya pemuda desa enggan bekerja di pertanian lagi, mereka lebih merasa bangga apabila bekerja sebagai buruh atau sebagai pemberi jasa.

Walaupun telah diketahui ada pengaruh-pengaruh negatif terhadap lingkungan sebagai akibat dari intervensi manusia, namun pada kenyataannya pembangunan diperlukan untuk memperbaiki kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Kualitas hidup tidak dapat diperbaiki tanpa perkembangan ekonomi, dengan menjamin penyediaan pangan dan jasa-jasa esensial didaerah-daerah yang laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Pembangunan industri selain diharapkan dapat mewujudkan struktur ekonomi yang semakin seimbang antara industri dan masyarakat, juga diarahkan agar didalam industri sendiri semakin terwujud keseimbangan dan keserasian antara industri untuk pemenuhan dalam negeri dan untuk ekspor, antara industri padat modal dan industri padat karya dan sebagainya. Hal lainnya ditujukan untuk memperluas kesempatan kerja,

memeratakan kesempatan berusaha, meningkatkan ekspor, menghemat devisa, menunjang pembangunan daerah, memanfaatkan sumber daya manusia dan energi.

**D. Usaha Kecil Menengah (UKM)**

**1. Pengertian dan Kriteria Usaha Kecil dan Menengah**

Ada beberapa pengertian mengenai Usaha Kecil dan Menengah, antara lain:

1. Menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag), kelompok usaha yang dimiliki oleh penduduk Indonesia yang asetnya kurang dari Rp.600 Juta rupiah, diluar nilai tanah dan bangunannya. Disperindag juga memiliki pengertian yang lebih spesifik mengenai UKM yang dibagi dalam beberapa sektor, antara lain:

a. Usaha Kecil dan Menengah sektor jasa dibagi menjadi:

1) Usaha Kecil : Usaha Kecil dan Menengah yang modal penyertaannya antara 0 - 600.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

2) Usaha Menengah : Usaha Kecil dan Menengah yang modal penyertaannya antara 600.000.000 – 1.000.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan.

3) Usaha Besar : Usaha Kecil dan Menengah yang modal penyertaannya lebih dari 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

b. Usaha Kecil dan Menengah sektor industri dibagi menjadi:

1) Usaha Kecil : Usaha Kecil dan Menengah yang modal penyertaannya antara 0 – 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

2) Usaha Besar : Usaha Kecil dan Menengah yang modal penyertaannya lebih dari 1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.

2. Menurut UU No.20 Tahun 2008 tentang usaha, kecil, dan menengah mendefinisikan usaha kecil sebagai usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dengan kriteria sebagai berikut:

a. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 50 Juta Rupiah sampai dengan paling banyak Rp. 500 Juta Rupiah tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.

b. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300 Juta Rupiah sampai dengan paling banyak Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah.

Dari semua pengertian yang berkaitan dengan Usaha Kecil yang disampaikan diatas, pada dasarnya definisi mengenai Usaha Kecil berkaitan dengan hal sebagai berikut:

a. Volume penjualan per tahun

b. Nilai aset diluar tanah dan bangunan.

**2. Karakteristik dan Peranan Usaha Kecil dan Menengah**

Dengan sifatnya yang terdiri dari beberapa klasifkasi, maka UKM di Indonesia pastilah memiliki ciri-ciri yang spesifik. Karakteristik yang dimiliki oleh Usaha Kecil dan Menengah menurut Kuncoro (1997) antara lain:

a. Tidak adanya pembagian tugas yang jelas antara bidang administrasi dan operasi. Kebanyakan usaha kecil dikelola oleh perorangan yang merangkap sebagai pemilik sekaligus pengelola perusahaan serta memanfaatkan tenaga kerja dari keluarga dan kerabat dekatnya.
b. Rendahnya akses usaha kecil terhadap lembaga-lembaga kredit formal, sehingga mereka cenderung menggantungkan pembiayaan usahanya dari modal sendiri atau sumber-surnber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir.
c. Sebagian besar usaha kecil ditandai dengan belum memiliki status badan hukum.
d. Dilihat menurut golongan industri, terlihat bahwa hampir sepertiga bagian dari seluruh usaha kecil bergerak pada kelompok industri makanan, minuman dan tembakau. Lalu di ikuti oleh kelompok industri barang galian bukan logam, industri tekstil dan industri kayu, bambu, rotan, rumput dan sejenisnya termasuk perabotan rumah tangga.

Karakteristik dasar UKM di Indonesia menurut Fadli (2009) adalah sebagai berikut :

a. Rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia.
b. Masih lemahnya struktur kemitraan dengan Usaha Besar.
c. Lemahnya kualitas kontrol terhadap produk.
d. Belum ada kejelasan standardisasi produk yang sesuai dengan keinginan konsumen.
e. Kesulitan dalam akses permodalan terutama dari sumber-sumber keuangan yang formal.
f. Pengetahuan tentang ekspor masih lemah.
g. Lemahnya akses pemasaran.
h. Keterbatasan teknologi, akibatnya produktivitas rendah dan rendahnya kualitas produk.
i. Keterbatasan bahan baku.

Karakteristik Usaha Kecil dan Menengah menurut Taufik (2004) adalah sebagai berikut :

a. Skala Usaha Kecil.

   Salah satu karakter penting dari UKM adalah skala usahanya yang relatif kecil. Meskipun batas atas kategori usaha kecil adalah dengan omset maksimal 1 miliar, namun dalam kenyataannya sebahagian besar usaha kecil justru memiliki omset dibawah 500 juta. Mengacu pada argumentasi bahwa salah satu sumber keunggulan adalah melalui *economies of scale*, maka akan sulit bagi usaha berskala kecil secara individual untuk bersaing dengan usaha berskala besar dalam suatu aktivitas bisnis yang sama.

b. Padat Karya.

Produk usaha berskala kecil pada umumnya sangat padat karya. Kegiatan produksi yang melibatkan banyak tenaga kerja sebagai konsekuensi dari aktivitas yang menghasilkan produk yang berciri hand made. Produk UKM yang bersandar pada keahlian dan keterampilan tangan ini membawa konsekuensi pada kurangnya aspek presisi dan kesulitan untuk distandarisasi.

c. Berbasis sumberdaya lokal dan sumberdaya alam.

Salah satu ciri dari orientasi berusaha di kalangan UKM pada umumnya adalah lebih kepada upaya melakukan aktivitas apa yang bisa dilakukan dengan sumberdaya yang ada, ketimbang memproduksi sesuatu yang diminta oleh pasar. Dengan kata lain aktivitas usaha UKM lebih kepada production oriented, memproduksi sebaik mungkin apa yang bisa dilakukan dengan bertumpu pada ketersediaan sumberdaya yang ada. Karakter aktivitas bisnis UKM seperti ini menghasilkan produk-produk unggulan yang komparatif pada masing-masing wilayah. Kebersinambungan usaha yang berbasis sumberdaya alam tentu sangat rentan, manakala UKM terlibat dalam aktivitas produksi yang mengeksploitasi sumberdaya alam yang tidak terbaharui.

d. Pelaku banyak.

Karena hampir tidak ada *barrier to entry* pada aktivitas bisnis UKM, baik dari aspek teknologi, investasi, manajemen, perlindungan hak intelektual, maka sangat mudah bagi masyarakat untuk masuk ke dalam industri yang digeluti oleh UKM. Sebagai konsekuensinya relative sangat banyak pelaku bisnis UKM dalam sektor dan kegiatan bisnis tertentu. Di satu sisi struktur usaha seperti ini sangat baik untuk mendorong kompetisi, tetapi di lain pihak UKM sering dihadapkan pada kondisi dimana banyak UKM sebagai produsen menghadapi kekuatan monopsonis.

e. Menyebar.

Aktivitas bisnis UKM dapat dijumpai hampir diseluruh pelosok tanah air serta diberbagai sektor. Dengan demikian bila UKM dapat mengembangkan jaringan yang efektif, maka konsep global *production* dapat dipenuhi, karena UKM mampu menghasilkan produk dimana saja dan memasarkannya kemana saja serta kapan saja. Dengan kata lain produk UKM yang sejenis sangat mudah diperoleh masyarakat dimana saja dan kapan saja.

Dari karakteristik yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa UKM yang ada rata-rata masih memiliki struktur organisasi serta pembagian tugas yang masih sangat sederhana. Sehingga perlu dikembangkan agar lebih dapat berkembang menjadi skala usaha yang lebih besar.

**3. Kelemahan dan Kelebihan Usaha Kecil dan Menengah**

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Menurut M. Tohar (2002:27), kelebihan Usaha Kecil Menengah adalah sebagai berikut:

1. Industri Kecil memiliki nilai strategis bagi perekonomian negara, seperti contohnya perusahaan besar yang banyak menggantungkan produk-produk tertentu untuk dikerjakan oleh Usaha Kecil, karena jika hanya dikerjakan oleh perusahaan besar, marginnya jadi tidak ekonomis.

2. Keuntungan yang diberikan oleh usaha kecil itu sendiri. Usaha kecil baik perseorangan maupun persekutuan memiliki daya tarik seperti berikut:
   a. Pemilik merangkap sebagai manajer dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, finance, dan administrasi.
   b. Dalam pengelolaannnya mungkin tidak dibutuhkan keahlian manajerial yang handal.
   c. Resiko usaha menjadi beban pemilik.
   d. Prosedur hukum sederhana.
   e. Mudah dibubarkan setiap saat.
   f. Umumnya mampu untuk survive.
   g. Bebas menentukan harga produksi.
   h. Proses pendiriannya mudah.
   i. Investasi relatif tidak tinggi.

Kelemahan Usaha Kecil, menurut Tohar (2002:29) umumnya akibat beberapa faktor:

1. Faktor Intern:

   a. Utang yang tidak bermanfaat.

   b. Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak ada perencanaan kas.

   c. Persediaan barang terlalu banyak, sehingga ada beberapa yang tidak laku.

   d. Sering terjadi *mist management.*

   e. Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik.

   f. Perencanaan dan pengendalian sering tak ada.

   g. pembagian kerja tidak profesional dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.

2. Faktor Ekstern:

   a. Resiko dan utang-utang pada pihak ketiga ditanggung oleh pemilik.

   b. Sering kekurangan informasi bisnis (hanya didasarkan pada intuisi dan ambisi).

   c. Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar dan analisis perputaran uang tunai.

Eksistensi Usaha Kecil dan Menengah antara lain :

   a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam kegiatan ekonomi di berbagai sektor.

   b. Penyedia lapangan kerja yang terbesar.

   c. Pencipta lapangan baru dan inovasi

   d. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyaraka

e. Sumbangan dalam menjaga neraca pembayaran melalui sumbangannya dalam menghasilkan ekspor.

Dari alasan eksistensi serta manfaat adanya Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang telah disebutkan di atas maka jelas terlihat mengapa UKM di Indonesia ini perlu lebih diberdayakan agar menunjang pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Jadi kesimpulannya bahwa terdapat hal-hal yang menjadi faktor kelebihan dan kelemahan yang berpengaruh pada keberadaan sebuah Usaha Kecil. Dengan upaya pemberdayaan Usaha Kecil yang dilaksanakan pemerintah diharapkan faktor kelebihan akan mampu dikembangkan, sedangkan faktor kelemahan mampu diatasi.

**4. Masalah Yang Dihadapi Usaha Kecil dan Menengah**

Meskipun struktur organisasi yang dimiliki masih amat sederhana namun permasalahan tetap mengahadang keberadaan UKM di Indonesi. Menurut Kuncoro (1997) pada dasarnya masalah atau tantangan yang dihadapi oleh usaha kecil adalah:

a. Kelemahan dalam memperoleh peluang pasar dan memperbesar pangsa pasar.

b Kelemahan dalam struktur permodalan dan keterbatasan untuk memperoleh jalur terhadap sumber-sumber pcrmodalan.

c. Kelernahan di bidang organisasi dan manajemen sumber daya manusia.

d. Keterbatasan jaringan usaha kerjasama antar pengusaha kecil (sistem infonnasi pemasaran).

e. Iklim usaha yang kurang kondusif karena persaingan yang saling mematikan.

f. Pembinaan yang telah dilakukan masih kurang terpadu dan kurangnya kepercayaan serta kepedulian masyarakat terhadap usaha kecil.

Dan masalah atau tantangan yang dihadapi oleh usaha menengah biasanya jauh lebih kompleks. Umumnya mereka mulai memikirkan untuk melakukan ekspansi usaha lebih lanjut. Berdasarkan pengamatan Pusat Konsultasi Pengusaha KeciI, urutan prioritas permasalahan yang dihadapi oleh usaha menengah ini menurut Kuncoro (2007) adalah:

a. Masalah belum dipunyainya sistem administrasi keuangan dan manajemen yang baik karena belum dipisahkannya kepemilikan dan pengelolaan perusahaan.

b. Masalah bagaimana menyusun proposal dan membuatstudi kelayakan untuk memperoleh pinjaman, baik dari bank maupun modal ventura, karena kebanyakan pengusaha menengah mengeluhkan prosedur untuk mendapatkan kredit yang berbelit, bagunan tidak memenuhi syarat dan tingkat bunga yang dinilai terlalu tinggi.

c. Masalah menyusun perencanaan bisnis karena persaingan dalam merebut pasar semakin ketat.

d. Masalah akses terhadap teknologi, terutama bila pasar dikuasai oleh perusahaan atau grup bisnis tertentu dan selera konsumen cepat berubah.

e. Masalah memperoleh bahan baku, terutama karena adanya persaingan yang ketat dalam mendapatkan bahan baku, bahan baku berkualitas rendah dan tingginya harga bahan baku.

f. Masalah perbaikan kualitas barang dan efisiensi, terutama bagi yang sudah menggarap pasar ekspor karena selera konsumen berubah cepat, pasar dikuasai perusahaan teuentu dan banyak barang pengganti.

g. Masalah tenaga kerja karena sulit r.iendapatkan tenaga kerja yang terampil.

Sedangkan menurut Tambunan (2002) secara global, tantangan lebih konkrit yang akan dihadapai oleh sektor UKM dengan adanya perdagangan bebas antara lain:

a. Meningkatkan kualitas dan mutu produk mereka menjadi lebih unggul daripada produk serupa dari luar daerah.

b. Menembus pasar baru atau meningkatkan pangsa pasar atau paling tidak mempertahankannya (strategi jangka pendek).

c. Menciptakan kegiatan baru yang produktif dengan daya saing yang tinggi.

d. Mengembangkan usaha/perusahaan tanpa merugikan efisiensii usaha.

Dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas dapat dilihat bahwa banyak sekali tantangan yang harus dihadapi oleh sektor UKM ini, terutama

dalam hal persaingan usaha. Maka dari itu perlu kerjasama dari berbagai pihak untuk dapat sama-sama mempertahankan keberadaan UKM ini.

**5. Upaya Pemerintah dalam Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah**

Pengertian upaya dalam kamus besar Bahasa Indonesia adalah identik dengan kata "Usaha" yaitu akal, ikhtiar (untuk mencapai maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar). (Tim Penyusun dan Pengembangan Bahasa, 1991:109)

Terkait dengan judul tersebut dapat disimpulkan bahwa pengertian upaya adalah suatu bentuk kegiatan untuk mencapai maksud atau tujuan yang didasari atas kemampuan akal dan pikiran serta tenaga yang tersedia. Dalam hal ini berhubungan dengan upaya pemerintah dalam program pemberdayaan UKM.

Pemerintah memegang peranan penting dalam kaitanya dengan proses pemberdayaan usaha kecil menengah, pemerintah menjadi *vocal point* untuk pemberdayaan usaha kecil dan menengah. Disini yang paling memahami kondisi sebenarnya dari industri kecil adalah pemerintah daerah dibandingkan dengan pemerintah pusat terkait dengan otonomi daerah saat ini. Oleh sebab itu pemerintah daerah lebih bisa merumuskan kebijakan yang tepat bagi penberdayaan industri kecil menengah di daerahnya dibandingkan dengan pemerintah pusat.

Inisiatif pemerintah daerah dengan otonomi daerah dimana kewenangan pemerintah daerah lebih luas dan lebih menonjol dalam pembangunan ekonomi lokal. Utamanya dalam pemberdayaan industri kecil menengah, sehingga kemungkinan yang terjadi dalam program-program yang dibuat oleh pemerintah

daerah untuk pemberdayaan industri kecil dan menengah lebih cocok dan sesuai dengan karakteristik dari daerah yang bersangkutan.

Tahap pertama bagi setiap organisasi yang tertarik dengan pemerintah daerah adalah menentukan peran yang akan dilaksanakan dalam proses pembangunan daerah termasuk pula pembangunan ekonomi dan industri. Pemerintah dalam mengembangkan potensi daerah hendaknya selalu berada didepan dalam arti memberikan penghargaan dan perencanaan pembangunan daerah.

Menurut Arsyad (1999:120) terdapat empat peranan yang dapat diambil pemerintah daerah dalam proses pembangunan termasuk pembangunan ekonomi dan industri, yaitu:

a. Sebagai *entrepreneur*, bahwa pemerintah bertanggung jawab untuk menjalankan usaha bisnis, pemerintah daerah dapat mengembangkan usaha sendiri (BUMD). Aset-aset pemerintah daerah harus dapat dikelola dengan lebih baik sehingga secara ekonomi dapat menguntungkan.
b. Sebagai *koordinator*, bahwa pemerintah daerah dapat bertindak sebagai koordinator untuk menciptakan kebijakan atau mengusulkan strategi bagi pembangunan daerahnya. Pemerintah daerah juga dapat melibatkan kelompok-kelompok masyarakat dalam proses pengumpulan dan pengevaluasian informasi ekonomi misalnya, tingkat kesempatan kerja, angkatan kerja, pengangguran, dan sebagainya. Selain itu juga bisa melibatkan lembaga-lembaga pemerintah lainnya.

c. Sebagai *fasilitator*, bahwa pemerintah daerah dapat mempercepat pembangunan melalui perbaikan lingkungan *attitudinal* (perilaku atau budaya masyarakat) didaerahnya. Hal ini akan mempercepat proses pembangunan dan prosedur perencanaan serta pengaturan penetapan daerah yang lebih baik.

d. Sebagai *stimulator*, bahwa pemerintah daerah dapat menstimulasi penciptaan dan pengembangan usaha melalui tindakan-tindakan khusus yang akan mempengaruhi perusahaan untuk masuk kedaerah tersebut. Stimulasi dapat berupa pembuatan brosur-brosur, pembangunan kawasan industri, pembuatan *outles* untuk produk industri, dan membantu industri kecil melakukan atau mengikuti pameran.

Peran pemerintah daerah dalam pembangunan daerah juga harus didukung oleh partisipasi masyarakat, karena jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat maka tujuan pembangunan tidak akan mendapatkan hasil atau tidak tercapai secara maksimal. Sehingga pembangunan akan tidak tepat sasaran dalam hal ini tentu akan merugikan masyarakat selaku obyek dari pembangunan.

# BAB III

# METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan bagaimana penelitian untuk skripsi tersebut dilakukan. Di dalam melakukan penelitian diperlukan metode penelitian yang disesuaikan dengan pokok permasalahan yang akan diteliti. Dengan metode penelitian akan diperoleh data dan informasi yang mendukung analisa dalam penulisan skripsi ini, Selain itu juga akan menjadi jelas dan terfokus ruang lingkup penelitian. Sedangkan menurut Nasir (1988:13) adalah :

> "suatu metode dalam meneliti status kelompok, suatu obyek, suatu kondisi, suatu pemikiran ataupun membuat kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari deskriptif adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan fenomena yang diselidiki".

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif yaitu merupakan bentuk atau tipe penelitian untuk pencarian fakta dengan interprestasi yang tepat. Menurut Masri Singarimbun (1987:7) ada dua tujuan yang dicapai penelitian deskriptif, yaitu :

1. Untuk mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu.
2. Untuk mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosian tertentu.

Metode deskriptif memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta (*facts finding*) sebagaimana keadaan sebenarnya.



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian ini adalah metode pendekatan kualitatif karena data yang dihasilkan dalam penelitian ini berupa kata-kata tertulis atau lisan.

> "Riset kualitatif memproses pencarian gambaran data dari konteks kejadiannya langsung, sebagai upaya melukiskan peristiwa sepersis kenyataannya, yang berarti membuat berbagai kejadiannya seperti merekat, dan melibatkan perspektif (peneliti) yang partisipatif di dalam berbagai kejadiannya, serta menggunakan penginduksian dalam menjelaskan gambaran fenomena yang diamatinya (Gorman & Clayton dalam Santana, 2007:29)".

Dari uraian tersebut diatas maka alasan penggunaan jenis penelitian ini bahwa peneliti akan berusaha mengambarkan atau mendeskripsikan, tentang upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM dan dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

## B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian sangat penting bagi penulis karena dapat memudahkan dalam membuat keputusan yang tepat, yaitu tentang data mana yang diperlukan atau data mana yang tidak diperlukan dalam penelitian ini.

Penentuan fokus penelitian menurut Moleong (2009:94) mempunyai dua tujuan :

a. Penetapan fokus dapat membatasi studi. Fokus akan membatasi bidang inkuiri. Jadi peneliti tidak perlu kesana kemari untuk mencari subjek penelitian, sudah dengan sendirinya dibatasi dengan fokusnya.
b. Memenuhi kriteria inklusi-eksklusi atau kriteria masuk-keluar (*inclusion-exlusion criteria*) suatu informasi yang baru diterima di lapangan. Dengan bimbingan dan arahan suatu fokus, seorang peneliti tahu persis data mana dan data tentang apa yang perlu dikumpulkan dan data mana pula, yang walaupun mungkin menarik, karena tidak relevan, tidak perlu dimasukkan

ke dalam sejumlah data yang sedang dikumpulkan. Jadi dengan penetapan fokus yang jelas dan mantap, seorang peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data mana yang dikumpulkan dan mana yang tidak perlu dijamah ataupun mana yang akan dibuang.

Menurut Moleong (2001:297), fokus penelitian adalah penetapan masalah yang menjadi pusat perhatian pada suatu penelitian. Atau segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian peneliti, dalam hal ini mengkhususkan data-data yang berkaitan dengan judul atau topik penelitian yang akan diteliti untuk diambil data-datanya, sehingga mempermudah peneliti menemukan serta memilih data-data mana ynag diperlukan untuk suatu penelitian. Sehubungan dengan pokok masalah yang akan penulis teliti, maka fokus penelitianya adalah sebagai berikut :

1. Upaya pemerintah daerah dalam pemberdayaan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru, meliputi:
   a. Identifikasi potensi dan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi
   b. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UKM
   c. Pengembangan pemasaran dalam upaya meningkatkan akses pasar
2. Dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Ngantru:
   a. Peningkatan pendapatan: perbandingan pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya industri keripik tempe.
   b. Lapangan kerja baru: memberikan kesempatan baru dalam peluang kerja dan usaha baru.

## C. Lokasi dan Situs Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian ini dilakukan. Dalam penelitian ini mengambil lokasi di Kabupaten Trenggalek yang mengambil lokasi di Dinas KOPERINDAGTAMBEN Kabupaten Trenggalek yang terletak di Jalan Raya Buluagung No. 8 Trenggalek Telp. (0355-791689). Sedangkan situs penelitian merupakan tempat dimana peneliti akan dapat menangkap keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti guna memperoleh data. Dalam penelitian ini yang menjadi situs penilitian adalah Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek yang merupakan sentra industri keripik tempe. Dengan demikian penelitian terhadap situs ini didasarkan pertimbangan bahwa lokasi atau tempat tersebut memungkinkan untuk di peroleh data atau informasi yang akurat dan relevan dengan permasalahan penelitian.

## D. Sumber Data

Sumber data merupakan asal data yang diperoleh dan dari sumber tersebut dapat diberikan informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. Adapun sumber data pada penelitian adalah :

1. Kabid dan staf Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi (Diskoperindagtamben) Kabupaten Trenggalek.
2. UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru.

Sedangkan yang menjadi sumber data tambahan adalah dokumen-dokumen yang berupa buku-buku, laporan-laporan, artikel-artikel dan buletin yan

ada kaitanya dengan masalah penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari sumber data yang utama tanpa adanya perantara. Dalam hal ini peneliti menetapkan sumber data primernya dari keterangan langsung Kadin dan staf kantor KOPERINDAGTAMBEN Kabupaten Trenggalek, dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru.

2) Data Sekunder

Yaitu data yang mendukung data primer yang berupa catatan-catatan resmi, dokumen, arsip-arsip, petunjuk-petunjuk, peraturan-peraturan dan laporan yang ada di kantor Dinas KOPERINDAGTAMBEN Kabupaten Trenggalek yang berkaitan dengan penelitian ini.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik penggumpulan data yang penulis pergunakan adalah :

1. Wawancara Langsung

Yaitu teknik pengumpulan data dengan jalan mengadakan tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan cara sistematis dengan tujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan mendalam guna mempermudah pembahasan selanjutnnya

2. Observasi

Yaitu mengadakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan UKM keripik tempe di kelurahan Ngantru sehingga dapat diperoleh senyatanya tentang

masalah-masalah yang diteliti. Penelitian lapangan, untuk memperoleh data primer secara langsung melalui pengisian kuisioner.

3. Dokumentasi

Yaitu penggalian data yang ditempuh dengan mempelajari dan mencatat dokumen-dokumen yang sesuai dengan masalah dan fokus penelitian. Teknik ini berguna untuk melengkapi data-data yang peneliti dapatkan melalui teknik wawancara dan observasi.

**F. Instrument Penelitian**

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang digunakan dalam proses pengumpulan data yang berwujud sarana atau benda. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Peneliti Sendiri

Hal ini sesuai dengan metode penelitian yang dipakai yaitu metode penelitian kualitatif, dimana pengumpulan data lebih tergantung pada diri peneliti sendiri. Disini peneliti sebagai instrumen utama (*instrument guide*) dengan menggunakan panca indera untuk menyaksikan dan mengamati proyek atau fenomena dalam penelitian ini.

2. Pedoman Wawancara (*interview guide*)

Pedoman wawancara merupakan serangkaian pertanyaan yang akan ditanyakan kepada responden yang mana hal ini akan digunakan sebagai petunjuk pada saat melakukan wawancara.

3. Catatan Lapangan (*field note*)

Catatan ini dibuat setelah peneliti mengadakan pengamatan ataupun wawancara. Catatan ini merupakan hasil dari penelitian yang didengar, dilihat, dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi data dalam penelitian kualitatif.

**G. Analisis Data**

Analisis data merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu penelitian ilmiah karena dengan analisis suatu data dapat diberi arti atau makna yang berguna dalam memecahkan masalah-masalah penelitian. Dalam penelitian ini metode analisis yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu analisis yang tidak menggunakan perhitungan-perhitungan yang bersifat statistik.

Setelah itu menggunakan pendekatan yang logis, akurat dan tentang keadaan yang sebenarnya dan menarik kesimpulan sehingga diperoleh penyelesaian masalah. Dari data yang terkumpul tersebut, dilakukan suatu analisis data sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman (1992:16) bahwa alur kegiatan dalam menganalisis data adalah :

a. Reduksi data, yaitu pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan, menggolongkan, mengarahkan membuang yang tidak perlu, mengorganisasi data.

b. Penyajian data, yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan kesimpulan / verifikasi yaitu membuat kesimpulan sementara yang longgar terbuka. Kesimpulan ini mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci.

c. Menarik kesimpulan, Membuat kesimpulan sementara yang longgar terbuka. Kesimpulan ini mula-mula belum jelas kemudian meningkat menjadi lebih rinci.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# BAB IV

# HASIL DAN PEMBAHASAN

## H. Penyajian Data Umum

### 1. Gambaran Umum Kabupaten Trenggalek

#### a. Profil Kabupaten Trenggalek

Kabupaten Trenggalek dengan luas wilayah 126. 140 Ha, dimana 2/3 bagian luasnya merupakan tanah pegunungan, Terbagi menjadi 14 Kecamatan dan 157 Desa. Sedangkan luas laut 4 mil dari daratan adalah 711,68 km. Jumlah penduduk tahun 2007 sebanyak 687.477 jiwa terdiri dari 50.17 % wanita dan 49.83 % laki-laki dengan kepadatan penduduk 545 jiwa/ $Km^2$ dan laju pertumbuhan penduduk sebesar 0.22 % jumlah penduduk tahun 2009 sebanyak 796.966 jiwa terdiri dari 50.49 % wanita dan 49.51 % laki-laki.

Jumlah rumah sakit 4, puskesmas22, puskesmas pembatu 66, dan jumlah tenaga medis diantaranya doktor umum 48, spesialis 5, D-III perawat 422, D-III bidan 253, serta apoteker 9 orang. Dari sisi pendidikan tercatat jumlah fasilitas pendidikan SD, SLTP, SLTA masing-masing sejumlah 438, 76, dan 38 buah.

Pada kegiatan Industri Pengelolaan tercatat jumlah perusahaan sebesar 20.798 buah dengan nilai investasi Rp 4.146.513.086,- dan nilai produksi sebesar Rp 33.877.783.310,- sedangkan jumlah Desa yang teraliri listrik sebanyak 157 desa atau

sudah menjangkau seluruh desa yang ada dengan pelanggan sebanyak 106.268 pelanggan.

Luas areal sawah sebesar 12.111 Ha, tanah kering 48.868 Ha, dan perkebunan 1.979 Ha, menghasilkan padi sawah & dan ladang sebesar 168.898 ton padi, 103.155 ton jagung, 434.365 ton ubi kayu serta komoditi pertaniaan lainnya. Disamping itu Kabupaten Trenggalek yang berbatasan dengan laut mempunyai 5.348 nelayan, dan selama tahun 2009 menghasilkan ikan sebayak 23.845,3 ton.

Kabupaten Trenggalek mempunyai banyak obyek wisata , 5 diantaranya sudah di berdayakan dengan jumlah pengunjung selama tahun 2009 tercatat 446.283 orang. Sedangkan dari segi prasarana jalan tercepat panjang jalan seluruhnya 999.07 Km dimana 897.90 Km merupakan jalan Kabupaten, dimana 33.66 % kondisinya baik, 23,13 % kondisi sedang, 23,74 % rusak ringan dan 19,42 % rusak berat.

Kabupaten Trenggalek dalam era otonomi daerah mempunyai penerimaan daerah sebesar Rp 714.585.000.000,- dan pengeluaran daerah sebesar Rp. 731.129.000.000,-

Pelaksanaan pembangunan ini telah membuahkan hasil yang mengembirakan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi taun 2009 tercatat 5,64 % dimana sektor pertanian masih mendominasi dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 34,35 % di susul sector jasa-jasa 21,36 % sector perdagangan, hotel, dan restauran 18.74 % sedangkan

sector lainnya kurang dari 10 %. Pendapatan perkapita penduduk secara nominal mencapai 4,66 juta rupiah. Sedangkan secara riil mencapai 2,91 juta rupiah. *Sumber: trenggalekkab.go.id*

**b. Kondisi Geografis**

Kabupaten Trenggalek sebagian besar terdiri dari tanah pegunungan dengan luas meliputi 2/3 bagian luas wilayah. Sedangkan sisa-nya (1/3 bagian) merupakan tanah dataran rendah. Ketinggian tanahnya diantara 0 hingga 690 meter diatas permukaan laut. Dengan luas wilayah 126.140 Ha, Kabupaten Trenggalek terbagi menjadi 14 Kecamatan da 157 desa. Hanya sekitar 4 Kecamatan yang mayoritas desanya dataran, yaitu: Kecamatan Trenggalek, Kecamatan Pogalan, Kecamatan Tugu dan Kecamatan Durenan. Sedangkan 10 Kecamatan lainnya mayoritas desanya Pegunungan. Menurut luas wilayahnya, 4 Kecamatan yang luas wilayahnya kurang dari 50,00 Km². Kecamatan tersebut adalah Kecamatan Gandusari, Durenan, Suruh, dan Pogalan. Sedangkan 3 Kecamatan yang luasnya antara 50,00 Km² – 100,00 Km² adalah Kecamatan Trenggalek, Tugu, dan Karangan. Untuk 7 Kecamatan lainnya mempunyai luas diatas 100,00 Km².

Batas-batas wilayah Kabupaten Trenggalek dapat dijelaskan dengan tabel dan gambar dibawah ini :

**Tabel 1.**
**Batas Wilayah Kabupaten Trenggalek**

| No | Bagian | Berbatas dengan |
|---|---|---|
| 1. | Utara | Kabupaten Ponorogo dan Tulungagung |
| 2. | Timur | Kabupaten Tulungagung |
| 3. | Selatan | Samudra Hindia |
| 4. | Barat | Kabupaten Ponorogo dan Pacitan |

*Sumber: trenggalekkab.go.id*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Gambar 1.**
**Peta Kabupaten Trenggalek**

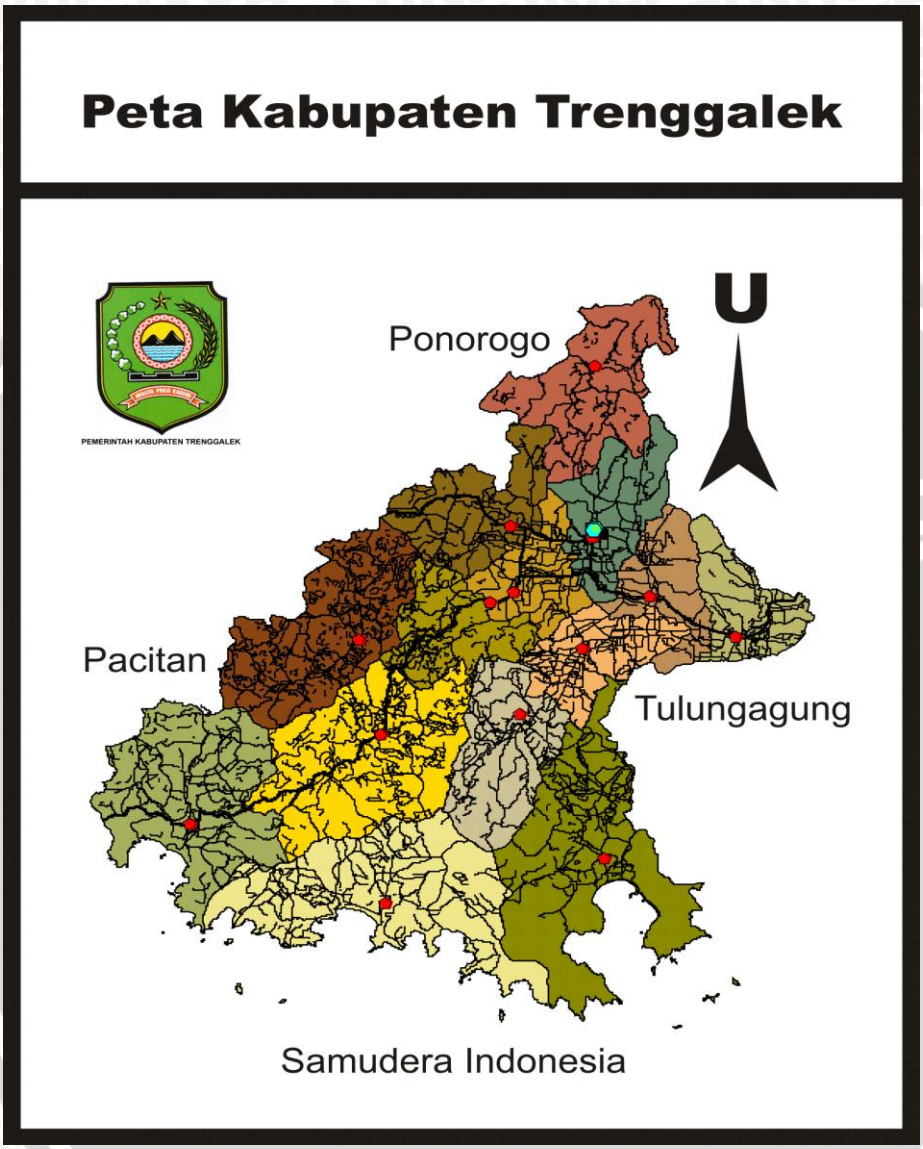


*Sumber: trenggalekkab.go.id*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.**

**a. Kedudukan Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi**

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Otonomi Daerah yang diatur dalam undang-undang tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang realisasinya tertuang dalam salinan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 79 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek serta guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi diperlukan suatu unsur pelaksana yang menangani, sehingga tugas di bidang bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek adalah Dinas Daerah yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah, urusan-urusan yang diselenggarakan oleh daerah adalah urusan-urusan yang telah menjadi urusan rumah tangga daerah, dan Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi sepenuhnya berada di bawah

dan bertanggung jawab terhadap Bupati Trenggalek melalui Sekretaris Daerah.

Dengan demikian Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek adalah salah satu Dinas Daerah yang merupakan aparat pelaksana Pemerintah Daerah Kabupaten Trenggalek yang bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan manajemen untuk pelaksanaan tugas Daerah Otonom dalam bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi yang telah diserahkan menjadi urusan rumah tangga daerah yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Trenggalek.

**b. Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan**

Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di bidang Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi serta tugas pembantuan.

Untuk melaksanakan tugas Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek mempunyai fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi berdasarkan peraturan perundang-undangan;
2. Pengkoordinasian penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum di bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi;
3. Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi dan urusan rumah tangga Dinas;
4. Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi dan pelayanan umum di bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi meliputi koperasi, industri, dan perdagangan, usaha kecil menengah (UKM), serta pertambangan dan energi;
5. Penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi sesuai dengan kewenangan Daerah;
6. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang koperasi, industri, perdagangan, pertambangan dan energi meliputi koperasi, industri dan perdagangan, Usaha Kecil Menengah (UKM), serta pertambangan dan energi dalam lingkup tugasnya;

7. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

**c. Susunan dan Struktur Organisasi**

Susunan Dinas Koperasi, Industrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2008 yaitu terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, membawahi :
   a) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan;
   b) Sub Bagian Keuangan;
   c) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Koperasi, membawahi :
   a) Seksi Pendaftaran dan Hukum;
   b) Seksi Bina Usaha Koperasi;
   c) Seksi Fasilitasi dan Simpan Pinjam;
4. Bidang Industri dan Perdagangan, membawahi :
   a) Seksi Bina Usaha Perindustrian;
   b) Seksi Bina Usaha Perdagangan;
   c) Seksi Pendataan dan Perlindungan Konsumen;
5. Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), membawahi :
   a) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;

b) Seksi Kewirausahaan;

c) Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran;

6. Bidang Pertambangan dan Energi, membawahi :

a) Seksi Pertambangan Umum;

b) Seksi Energi dan Migas;

c) Seksi Pengendalian dan Reklamasi;

7. Kelompok Jabatan Fungsional

8. UPT Dinas

Berikut uraian lebih lanjut mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi yang terdapat dalam struktur organisasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek:

1. Kepala Dinas, mempunyai tugas menyelenggarakan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan pasal 4, berdasarkan perauturan perundang-undangan dan kebijakan Bupati.
2. Sekretaris, bertanggung jawab langsung pada Kepala Dinas, mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perumusan kebijakan teknis, membina dan memberikan pelayanan administrasi kepada semua unsur di lingkungan Dinas. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi :

a) Pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis berdasarkan peraturan perundang–undangan dan kebijakan Kepala Dinas;
b) Perumusan kebijakan teknis dan penyusunan program / kegiatan Sekretariat;
c) Pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
d) Penyelenggaraan, pembinaan dan pengendalian pelayanan administrasi umum, kepegawaian dan penatausahaan keuangan;
e) Pengkoordinasian penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kinerja Dinas;
f) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Bidang-bidang, yaitu :

a) Bidang Koperasi, dipimpin oleh Kepala Bidang Koperasi dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi berdasarkan peraturan perundang – undangan dan kebijakan Kepala Dinas, penyusunan program / kegiatan di bidang koperasi, pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pendaftaran dan hukum, bina usaha koperasi dan fasilitasi simpan pinjam, pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang koperasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang koperasi, pelaksanaan tuags kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Bidang Koperasi, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1) Seksi Pendaftaran dan Hukum;
2) Seksi Bina Usaha Koperasi;
3) Seksi Fasilitasi dan Simpan Pinjam;

Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

b) Bidang Industri dan Perdagangan, dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di bidang industri dan perdagangan berdasarkan peraturan perundang–undangan dan kebijakan Kepala Dinas, penyusunan program/kegiatan di bidang industri dan perdagangan, pengkoordinasi dan penyelenggaraan pelayanan bina usaha perindustrian, bina usaha perdagangan, serta pendataan perlindungan konsumen, pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang industri dan perdagangan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang bidang industri dan perdagangan, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bidang Industri dan Perdagangan, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh:

1) Seksi Bina Usaha Perindustrian;
2) Seksi Bina Usaha Perdagangan;
3) Seksi Pendataan dan Perlindungan Konsumen;

Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Industri dan Perdagangan.

c) Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM) berdasarkan peraturan perundang–undangan dan kebijakan Kepala Dinas, penyusunan program/kegiatan di Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan permodalan usaha kecil dan menengah, kewirausahaan, pengembangan produk dan pemasaran, pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja, di Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM), dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1) Seksi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah;
2) Seksi Kewirausahaan;
3) Seksi Pengembangan Produk dan Pemasaran;

Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Usaha Kecil dan Menengah (UKM)

d) Bidang Pertambangan dan Energi, dipimpin oleh Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, mempunyai fungsi perumusan kebijakan teknis di pertambangan dan energi berdasarkan peraturan perundang–undangan dan kebijakan Kepala Dinas, penyusunan program/kegiatan di bidang pertambangan dan energi, pengkoordinasian dan penyelenggaraan pelayanan pertambangan umum, energi dan migas, serta pengendalian dan reklamasi, pembinaan, pengendalian dan pelaporan kinerja di bidang pertambangan dan energi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pertambangan dan energi, pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.

Bidang Pertambangan dan Energi, dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh :

1) Seksi Pertambangan Umum;
2) Seksi Energi dan Migas;
3) Seksi Pengendalian dan Reklamasi;

Masing–masing Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pertambangan dan Energi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang pejabat fungsionaris senior yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan dibentuk oleh Kepala Dinas dalam rangka mengorganisir pejabat-pejabat fungsional yang melaksanakan tugas dengan fungsi masing-masing yang telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.
5. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD), dibentuk berdasarkan kebutuhan untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dengan wilayah kerja tertentu, dan pembentukan, susunan dan tata kerja UPT Dinas diatur diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan struktur organisasi merupakan hal yang penting bagi organisasi untuk menjelaskan mengenai pembagian tugas dalam

organisasi. Pembagian tugas tersebut sekaligus menggambarkan garis wewenang dalam organisasi. Berikut ini akan disajikan gambar mengenai struktur organisasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Gambar 2.**
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Industrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek**

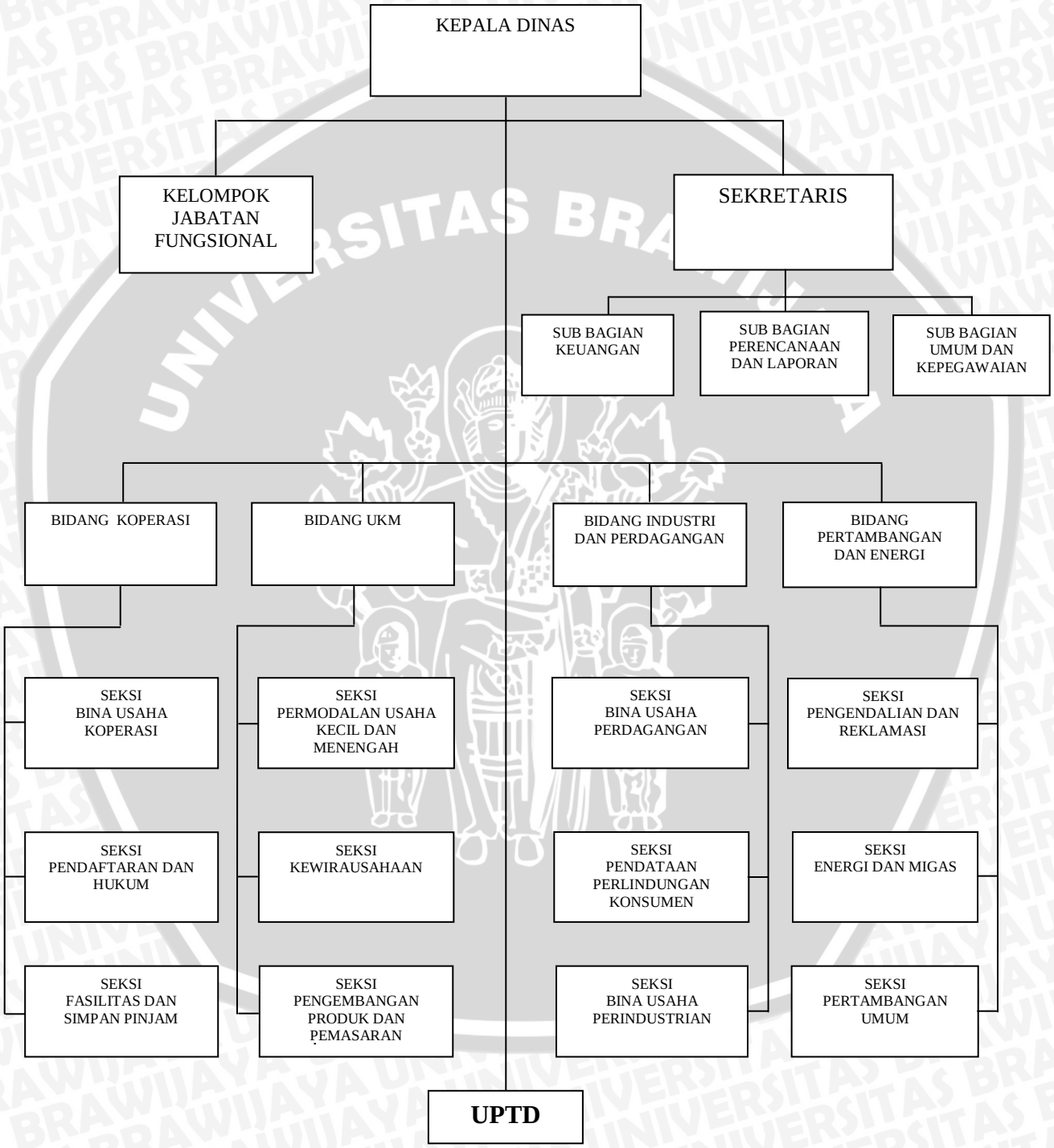


*Sumber: Sekretariat Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek.*

Dalam struktur organisasi yang tergambar di atas, dapat disimpulkan bahwa organisasi telah melakukan pengelompokan yang sesuai dari fungsi-fungsi untuk dapat melaksanakan tugas-tugas secara efektif, penetapan hubungan-hubungan yang sesuai di dalam kelompok yang bersangkutan dan dalam organisasi secara keseluruhan, dan menjamin adanya unsur-unsur pengendalian yang wajar.

Dalam struktur organisasi juga dapat dilihat pendelegasian tanggung jawab dan kewenangan yang sesuai kepada setiap tingkat oraganisasi dan setiap unit. Dalam gambar struktur Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dapat dilihat bahwa sekretaris, kepala bidang koperasi, kepala bidang ukm, kepala bidang industri dan perdagangan, serta kepala bidang pertambangan dan energi bertanggung jawab langsung kepada kepala dinas selaku pimpinan organisasi. Kemudian sub bagian keuangan, sub bagian perencanaan dan laporan, sub bagian umum dan kepegawaian bertanggung jawab kepada sekretaris. Dapat dilihat pula bahwa kepala seksi bertanggung jawab kepada masing-masing kepala bidang.

**d. Aspek Sumber Daya Aparatur Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek**

Potensi SDM merupakan kondisi riil yang dimiliki oleh suatu pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. Kondisi

tersebut menyangkut jumlah pegawai yang dimiliki untuk kemudian dipetakan berdasarkan jenis kelamin, tingkat pendidikan, golongan, jenjang kepangkatan, dan bidang keahlian.

Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah memberikan peluang yang besar kepada daerah dalam mengatur, membina dan menggunakan daya aparatur daerah semaksimal mungkin. Pemerintah daerah diberikan kewenangan dalam penetapan formasi, pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, dan penetapan pensiun, gaji, tunjangan serta kesejahteraan pegawai serta pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah.

Sumber Daya Manusia Aparatur Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek memiliki jumlah sebanyak 62 orang pegawai (PNS), yang pembagian kerja terbagi dalam tabel berikut :

**Tabel 2.**
**Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Bidang Kerjanya Tahun 2011**

| No. | Unit Kerjanya | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | Kepala Dinas | 1 |
| 2. | Sekretaris | 1 |
| 3. | Kepala Bidang UKM | 1 |
| 4. | Kepala Bidang Industri dan Perdagangan | 1 |
| 5. | Kepala Bidang Pertambangan dan Energi | 1 |
| 6. | Kepala Bidang Koperasi | 1 |
| 7. | Kasubbag Umum dan Kepegawaian | 1 |
| 8. | Kasubbag Perencanaan dan Pelaporan | 1 |
| 9. | Kasubbag Keuangan | 1 |
| 10. | Kasi Pendaftaran dan Hukum | 1 |
| 11. | Kasi Pengembangan Produk dan Pemasaran | 1 |
| 12. | Kasi Permodalan Usaha Kecil dan Menengah | 1 |
| 13. | Kasi Bina Usaha Perdagangan | 1 |
| 14. | Kasi Bina Usaha Perindustrian | 1 |
| 15. | Kasi Pertambangan Umum | 1 |
| 16. | Kasi Energi dan Migas | 1 |
| 17. | Kasi Pengendalian dan Reklamasi | 1 |
| 18. | Kasi Bina Usaha Koperasi | 1 |
| 19. | Kasi Fasilitas dan Simpan Pinjam | 1 |
| 20. | Staf | 43 |
| Jumlah | | 62 |

*Sumber : Bag. TU, Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek, 2011.*

Sedangkan berdasarkan golongan, jenis kelamin dan tingkat pendidikan pegawai Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek terbagi dalam tabel 3, 4, dan 5 berikut :

**Tabel 3.**
**Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Golongan Tahun 2011**

| No. | Golongan | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | I a | 1 |
| 2. | I b | 1 |
| 3. | I c | 2 |
| 4. | I d | 1 |
| 5. | II a | 5 |
| 6. | II b | 1 |
| 7. | II c | 1 |
| 8. | III a | 18 |
| 9. | III b | 9 |
| 10. | III c | 6 |
| 11. | III d | 11 |
| 12. | IV a | 1 |
| 13. | IV b | 4 |
| 14. | IV c | 1 |
| Jumlah | | 62 |

*Sumber : Bag. TU, Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek, 2011.*

**Tabel 4.**
**Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2011**

| No. | Jenis Kelamin | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | Laki-laki | 43 |
| 2. | Perempuan | 19 |
| Jumlah | | 62 |

*Sumber : Bag. TU, Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek, 2011.*

**Tabel 5.**
**Jumlah Pegawai Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2010**

| No. | Tingkat Pendidikan | Jumlah (Orang) |
|---|---|---|
| 1. | Pasca | 8 |
| 2. | Sarjana | 35 |
| 3. | Ahli Madya | 1 |
| 4. | SMTA | 18 |
| Jumlah | | 62 |

*Sumber : Bag. TU, Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek, 2011.*

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari tabel 3 dan 4 kita dapat menyimpulkan mengenai masa kerja, kematangan, dan usia pegawai Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek. Laki-laki mendominasi dan golongan paling banyak adalah IIIa. Sementara dalam tabel 5 menyimpulkan bahwa latar pendidikan didominasi oleh pegawai dengan latar pendidikan sarjana. Latar pendidikan yang mayoritas sarjana menunjukkan tingkat Sumber Daya Aparatur Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek yang cukup baik.

**3. Profil UKM Keripik Tempe Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek**

Keripik Tempe merupakan salah satu produk makanan khas Trenggalek yang berbahan dasar tempe kedelai yang dinilai mampu menjadi salah satu sektor peningkatan ekonomi warga. Sentra UKM keripik tempe Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek letaknya disepanjang Jalan Yosudarso. Sejak dulu, daerah ini dikenal sebagai sentra industri kripik tempe, yang dinilai mampu memberi kontribusi bagi perekonomian warga sekitar. Kegiatan ekonomi warga yang telah berlangsung lama ini mampu mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari para pengusaha keripik tempe. Meski hanya bersifat industri kecil, keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek mampu meningkatkan sektor perekonomian masyarakat sekitar.

**a. Sejarah Perkembangan UKM Kripik Tempe Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek**

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka diperoleh data bahwa pada awal adanya industri pada tahun 1990 industri keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek hanya berdiri dua tempat usaha keripik tempe yang sangat sederhana. Pada masa itu masih sepi dari minat konsumen untuk mengonsumsi keripik tempe. Setelah empat atau lima tahun berjalan minat konsumen pun mulai meningkat dan dari peningkatan konsumen itu mendatangkan minat dan upaya untuk mendirikan usaha bagi masyarakat Kelurahan Ngantru itu sendiri. Mulai dari penyedia bahan mentah yang berupa tempe sampai memulai memproduksi keripik tempe untuk dijual di kios milik sendiri yang bertempat di depan rumah sampai didistribusikan ke daerah lain. Bertambahnya industri yang berdiri di Kelurahan Ngantru ini ternyata mendatangkan daya tarik konsumen untuk mengonsumsi keripik tempe dan saat itulah mulai berkembangnya industri keripik tempe di Kelurahan Ngantru dan semakin banyaknya industri kecil keripik tempe yang berdiri di Kelurahan Ngantru.

Melihat perkembangan dan semakin banyaknya industri yang berdiri, pemerintah Trenggalek melalui Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi pada tahun 2000 memulai memberikan dukungan atas jerih payah dan kreatifitas masyarakat

Kelurahan Ngantru. Mulai dari mengadakan seminar tentang pengolahan tempe yang baik, proses pembuatan keripik tempe yang efektif dan efisien maupun dukungan tata cara *packing* atau pengemasan yang aman dan menarik untuk konsumen sampai pengenalan makanan jajanan yang bisa diproduksi untuk tambahan produk yang akan dijual di kios masing masing sehingga menjadikan kios oleh-oleh khas Kota Trenggalek walaupun sebenarnya mengadopsi dari daerah lain. Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam memberikan dukungan kepada industri ini juga melibatkan Dinas Kesehatan untuk melegalkan suatu produk makanan yang diproduksi sendiri oleh pengusaha. Seiring perkembangan jaman, pada tahun yang sama Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi juga mengangkat Kelurahan Ngantru sebagai Sentra Industri Kripik Tempe untuk menyesuaikan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2008. Dan mulai tahun 2000 tersebut UKM keripik tempe di kelurahan Ngantru semakin berkembang hingga saat ini dengan pengembangan produk maupun inovasi-inovasi pemasaran.

Fakta tersebut seperti yang disampaikan oleh Mbak Menur, pengusaha UKM keripik tempe cap ”KIKO PUTRA” sebagai berikut:

> ”Usaha membuat kripik tempe ini bermula hanya dua orang saja yang jualan. Tetapi setelah berjalan sekitar lima tahun masyarakat sekitar juga ikut-ikutan membuat tempe maupun kripik tempe dan alhamdulillah semakin ramai juga pembelinya dari dalam kota maupun luar kota untuk oleh-oleh keluarga. Pada tahun 2000 pemerintah melalui dinas yang terkait memberikan dukungan usaha kripik tempe kami dan sering memberikan penyulihan dan seminar terkait kripik tempe mulai cara produksi yang bersih, pengemasan yang baik dan bersih dan pengembangan-pengembangan pemasaran maupun produknya.” *(Wawancara tanggal 27 Oktober 2011, pukul 10.00 di rumah Mbak Menur, Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek)*

**b. Proses Produksi Kripik Tempe**

Keripik tempe adalah makanan tradisional yang terbuat dari tempe yang diiris tipis kemudian digoreng dengan menggunakan tepung yang telah dibumbui. Biasanya rasanya adalah asin dengan aroma bawang yang gurih. Keripik tempe ini terbuat dari bahan baku tempe yang merupakan makanan yang dibuat dari fermentasi terhadap biji kedelai atau beberapa bahan lain yang menggunakan beberapa jenis kapang yang secara umum dikenal sebagai ragi tempe.

Menurut mbak Menur, salah satu pengusaha UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru, tahapan pembuatan keripik tempe adalah pembuatan tempe sebagai bahan baku terlebih dahulu. Proses pembuatan tempe ini adalah perebusan tahap pertama, penggilingan, pencucian, perendaman, perebusan tahap kedua, peragian, pembungkusan atau proses fermentasi, dan terakhir proses

penggorengan. Tahapan proses pembuatan keripik tempe dapat diuaraikan sebagai berikut:

1) Perebusan tahap pertama

Tahap perebusan tahap pertama ini berfungsi sebagai proses hidrasi dan memerlukan waktu dua jam, yaitu agar biji kedelai menyerap air sebanyak mungkin. Perebusan juga dimaksudkan untuk melunakkan biji kedelai supaya nantinya dapat menyerap asam pada tahap perendaman. Proses perebusan ini berfungsi untuk memudahkan pengelupasan kulit kedelai dan pengelupasan kulit berfungsi agar pada saat proses fermentasi dapat menembus biji kedelai.

2) Penggilingan

Proses penggilingan ini bertujuan untuk memecah biji kedelai menjadi dua bagian. Pemecahan biji kedelai ini bertujuan untuk menghasilkan tempe yang tipis untuk dijadikan kripik tempe yang bagus.

3) Pencucian

Pencucian ini menggunakan air bersih dan dilakukan sampai bersih. Proses ini berfungsi untuk membersihkan kulit kedelai dan biji kedelai dari kotoran setelah melalui proses pengelupasan dan pemecahan biji kedelai.

4) Perendaman

Perendaman dilakukan dengan air bersih selama satu malam. Pada proses perendaman ini dimaksudkan untuk menghilangkan getah kedelai yang tersimpan didalam biji kedelai. Setelah proses perendaman, kemudian biji biji kedelai dicuci sampai bersih dan kemudian ditiriskan.

5) Perebusan tahap kedua

Proses perebusan tahap kedua bertujuan untuk pematangan biji kedelai dan memerlukan waktu dua jam. Dan kemudian ditiriskan sampai dingin.

6) Peragian

Proses peragian dilakukan dengan penambahan ragi, yaitu ragi tempe atau laru, spora kapang tempe dalam medium tepung beras lalu dicampur merata sebelum pembungkusan atau proses fermentasi.

7) Pembungkusan atau proses fermentasi

Pada proses ini biji-biji kedelai ditata secara rapi dan dibungkus daun pisang untuk fermentasi. Dan dimungkinkan masuknya udara karena spora kapang tempe membutuhkan oksigen untuk tumbuh. Pada proses fermentasi membutuhkan waktu selama 3 hari untuk tumbuhnya spora dalam tempe.

8) Penggorengan

Proses penggorengan setelah tempe jadi dan dilumuri dengan bumbu-bumbu yang dicampur dengan irisan daun jeruk untuk menambah rasa gurih kripik tempe dan proses penggorengan dilakukan selama +/- 15 menit untuk kapasitas 25 biji dalam satu wadah penggorengan untuk menghasilkan warna kripik tempe yang bagus dan tingkat kerenyahan yang baik.

Proses produksi kripik tempe seperti diatas diterangkan pula secara singkat oleh Mbak Menur, pengusaha kripik tempe cap " KIKO PUTRA " sebagai berikut:

> "Proses awal membuat keripik tempe yaitu membuat tempenya dahulu, kemudian tempe yang sudah jadi baru digoreng dicampur dengan bumbu yang dicampur dengan irisan daun jeruk untuk menambah rasa. Proses pembuatan tempe ini pertama melalui proses perebusan yang pertama, untuk memudahkan proses pengelupasan kulit kedelai, kemudian penggilingan untuk memecahkan biji kedelai, lalu pencucian, kemudian proses perendaman untuk mengeluarkan getah kedelai yang masih tersimpan didalam biji kedelai, laluu direndaman, kemudian perebuasan kedua yang bertujuan untuk pematangan kedelai, kemudian peragian, kemudian difermentasikan dalam bungkus, kalau masyarakat disini menggunakan daun pisang untuk wadahnya dan untuk fermentasinya, kemudian baru digoreng selama skitar 15 menit untuk hasil warna yang bagus dan renyahnya pas, setelah tempe jadi, proses fermentasi membutuhkan waktu skitar 3 hari baru tempe benar-benar matang. Setelah proses penggorengan ditiriskan dan dibiarkan sampai benar benar tiris dan dingin. Setelah itu kemudian disimpan didalam toples besar." (*Wawancara tanggal 27 Oktober 2011, pukul 10.00 di rumah Mbak Menur, Kelurahan Ngantru*)

Rata-rata proses produksi keripik tempe sudah memakai cara atau alat yang moderen, alat-alat tersebut diperoleh dari

bantuan Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi, seperti bantuan alat penggiling yang digunakan untuk pemecah biji kedelai.

**c. Kapasitas Produksi dan Nilai Produksi**

Nilai produksi keripik tempe di Kabupaten Trenggalek termasuk besar. Angkanya mencapai 26 Milyar Rupiah pada tahun 2011. Nilai produksi tersebut berasal dari Industri Keripik Tempe yang ada di Kelurahan Tamanan, Kelurahan Ngantru, dan Kelurahan Sumbergedong Kabupaten Trenggalek. Kelurahan Tamanan mempunyai 56 unit usaha dalam satu kelurahan, Kelurahan Ngantru dengan jumlah 25 unit usaha keripik tempe dan Kelurahan Sumbergedong dengan jumlah 10 unit usaha keripik tempe.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Berikut akan disajikan data mengenai jumlah UKM keripik tempe di Kabupaten Trenggalek, nilai produksi UKM keripik tempe di Kabupaten Trenggalek, disertai dengan kapasitas produksi dan jangkauan pemasaran pada tahun 2011.

**Tabel 6.**
**Jumlah UKM, Kapasitas dan Nilai Produksi Keripik Tempe di Kabupaten Trenggalek Tahun 2011**

| No | Jenis Produksi | Alamat (Kelurahan) | Jumlah UKM (Unit) | Kapasitas Produksi (Ton) | Nilai Produksi ( Rp. 000 ) | Jangkauan Pemasaran (%) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Lokal | Regional | Nasional |
| 1. | Kripik Tempe | Tamanan | 56 | 364 | 12.740.000 | 45 | 50 | 5 |
| 2. | Kripik Tempe | Ngantru | 25 | 203 | 12.180.000 | 40 | 50 | 10 |
| 3. | Kripik Tempe | Sumbergedong | 10 | 55 | 1.925.000 | 40 | 55 | 5 |
| | | | 91 | 622 | 26.845.000 | | | |

*Sumber: Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek 2011.*

Jika dilihat dari data pada tabel diatas, maka nilai produksi kripik tempe pada tahun 2011 mencapai angka 26 Milyar. Angka tersebut merupakan akibat dari jangkauan pemasaran yang cukup luas. Kelurahan Tamanan menyumbang kapasitas maupun nilai produksi yang paling besar, yakni sebesar 12.7 Milyar karena jumlah UKM yang paling banyak yang dikarenakan sektor jangkauannya paling luas yang meliputi lokal, regional, dan nasional dan pemasarannya menguasai pasar tradisional yang ada diseluruh Kecamatan Trenggalek

dan sebagian pasar tradisional diluar Kecamatan Trenggalek dan menjual hasil produksi kripik tempe dengan harga tengkulak, dan mempunyai 56 unit usaha dalam satu kelurahan. Sementara itu Kelurahan Ngantru dengan jumlah 25 unit usaha keripik tempe dengan nilai produksi 12,1 Milyar . Dan Kelurahan Sumbergedong dengan nilai produksinya 1,9 Milyar dengan 10 unit usaha keripik tempe.

Agar bisa bersaing, pengusaha keripik tempe dituntut untuk meningkatkan kualitas produknya. Peningkatan kualitas ini berkaitan dengan inovasi produk keripik tempe yang sekarang ini menawarkan keripik tempe dengan aneka rasa. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari ibu Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan upaya Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam pengembangan produk keripik tempe.

> "Kami juga berupaya untuk memotivasi, memberi bantuan berupa 200 contoh kardus pengemasan beserta master untuk percetakannya dan memberi wawasan tentang pengembangan dari produk kripik tempe kepada para pengusaha keripik tempe agar melakukan inovasi pada produknya maupun tentang pengemasan yang lebih bersih dan bagus. Hasilnya sekarang telah memakai kardus karton bermacam macam kapasitas isi dan sekarang telah hadir keripik tempe dengan aneka rasa, seperti rasa bawang dan daun jeruk. dulunya kami telah memberikan pelatihan memberikan lebih beraneka macam rasa tapi para pengusaha rupanya kurang berminat dan tidak tlaten untuk mnerapkan metode tersebut."(*Wawancara tanggal 14 November 2011, pukul 13.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*)

Pernyataan tersebut dipertegas dengan pernyataan dari Mbak Menur, pengusaha kripik tempe cap "KIKO PUTRA" sebagai berikut:

> "Agar mampu bersaing di pasaran yang semakin banyak pesaingnya, kami berinovasi pada pengemasan yang dulunya memakai besek bambu sekarang dengan bantuan dari Diskoperindagtamben menjadi memakai kardus katon kapasitas 10, 25, 50, dan 100 buah keripik tempe dan kita juga melakukan inovasi rasa. Sekarang ini saya juga memproduksi keripik tempe dengan rasa daun jeruk dan rasa bawang ."(*Wawancara tanggal 16 November 2011, pukul 09.00 di rumah Mbak Menur, Kelurahan Ngantru*)

Sebelumnya produk keripik tempe ini hanya hadir dengan kripik tempe rasa gurih, namun kini dengan hadirnya beraneka rasa diharapkan akan mampu meningkatkan permintaan pada produk keripik tempe ini.

**I. Penyajian Data Fokus**

**3. Peran Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam pemberdayaan UKM tempe kripik di Kelurahan Ngantru, meliputi:**

**d. Identifikasi potensi dan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi**

Program pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang mengutamakan pemberdayaan ekonomi rakyat untuk mendorong dan menumbuh kembangkan kekuatan ekonomi lokal serta mengarah pada kemitraan yang berbasis pada kekuatan rakyat. Oleh karena itu, usaha kecil dan menengah merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dan pembangunan ekonomi. Gerak

sektor UKM amat vital untuk menciptakan pertumbuhan dan lapangan pekerjaan. UKM cukup fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, dan mereka juga cukup memberikan kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan. Dalam mencapai tujuan pemberdayaan UKM ada beberapa tahap yang perlu dilakukan:

1) Belajar Dari Masyarakat

   Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti, dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah-masalahnya sendiri.

2) Pendamping sebagai Fasilitator, Masyarakat sebagai Pelaku

   Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta ketersediaan untuk belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Bahkan dalam penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar

secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan-kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

3) Saling Belajar, Saling Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip dasar pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan-perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah-masalah yang berkembang. Namun sebaliknya, telah terbukti pula bahwa pengetahuan modern dan inovasi dari luar yang diperkenalkan oleh orang luar tidak juga dapat memecahkan masalah mereka. Bahkan dalam banyak hal, pengetahuan modern dan inovasi dari luar malah menciptakan masalah yang lebih besar lagi. Karenanya pengetahuan local masyarakat dan pengetahuan dari luar atau inovasi, harus dipilih secara arif dan atau saling melengkapi satu sama lainnya.

Secara konseptual pemberdayaan UKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut serta dan berperan

dalam pengembangannya. Dalam hal ini lebih banyak menitikberatkan pada metode "*bottom up*", dimana perencanaan lebih diupayakan menjawab kebutuhan UKM dan dilakukan secara partisipatif. Dalam praktek pemberdayaan UKM, untuk menggugah partisipasi masyarakat sasaran langkahlangkah yang dilakukan yaitu identifikasi potensi.

Identifikasi potensi, dimaksudkan untuk mengetahui karakteristik Sumberdaya Manusia (SDM) UKM dan lingkungan internalnya baik lingkungan sosial, ekonomi dan Sumberdaya Alam (SDA) khususnya yang terkait dengan usahanya, maupun lingkungan eksternal UKM. Dengan langkah ini diharapkan setiap gerak kemajuan dapat bertumpu dan memanfaatkan kemampuan dan potensi wilayah masing-masing. Dalam identifikasi ini melibatkan *stakeholder* UKM dan tokoh masyarakat maupun instansi terkait

Berdasarkan hasil survey diketahui bahwa secara formal tingkat pendidikan para pegusaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru yang terbanyak adalah SD dan SLTP, bahkan beberapa pengusaha tidak sekolah. Dari jumlah pengusaha keripik tempe sebanyak 25 orang yang berpendidikan SD sebanyak 26 responden atau sebanyak 52% dan yang berpendidikan SLTP sebanyak 10 responden atau 20%.

Dengan rata-rata tingkat pendidikan relatif masih rendah tersebut, tentunya kemampuan dalam penguasaan dan penerapan teknologi juga relatif terbatas, yang pada akhirnya akan berpengaruh

terhadap kualitas dan kuantitas hasil produksi. Untuk menunjang kemampuan dan ketrampilan para pengusaha kripik tempe tersebut tersebut dalam penguasaan dan penerapan teknologi produksi perlu ditunjang dengan pelatihan-pelatihan yang terkait dengan keripik tempe.

SDM merupakan faktor yang sangat penting untuk meningkatkan kemajuan industri kecil. Selama ini SDM yang ada pada kebanyakan industri kecil merupakan SDM yang rendah dilihat dari tingkat pendidikan, kemampuan dalam pengolahan industri itu sendiri, baik dalam hal manajemen produksi, manajemen keuangan, maupun dalam hal manajemen pemasarannya. Hal inilah yang menyebabkan industri kecil sulit untuk berkembang dengan baik dan selalu terjebak pada permasalahan yang selalu sama.

Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trrenggalek melakukan pembinaan SDM ini dengan menitikberatkan pada beberapa hal, antara lain:

1) Pendidikan dan pelatihan (Diklat) yang bertujuan untuk memperoleh tenaga terdidik dan terampil terutama yang bersifat *technical skill* dengan upaya ini dapat memperoleh industri yang berkualitas tinggi dan sesuai dengan permintaan pasar.
2) Memberikan bimbingan dan penyuluhan, meliputi masalah teknologi produksi yang terdiri dari desain produksi,

penawaran *diversifikasi* produk, dan mutu produksi. Bimbingan dan penyuluhan ini bertujuan agar para pengusaha kecil dan pengrajin mampu mengatur manajemen perusahaannya atau tenaga yang bersifat *managerial skill*, karena pengetahuan manajemen dari pengusaha industri kecil keripik tempe ini sangatlah kurang.

Dengan adanya pembinaan SDM diharapkan kemampuan organisasi manajemen pengusaha industri kecil meningkat. Selain itu diperlukan juga peningkatan kewirausahaan, profesionalisme dan keterampilan teknis, yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, daya saing, produktivitas dan efektivitas, sehingga mampu mengatasi berbagai perubahan lingkungan yang dinamis. Pembinaan yang dapat ditempuh melalui kegiatan selain dari pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan adalah berupa kegiatan pemagangan, studi banding dan konsultasi.

Selain dari pembinaan sistem manajemen adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha bagi pengusaha industri kecil, serta dikembangkannya sistem manajemen yang sesuai dengan tingkat dan jenis usaha yang dikelola.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Dari hasil wawancara dengan ibu Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

> "Untuk meningkatkan SDM pada UKM keripik tempe di Kabuparen Trenggalek dan di Kelurahan Ngantru ini pada khususnya salah satu yang ditempuh oleh Diskoperindagtamben dengan memberikan pendidikan dan pelatihan (Diklat). Biasanya Diklat yang sering kami lakukan adalah Diklat manajemen karena permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku industri kecil adalah kelemahan dalam mengelola industri kecil, baik pada waktu proses produksi maupun pada saat memasarkan hasil industri kecil. Materi yang telah diberikan adalah pelatihan manajemen dengan memberikan motivasi serta teknik dalam memasarkan hasil produksi" (*Wawancara tanggal 14 November 2011, pukul 14.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*).

Hal ini juga diperkuat dari pernyataan Ibu Tutik, salah seorang pengusaha keripik tempe yang ada di Kelurahan Ngantru:

> "Saya pernah mengikuti semacam Diklat yang diberikan oleh Diskoperindagtamben, dimana materi yang diberikan adalah semacam perbaikan proses produksi dan pengembangan-pengembangan di bidang industri dengan diberi semacam pelatihan oleh Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek" *(Wawancara tanggal 16 November 2011, pukul 12.00 WIB di rumah ibu Tutik, Kelurahan Ngantru).*

Pembinaan dalam peningkatan sarana dan prasarana usaha industri ditujukan agar pengusaha industri kecil memiliki sarana usaha yang lebih baik dan lingkungan usaha yang baik pula sehingga produktivitas dan mutu produksinya meningkat. Dalam usaha industri ini, kebijakan yang diambil oleh Dinas Koperasi Industri

Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sudah membuat program pengembangan teknologi produksi dimana salah satu kegiatan kongkritnya adalah dengan memberikan seminar dan pelatihan inovasi produk. Diberikannya seminar dan pelatihan karena adanya kebutuhan pengrajin industri kecil yang mendesak, serta industri kecil tersebut memiliki potensi yang cukup bagus untuk dikembangkannya. Tetapi pada pelaksanaannya, ternyata tidak semua inovasi produk dilakukan oleh para pengusaha keripik tempe, salah satunya adalah gagalnya inovasi pemberian berbagai macam rasa pada keripik tempe yang dikarenakan jenis tempe dari segi tingkat ketebalan yang tidak bisa dikembangkan lebih jauh lagi.

Tujuan diberikan pelatihan dan seminar tersebut adalah semacam sosialisasi guna pengembangan sumber daya manusia yang dapat dikembangkan dalam industrinya masing-masing. Khususnya untuk industri keripik tempe, pada tahun 2000, Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek telah memberikan bantuan peralatan berupa alat pemecah kedelai dan alat perekat plastik pembungkus kripik tempe kepada beberapa pengusaha industri keripik tempe. Dikarenakan pengusaha industri kecil ini dipandang mempunyai prospek yang bagus untuk ke depannya dan akan menjadi salah satu makanan khas Kabupaten Trenggalek. Hal ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan ibu

Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek yaitu sebagai berikut:

> "Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek telah memberikan bantuan berupa alat pemecah kedelai dan alat perekat kemasan, karena pengusaha mempunyai prospek bagus untuk lebih mengembangkan industrinya walaupun dalam hal ini tidak mengesampingkan perhatian kami untuk industi–industri yang lainnya yang ada di Kabupaten Trenggalek" *(Wawancara tanggal 14 November 2011, pukul 14.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek).*

Dalam pelaksanaan program pembinaan sumber daya manusia, Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sangat mengharapkan pengusaha keripik tempe di Sentra Industri Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru untuk dapat lebih meningkatkan mutu produksi, serta sebagai sosialisasi penggunaan teknologi tepat guna agar dimanfaatkan secara optimal oleh pengusaha kecil khususnya pengusaha keripik tempe di Sentra Industri Kecil Keripik Tempe yang ada di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek.

Berkaitan dengan identifikasi potensi lingkungan internal pengusaha keripik tempe, yang pada umumnya melakukan usaha turun temurun dan dengan manajemen tradisonal, maka perlunya pembinaan terhadap majamenen pengelolaan industri. Manajemen usaha atau cara pengelolaan suatu usaha industri kecil yang selalu dianggap penting adalah bertalian dengan pola atau sistem manajemen, proses dan fungsi manajemen, aspek pengorganisasian,

aspek administrasi secara menyeluruh, dan aspek sumber daya manusia (tenaga kerja). Pada umumnya cara pengelolaan usaha industri kecil keripik tempe ini dilakukan langsung oleh keluarga pemilik usahanya, dengan modal sendiri yang sebagian berasal dari kalangan keluarga pemilik usaha, dimana faktor inilah yang menyebabkan tidak dimilikinya format manajemen dan administrasi yang baku. Manajemen usaha yang sederhana dan kerap bercampur baur dengan manajemen rumah tangga.

Pola manajemen usaha atau cara pengelolaan usaha industri keripik tempe yang diterapkan oleh pemilik atau pengolahan usaha industri keripik tempe adalah relatif sederhana dan tradisional, sesuai dengan sifat dan skala usaha yang relatif kecil. Usaha industri keripik tempe hampir secara keseluruhan dikelola oleh pemilik sendiri tanpa campur tangan pemerintah. Sedangkan pengorganisasian usaha yang belum begitu rumit, sehingga banyak fungsi atau tugas-tugas yang dirangkap oleh satu orang dalam satu jabatan, misalnya seperti fungsi administrasi, keuangan, personalia.

Namun di dalam penyelenggaraan usaha di bidang produksi, nampak adanya perpaduan tradisional dan moderen. Pada manajemen produksi, masing-masing pengusaha industri keripik tempe sudah memiliki kualitas dan keahlian pekerjaan yang harus dikerjakan oleh para pekerja di dalam industri. Kualitas, keahlian, dan produktivitas yang dimiliki pekerja tersebut berbeda-beda, sehingga dalam hal ini

pemilik usaha sudah mengenal dan menerapkan secara langsung pada sistem pemberian upah. Manajemen usaha masih menggunakan sistem kekeluargaan atau kekerabatan, sehingga pemilik usaha merekrut tenaga kerja berasal dari keluarga sendiri, namun di samping itu ada juga sebagian merekrut tenaga kerja dari luar keluarganya.

Selanjutnya pemilik usaha dalam fungsi administrasi belum bisa membedakan secara jelas antara kepentingan industrinya dengan kepentingan keluarga. Hal ini dapat diamati dari pemilik industri yang tidak dapat membedakan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi. Dan kebanyakan pengusaha tidak mempunyai pembukuan atau laporan keuangan.

Hal ini dibenarkan oleh Bu Tutik , salah satu pengusaha industri keripik tempe di Kelurahan Ngantru, sebagai berikut:

> "Kalau masalah keuangan saya ini nggak pernah pakai pembukuan maupun laporan keuangan, yang penting bisa buat bayar gaji pegawai dan memenuhi kebutuhan keluarga sudah cukup. Di samping itu kalau pakai pembukuan repot, antara uang usaha dan uang buat kepentingan keluarga sama karena saya dan semua pengusaha keripik tempe disini itu pendidikanya hanya lulusan SD dan SMP mas." *(Wawancara tanggal 16 November 2011, pukul 12.00 di rumah Mbak Tutik, Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek).*

Dengan diadakannya kegiatan pembinaan manajerial ini, para pengusaha industri mendapatkan ilmu pengetahuan di bidang manajemen anatara lain: mereka mengetahui bagaimana melakukan proses produksi dari awal samapai akhir, mengetahui bagaimana cara menghemat biaya operasional untuk pembuatan gerabah, mengetahui

bagaimana cara menghemat bahan baku, dan mengetahui bagaimana cara memperlakukan karyawan.

Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek berharap, agar kegiatan-kegiatan pemberdayaan UKM ini bisa berjalan dengan optimal sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh para pengusaha keripik tempe.

**e. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UKM**

Keberadaan pengusaha UKM di Kabupaten Trenggalek dan di Kelurahan Ngantru pada khususnya dari sisi pendidikan dan kemampuan masih belum menggembirakan. Ditinjau dari sisi pendidikan, pada umumnya sebagian besar mereka (69%) berpendidikan SMP ke bawah. Masih sangat sedikit diantara pengusaha UKM yang berpendidikan Sarjana. Fakta menunjukkan masih rendahnya kualitas sumber daya UKM khususnya dalam bidang manajemen, organisasi, penguasaan teknologi, dan pemasaran. Disamping itu adalah rendahnya tingkat kompetensi kewirausahaan UKM. Rendahnya tingkat pendidikan para pengusaha kecil dan menengah tersebut ternyata tidak diimbangi dengan upaya-upaya peningkatan kemampuan *(Capacity Building)* baik melalui pelatihan, pendidikan, maupun studi banding secara terprogram. Pada umumnya pengusaha kecil keripik tempe di Kelurahan Ngantru lebih fokus pada pengalaman dalam menjalankan usaha. Upaya-upaya untuk meningkatkan kemampuan masih belum merupakan prioritas.

Lemahnya tingkat pendidikan dan kemampuan dari para pengusaha kecil dan menengah memberi berbagai dampak, diantaranya : (1) Rendahnya inovasi, (2) Lemahnya manajemen usaha, (3) Rendahnya produktivitas, (3) Rendahnya kualitas produk dan (4) Lemahnya kemampuan mengakses modal usaha.

1. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia

   Sumber daya manusia merupakan modal yang sangat penting dalam melakukan pembangunan. Keterkaitan masalah ini dengan pemberdayaan masyarakat sangat besar. Dampak pemberdayaan masyarakat adalah kemandirian masyarakat dalam mengatasi permasalahan mereka melalui prakarsa dan kreatifitas untuk meningkatkan kualitas hidup. Tentunya membutuhkan masyarakat yang mempunyai pengetahuan, ketrampilan dan sikap untuk keluar dari permasalahan mereka. Banyak ekonom yang memandang penting investasi sumber daya manusia.

2. Membangun kelembagaan masyarakat

   Pembahasan mengenai kelembagaan masyarakat sangat berkaitan dengan proses pemberdayaan di tingkat masyarakat. Pemberdayaan bukan hanya sekedar pendekatan metodologis dalam rangka memandirikan masyarakat sasaran, akan tetapi harus juga diwujudkan dalam bentuk yang lebih konkret sebagai bentuk dari pencapaian sebuah program. Syarat mutlak program

pemberdayaan adalah orientasinya yang selalu tertuju kepada kemandirian, kesinambungan, dan keberlanjutan.

Upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kemampuan pengusaha UKM dan pengelola koperasi meliputi : (1) Pembentukan badan pembina dan pelatih UKM yang terdiri dari unsur lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasiasosiasi, dan perusahaan-perusahaan besar, (2) Pemberian sertifikasi kompetensi kepada UKM dalam pengelolaan usaha atau koperasi, (3) Penyelengaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha, (4) Pemasyarakatan kewirausahaan, termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan, (5) Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelolanya, dan (6) Pemberian insentif dan kemudahan fasilitas bagi UKM yang berprestasi

Peningkatan kewirausahaan dan kemampuan UKM ini bertujuan untuk memberikan wawasan dan kemampuan dalam berwirausaha bagi para pengusaha UKM yang tergolong rendah dalam segi sumber daya manusia. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis menyebutkan bahwa beberapa pengusaha keripik tempe di Sentra Industri Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek pernah menerima atau mengikuti acara seminar dan pelatihan dalam rangka mengembangkan usaha kripik tempe yang diadakan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi. Tujuan

yang paling utama dalam diadakannya seinar dan pelatihan tersebut adalah untuk peningkatan keahlian SDM dan agar para pengusaha tempe kripik dapat bersaing di dalam pasar domestik, dapat mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

> "Pembinaan SDM dilakukan dengan mengadakan seminar dan pelatihan tersebut antara lain untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan dari para pengusaha. Hal ini dimaksudkan agar para pengusaha kripik tempe bisa bersaing dipasar domestik, bisa mandiri dan tidak tergantung pada pemerintah. "(*Wawancara tanggal 14 November 2011, pukul 14.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek)*

Berkaitan dengan peningkatan kewirausahaan dan kemampuan UKM, Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi melalui Bidang Indag telah melakukan beberapa pendampingan pelatihan proses produksi yang inovatif. Diantaranya melalui seminar pelatihan tentang produk yang bervariasi dengan penambahan berbagai macam rasa diantaranya rasa daun jeruk, barbeque, dan keju yang sebelumnya hanya menggunakan rasa bawang. Di dalam penerapanya telah pihak pengusaha telah mencoba penambahan berbagai macam rasa tersebut tetapi pada kenyataannya jenis keripik tempe yang ada di UKM Kelurahan Ngantru ini tidak dapat diterapkan karena jenis keripik tempe yang berukuran tipis, karena dalam proses pemberian rasa kripik tempe harus dimasukan

alat untuk pencampuran serbuk rasa ke permukaan keripik tempe dan hasilnya keripik tempe banyak yang hancur karena proses ini, kecuali untuk penambahan rasa daun jeruk karena penambahan daun jeruk dilakukan pada saat pencampuran adonan bumbu keripik tempe sebelum proses penggorengan. Kenyataan tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mbak Menur, pengusaha kripik tempe cap "KIKO PUTRA" sebagai berikut:

> "Sebenarnya dulu kita juga diberi wawasan dalam seminar dan pelatihan pengembangan produk dengan para pengusaha keripik tempe yang ada di sentra industri kripik tempe kelurahan Ngantru, dalam seminar itu kita para pengusa diberi wawasan untuk penambahan rasa berbagai macam rasa. Tetapi kenyataannya setelah dicoba tidak bisa diterapkan dikeripik tempe kita karena keripik tempe kita mempunyai khas yang tipis untuk tingkat ketebalannya dan hasilnya banyak yang hancur setelah dimasukkan didalam alat untuk pencampuran rasa tersebut. Yang bisa diterapkan hanya penambahan rasa daun jeruk saja karena proses penambahan rasa dilakukan pada saat pencampuran adonan bumbu sebelum tempe digoreng." (*Wawancara tanggal 16 November 2011, pukul 09.00 di rumah Mbak Menur, Kelurahan Ngantru*)

Pernyataan yang sama juga ditegaskan oleh Ibu Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek berkaitan dengan upaya Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi dalam pengembangan produk keripik tempe sebagai berikut:

> "Kami juga berupaya untuk memotivasi dan memberi wawasan dan juga pelatihan dalam seminar yang pernah kita adakan, dalam seminar dan pelatihan tersebut kami memberikan wawasan beserta teori untuk penambahan rasa berbagai macam rasa dan bantuan berupa 200 buah contoh kardus pengemasan yang baru beserta master percetakannya dan memberi wawasan tentang pengembangan dari produk kripik tempe kepada para pengusaha kripik tempe agar melakukan inovasi pada pengemasan yang lebih bersih dan bagus. Hasilnya sekarang telah memakai kardus karton bermacam macam kapasitas isi."(*Wawancara tanggal 14 November 2011, pukul 13.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*)

Kemudian dalam upaya pemberdayaan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi melalui Bidang Industri dan Perdagangan juga memberikan seminar dan bantuan dalam aspek pemasaran. Dalam seminar tersebut lebih ditekankan pada para pengusaha UKM keripik tempe untuk memakai dan menggunakan cara pengemasan yang lebih rapi yaitu dengan berbahan karton yang sebelumnya pengemasannya menggunakan besek yang terbuat dari anyaman bambu. Dan dalam implementasinya dinas juga memberikan contoh 200 kotak untuk kapasitas isi 10, 25, 50, dan 100 buah kripik tempe untuk perkemasan beserta master untuk percetakan

nama kios di kardus. Dan dalam perkembangannya inovasi pengemasan ini lebih bisa di terima dan bisa diterapkan oleh para pengusaha. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Mbak Menur, pengusaha kripik tempe cap "KIKO PUTRA" sebagai berikut:

> "Agar mampu bersaing di pasaran yang semakin banyak pesaingnya, kami berinovasi pada pengemasan yang dulunya memakai besek bambu sekarang dengan bantuan dari dinas Diskoperindagtamben menjadi memakai kardus katon kapasitas 10, 25, 50, dan 100 buah kripik tempe."(*Wawancara tanggal 16 November 2011, pukul 09.00 di rumah Mbak Menur, Kelurahan Ngantru*)

Program lain dalam pemberdayaan industri kecil keripik tempe yakni mengadakan kerjasama dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Trenggalek dengan pemberian P-IRT secara gratis bagi masyarakat sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru ini.

Kemudian Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek juga berperan sebagai fasilitator standarisasi produk industri, yaitu dengan memberikan bantuan pemeriksaan mutu produk dan pengajuan memperoleh sertifikat dan hak merk dan sertifikat halal bagi produk industri keripik tempe. Tujuannya yaitu agar para pengusaha keripik tempe memiliki produk yang memenuhi standar dan kepemilikan hak merk atas produk mereka. Hak atas merk dan sertifikat halal ini pada akhirnya akan mampu meningkatkan pemasaran keripik tempe dan berarti meningkatkan pendapatan para pengusaha kripik tempe di

Kabupaten Trenggalek. Bantuan ini dalam rangka meningkatkan kesadaran bagi para pengusaha kripik tempe di Kelurahan Ngantru dan di Kabupaten Trenggalek untuk melakukan proteksi terhadap produk keripik tempe mereka.

Kemudian berkaitan dengan kemudahan dalam hal perijinan, sekarang ini telah ada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) yang ada di Kabupaten Trenggalek. Hadirnya KPPT semakin memudahkan bagi pengusaha keripik tempe yang belum memiliki ijin untuk mengurus ijin usaha karena prosedurnya menjadi lebih praktis. Sedangkan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi hanya memberikan keputusan apakah surat ijin usaha layak diterbitkan atau tidak, seperti yang di ungkapkan oleh Ibu Nurun Nadjmi, Staff Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

> "Sekarang pengurusan izin untuk para pengusaha, termasuk pengusaha kripik tempe, sudah tidak lagi disulitkan. Pengurusan izin usaha dilakukan di Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) yang ada di Kabupaten Trenggalek. Kami juga memfasilitasi UKM kripik tempe agar pengurusannnya dimudahkan. Saat ini Disperindag hanya melakukan pembinaan secara teknis, dan kemudian nanti membuat keputusan apakah surat izin yang telah diurus tersebut layak diterbitkan atau tidak. Disamping itu kami juga memfasilitasi pemberian P-IRT secara gratis yang dikeluarkan Dinas Kesehatan sebagai kewenangannya dan juga penggurusan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh MUI Kabupaten Trenggalek. "(*Wawancara tanggal 21 November 2011, pukul 10.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*)

**f. Pengembangan pemasaran dalam upaya meningkatkan akses pasar**

Pemahaman terhadap permasalahan UKM menjadi acuan untuk menemukan aspek apa yang dibutuhkan dalam rangka menyusun rumusan strategi kebijakan untuk mendukung peningkatan akses pemasaran produk UKM melalui jaringan ritel besar maka diperlukan langkah strategis dan peranan dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya seperti pemerintah pusat, pemerintah daerah dan ritel besar itu sendiri. Berdasarkan hasil pengumpulan data dan interview dari stakeholder dan para pakar dengan menggunakan metode *Analisis Hierarchie Process* (AHP) diperoleh tiga langkah strategis yang utama, yaitu (1) membentuk jaringan UKM, (2) meningkatkan kualitas produk UKM dan (3) mengurangi *trading terms*.

Sedangkan aktor yang paling berperan dalam memasarkan produk UKM melalui jaringan ritel besar, adalah (1) Peranan Ritel modern 39,04%, selaku ritel besar, hal ini logis, karena baik keputusan apakah suatu UKM dapat memasok atau tidak di ritel besar merupakan keputusan internal yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak eksternal, baik dari pemerintah daerah maupun dari pemerintah pusat. (2) Peranan pemerintah Daerah 35,22% dimana sebagai pembina langsung dari UKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas produk maupun kontinuitas dari produk yang dihasilkan

selain itu juga dapat menjadi *force task* bagi ritel besar melalui kewenangannya di daerah.dan (3) Peranan Pemerintah Pusat 25,74% diharapkan dari penciptaan kebijakan yang mendukung peningkatan pemasaran UKM dan terdapat harmonisasi kebijakan antara instansi yang satu dengan yang lain.

Beberapa hambatan yang dihadapi oleh UKM pada saat melakukan pemasaran, berkisar pada (a) manajemen; (b) standarisasi produk & kemasan; dan (c) biaya pemasaran. Hambatan pertama adalah hambatan manajemen dimana hambatan berupa segala sesuatu yang harus dimiliki oleh UKM yang menentukan kelancaran dan keberhasilan aktivitas bisnis.

Permasalahan UKM pada bidang pemasaran terfokus pada tiga hal, yaitu (1) permasalahan persaingan pasar dan produk, (2) permasalahan akses terhadap informasi pasar dan (3) permasalahan kelembagaan pendukung UKM. Munculnya permasalahan-permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah kekurangmampuan pengusaha kecil untuk membaca dan mengakses peluang-peluang pasar yang potensial dan yang memiliki prospek cerah, yang akibatnya adalah pemasaran produk cenderung statis dan monoton, baik dilihat dari segi diversifikasi produk, kualitas, maupun pasar. Hal ini terjadi karena pengetahuan dan keterampilan pengusaha masih lemah ditambah lagi akses terhadap informasi pasar yang kurang serta kelembagaan pendukung yang belum berperan khususnya dalam hal membantu pemasaran. Lembaga pendukung tersebut misalnya asosiasi

atau instansi yang seharusnya mampu menjembatani dalam pemasaran produk UKM

Dalam rangka pengembangan pemasaran produk UKM dibutuhkan konsep pemberdayaan UKM pemasok dalam dua bentuk, yaitu bentuk peningkatan kualitas produk serta pemasaran produk. Peningkatan kualitas produk UKM yang disertai dengan perbaikan kualitas kemasan, peningkatan higienis dan sertifikasi produk. Untuk mendukung peningkatan produk dibutuhkan keterkaitan jaringan dan sistem produksi dan pengembangan teknologi dan inovasi produksi serta dukungan jaringan dan sistem keuangan.

Di bidang pemasaran, dirumuskan langkah pembinaan dan pengembangan, baik di dalam maupun di luar negeri. Langkah tersebut dicapai lewat pelaksanaan penelitian dan pengkajian pemasaran, menyediakan sarana serta dukungan promosi dan uji pasar bagi UKM. Selain itu juga dimaksudkan untuk mengembangkan lembaga pemasaran dan jaringan distribusi, serta memasarkan produk usaha kecil.

Pemasaran oleh banyak pengusaha kecil dan menengah dianggaap sebagai aspek yang paling penting. Pendapat yang sering muncul adalah bahwa “kemampuan menghasilkan produk tetapi tidak disertai kemampuan memasarkan produk tersebut adalah kehancuran.” Oleh karena itu permasalahan di bidang pemasaran pada UKM sering

ditempatkan sebagai masalah utama diantara masalah-masalah lainnya.

Sedangkan dalam hal pemasaran produk UKM adalah bentuk kemitraan dengan ritel modern dengan menfasilitasi, mendukung dan menstimulasi kegiatan kemitraan serta menata syarat perdagangan yang *win win solution.* Pada sisi ritel modern, pemberian insentif kepada ritel modern yang melakukan pembinaan kepada UKM misalnya berupa insentif pajak yang dilihat dari jumlah UKM yang dibina akan membangkitkan gairah di kalangan ritel modern untuk lebih sungguh-sungguh meningkatkan kerjasama dan melakukan pembinaan UKM.

Dalam rangka pembinaan dalam pengembangan pemasaran produk, maka perlu adanya kegiatan pemasaran. Pihak Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek di dalam melaksanakan kegiatan pemberdayaan UKM pada sentra industri keripik tempe ini melakukan kegiatan promosi dan pemasaran. Hal ini bertujuan agar produk industri Kabupaten Trenggalek semakin dikenal oleh masyarakat luas, baik di tingkat lokal maupun luar daerah.

Dalam hal pemasaran produk industri kecil keripik tempe di Kelurahan Ngantru dilakukan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek karena melihat bahwa industri keripik tempe merupakan salah satu produk unggulan

Kabupaten Trenggalek sehingga perlu adanya campur tangan pemerintah dalam hal memasarkan produk keripik tempe ini. Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dalam melakukan kegiatan pemasaran terhadap produk-produk industri kecil khususnya industri keripik tempe dengan memberikan bantuan dan kesempatan untuk mempromosikan dengan mengikutsertakan produk industri kecil ke dalam pameran baik pameran tingkat lokal Kabupaten Trenggalek, tingkat Provinsi Jawa Timur, maupun tingkat Nasional. Hal ini dinyatakan oleh Ibu Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek:

> "Jika ada pameran pembangunan ataupun basar yang diadakan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek, maka Diskoperindagtamben Kabupaten Trenggalek mengambil peran dengan memamerkan produk unggulan yang menjadi binaan instansi kami, dengan menyediakan stand-stand produk industri kecil dan kerajinan tangan dengan harga lebih murah dan bahkan penyediaan stand gratis tanpa dipungut biaya. Kami juga selalu memberikan fasilitas bagi para industri binaan kami untuk mengikuti pameran di tingkat Provinsi maupun di tingkat Nasional guna mempromosikan produk-produk unggulan dari industri yang ada di Trenggalek ini " *(Wawancara tanggal 22 November 2011, pukul 13.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek).*

Usaha yang dilakukan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek pada umumnya memberikan dampak positif terhadap jangkauan pemasaran yang dilalui oleh industri yang ada di Sentra Industri Keripik Tempe Kelurahan Ngantru. Pemasaran industri keripik tempe di Kelurahan

Ngantru tidak hanya memenuhi kebutuhan masyarakat Trenggalek saja tetapi mencakup kota dan Kabupaten lainnya.

Dari hasil pemberdayaan tersebut dari pihak UKM keripik tempe juga mengalami peningkatan kuantitas dan kualitas produksi karena adanya temu bisnis antara para pengusaha dari beberapa daerah. Kuantitas atau jumlah barang yang dihasilkan juga dipengaruhi adanya kegiatan pemberdayaan. Hal ini dikarenakan secara tidak sengaja pengusaha bertemu dengan mitranya dalam kegiatan tertentu Seperti yang disampaikan Bu Tutik salah satu pengusaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru berikut ini :

> "Setelah mengikuti kegiatan pameran dan pelatihan dari Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek sekarang produksi keripik tempe saya meningkat karena semakin berkembangnya kemampuan kami dan banyak mitra untuk memasarkan produk keripik saya." (*Wawancara tanggal 23 November 2011, pukul 09.00 di rumah* Bu Tutik*, Kelurahan Ngantru*)

Sesuai pengamatan dan penelitian yang dilakukan oleh penulis, sebagai wujud dukungan Pemerintah Kabupaten Trenggalek terhadap aspek meningkatkan akses pasar bagi para pengusaha kripik tempe di Sentra Industri Kripik Tempe Keluran Ngantru Kabupaten Trenggalek, Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek berupaya untuk memfasilitasi para pengusaha untuk bisa mengikuti pameran UKM di beberapa kota dan dibeberapa acara seperti di TMII, INACRAFT dan beberapa acara pameran UKM lainnya. Keikutsertaan dalam berbagai pameran UKM

diharapkan dapat mengenalkan dan memasarkan produk UKM kepada masyarakat luas dan menjadi salah satu akses menuju pasar domestik. Hal itu seperti yang ditegaskan oleh Ibu Nurun Nadjmi, Staff Bidang Industri dan Dagang Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sebagai berikut:

> "Dalam upaya pemberdayaan Diskoperindagtamben, kami juga sebagai fasilitator bagi pengusaha kripik tempe khususnya yang berada di Setra Industri Kripik Tempe di Kelurahan Ngantru untuk bisa mengikuti berbagai acara pameran UKM dibeberapa kota. Upaya ini untuk mengenalkan dan memasarkan salah satu produk unggulan Kabupaten Trenggalek di pasar domestik dan berharap bisa meningkatkan kuota penjualan maupun omset penjualan yang bisa menambah penghasilan masyarakat UKM di Sentra Industri kripik Tempe di Kelurahan Ngantru ini."(*Wawancara tanggal 21 November 2011, pukul 10.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*)

**4. Dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Ngantru:**

**c. Peningkatan pendapatan: perbandingan pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya industri kripik tempe.**

Pendapatan yang diperoleh pengusaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan keripik tempe selama sebulan sebelum dikurangi berbagai macam beban yang dikeluarkan sebagai kegiatan operasional dan proses produksi.

Pembinaan dan pemberdayaan UKM industri keripik tempe saat ini dirasa sangat diperlukan untuk mengangkat perekonomian rakyat. Dengan berkembangnya perekonomian rakyat diharapkan

mampu meningkatkan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja dan memakmurkan masyarakat. Saat ini pemberdayaan untuk UKM industri keripik tempe dapat terealisasi dengan baik meskipun belum secara keseluruhan. Hal ini dikarenakan jumlah UKM yang ada belum dapat diketahui dengan pasti. Karena kadang antusiasme dari pengusaha juga yang kurang. Untuk jumlah UKM industri keripik tempe yang ada di Trenggalek data diperoleh dari kelurahan dan kecamatan mengenai potensi daerahnya masing-masing.

Hal tesebut sesuai yang diungkapkan oleh Ibu Dwi Endah, SE salah satu staf Bidang UKM di Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek berikut ini:

> "Kalau pemberdayaan untuk UKM industri kripik tempe sudah kita lakukan dengan maksimal namun karena memang jumlah UKM industri kripik tempe yang banyak kami tidak bisa memberdayakan semuanya. Kalau data jumlah UKM industri kripik tempe yang ada kami dapat dari desa dan kecamatan. Kadang tidak semua UKM industri kripik tempe terdata." (*Wawancara tanggal 22 November 2011, pukul 09.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*)

Kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek adalah melalui kegiatan pelatihan pengembangan usaha, pelatihan keterampilan tekhnis, bantuan pengadaan peralatan, bantuan akses permodalan serta bantuan akses pemasaran. Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan

dan Energi Kabupaten Trenggalek untuk memberdayakan UKM industri keripik tempe tersebut telah memberikan manfaat yang besar bagi para pengusaha industri keripik tempe. Manfaat mulai dari semakin luas pemasaran, mendapat bantuan modal, berkembangnya usaha.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Siti salah satu pengusaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Cap "Mbak Siti" sebagai berikut :

> "Kami merasa sangat terbantu dengan adanya pelatihan, bantuan dan kegiatan pameran dari Dinas mas. Kini untuk setiap bulannnya omset penjualan saya meningkat dan usaha saya semakin berkembang dan pendapatan semakin meningkat." (*Wawancara tanggal 21 November 2011, pukul 14.00 di rumah Mbak Siti, Kelurahan Ngantru*)

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa produktivitas pengusaha keripik tempe dengan adanya pemberdayaan UKM sudah menampakan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari UKM keripik tempe hasil pembinaan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan usahanya. Meskipun hasil pembinaan tersebut belum ke seluruh UKM keripik tempe yang ada hal ini dikarenakan jumlah UKM keripik tempe yang terdata belum mencapai keseluruhan karena antusiasme dari pengusaha keripik tempe sendiri yang kurang. Namun usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dalam mendukung pemberdayaan UKM keripik tempe mulai dari pelatihan, bantuan akses permodalan dan peralatan serta

pameran untuk memperluas pemasaran telah memberikan hasil yang bermanfaat bagi peningkatan UKM keripik tempe itu sendiri dan masyarakat sekitar.

**d. Lapangan kerja baru: memberikan kesempatan baru dalam peluang kerja dan usaha baru**

Salah satu dampak pemberdayaan UKM keripik Tempe adalah timbulnya peluang kerja dan pendapatan usaha di daerah sekitarnya. Besarnya dampak ini antara lain akan tergantung kepada jenis usaha, produk yang dihasilkan, kaitan investasi yang ditanamkan, dan kondisi lokal tempat kegiatan tersebut dilaksanakan. Tidak kalah pentingnya adalah kebijaksanan pemerintah yang berkaitan dengan upaya mengoptimumkan dampak pemberdayaan UKM terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat

Dampak dari adanya pemberdayaan UKM tersebut selain berpengaruh pada peluang kerja pada masyarakat sekitar, tentu saja juga berimbas terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Biasanya para penduduk sekitar sebagai buruh tani mendapatkan upah dalam proses pengarapan sawah dihitung perhari akibat dari pemberdayaan UKM omset meningkat kebutuhan tenaga kerja harian untuk memproduksi keripik tempe juga meningkat

Produktivitas pada umumnya dipahami sebagai rasio antara input dengan output, artinya perbandingan sejauh mana upaya yang dilakukan dengan hasil yang diperolehnya dalam periode tertentu.

Dalam penelitian ini konsep produktivitas dibahas mengenai sejauhmana pemberdayaan UKM keripik tempe yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dan bagaimana hasil pemberdayaan yang dirasakan oleh pengusaha keripik tempe. Produktivitas dapat dilihat dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi untuk pencapaian tujuan dalam pemberdayaan UKM keripik tempe dengan kenyataan yang dijalankan apakah sesuai target atau tidak.

Berdasarkan data dari Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek diketahui bahwa jumlah usaha kecil di Kabupaten Trenggalek menunjukan peningkatan, hal tersebut diikuti pula dengan peningkatan jumlah tenaga kerja yang diserap. Hal tersebut sesuai yang disampaikan oleh Drs. Maryono, Kepala Bidang UKM di Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

> ”Sejak krisis yang lalu jumlah UKM di Trenggalek ini mengalami peningkatan yang signifikan terutama usaha kecilnya mbak, sehingga meningkatkan jumlah tenaga kerja yang diserap juga.” *(Wawancara tanggal 28 November 2011, pukul 10.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek)*

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Dwi Endah, SE, salah satu staff bidang UKM di Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek berikut ini:

> "Memang, akhirnya dampak yang dirasakan para pengusaha keripik tempe sangat menggembirakan. omset naik, harga juga meningkat, keuntungan bertambah. Mereka juga tidak perlu promosi gencar karena order akhirnya datang sendiri, imbasnya ini turut menjadi pemberdayaan masyarakat melalui penyerapan tenaga kerja dari masyarakat." *(Wawancara tanggal 28 November 2011, pukul 11.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek)*

Selain usaha yang dimiliki perorangan, usaha keripik tempe di Kelurahan Ngantru membentuk kelompok keripik tempe sebagai wadah bagi pengusaha-pengusaha keripik tempe ini. Adapun keunggulan dari dibentuknya kelompok keripik tempe antara lain: apabila ada pesanan dalam jumlah banyak mereka selalu siap karena masyarakat ada yang menjadi pembuat tempe mentah sebagai bahan baku keripik tempe dan bukan dari satu orang sehingga bisa mengambil dari pembuat yang lain, kemudian kalau ada pelatihan atau pameran bisa berbagi tugas dalam manajemen usaha di kelompok dan lebih mudah untuk mengatasi masalah yang dihadapi karena bisa *sharing* dalam kelompok.

Hal tersebut sesuai yang diungkapkan oleh Mbak Siti salah satu pengusaha Keripik Tempe di Kelurahan Ngantru Cap "Mbak Siti", sebagai berikut :

> "Dalam usaha keripik tempe kalau ada pesanan yang mendadak kita selalu siap mas karena kita selalu punya stok barang kalau stok habis kita mempekerjakan masyarakat sekitar untuk memproduksi keripik tempe maupun tempe mentah guna memenuhi pesanan tersebut." *(Wawancara tanggal 21 November 2011, pukul 14.00 di rumah Mbak Siti, Kelurahan Ngantru)*

Walaupun usaha keripik tempe bukan yang merupakan yang terbesar di Kabupaten Trenggalek namun potensi yang dimiliki usaha ini untuk berkembang sangat besar. Hal ini terlihat dengan terus meningkatnya permintaan akan keripik tempe baik lokal maupun luar daerah. Juga dengan meningkatnya jumlah tenaga kerja untuk usaha keripik tempe ini. Hal itu menjadikan usaha keripik tempe mempunyai kontribusi dalam perekonomian daerah dan menjadi salah satu usaha yang perlu untuk dikembangkan dan terus diberdayakan khususnya oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sebagai penanggungjawab bagi pemberdayaan UKM keripik tempe sehingga nantinya dapat berkembang dan maju.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Hal tersebut sesuai dengan yang dijelaskan oleh Drs. Maryono, Kepala Bidang UKM di Dinas Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek sebagai berikut :

> "Sesuai dengan konsep penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang tertuang dalam Keppres 124 Tahun 2001 No.8 Tahun 2002 yang secara khusus menyelenggarakan upaya penanggulangan kemiskinan di Indonesia yang dilakukan oleh forum yang bertujuan meningkatkan pendapatan rakyat miskin dan menurunkan populasi penduduk miskin secara signifikan. Salah satu strategi penanggulangan kemiskinan adalah peningkatan produktivitas melalui pemberdayaan usaha kecil dan menengah, karena dengan pemberdayaan usaha kecil dan menengah tersebut dapat membuka lapangan kerja baru bagi penduduk yang membutuhkannya, terutama usaha yang bersifat padat karya." (*Wawancara tanggal 28 November 2011, pukul 10.00 di kantor Diskoperindagtamben Kab. Trenggalek*)

## J. Pembahasan

### 1. Peran Pemerintah dalam pemberdayaan UKM tempe kripik di Kelurahan Ngantru, meliputi:

#### a. Identifikasi potensi dan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi

Salah satu pola pendekatan pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi yang paling efektif dalam rangka peningkatan pemberdayaan UKM adalah *inner resources approach.* Pola ini menekankan pentingnya merangsang pelaku UKM untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan-kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai

kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik pelaku UKM menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah-masalah yang mereka hadapi dengan menggunakan potensi yang mereka miliki.

Didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan pihak yang diberdayakan yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan masyarakat, memliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan *(empowering)* pihak yang diberdayakan dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi.

Pemberdayaan UKM yang dilakukan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek mengacu kepada kata *empowerment*, yaitu sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh kelompok UKM tersebut. Sesuai dengan maksud dari pemberdayaan itu sendiri Syarif (2001) menjelaskan, Pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya (masyarakat) dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. Keberdayaan adalah unsur dasar yang memungkinkan suatu masyarakat bertahan dan dalam pengertian yang dinamis mengembangkan diri dan

mencapai kemajuan. Jadi, pendekatan pemberdayaan UKM bertitik berat pada pentingnya UKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada UKM sendiri bukan sekedar objek, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunanan ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum.

Pemberdayaan masyarakat demikian juga terhadap UKM, bertitik tolak untuk memandirikan UKM agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Pemberdayaan masyarakat akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menyampaikan kebutuhannya kepada instansi-instansi pemberi pelayanan. Pemberdayaan UKM sebagai upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh UKM. Jadi, pendekatan pemberdayaan UKM bertitik berat pada pentingnya UKM yang mandiri sebagai suatu sistem yang mengorganisir diri mereka sendiri sehingga diharapkan dapat memberi peranan kepada individu bukan sekedar pihak, tetapi justru sebagai subjek pelaku pembangunan yang ikut menentukan masa depan dan kehidupan masyarakat secara umum. Dalam kaitannya dengan pelaku di bidang UKM sebagai objek yang akan diberdayakan, pemberdayaan adalah upaya memberikan motivasi/dorongan kepada pelaku di bidang UKM agar mereka memiliki kesadaran dan kemampuan untuk menentukan

sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi permasalahan yang mereka hadapi.

Dari segi prinsip, didalam melakukan pemberdayaan keterlibatan pelaku UKM yang akan diberdayakan sangatlah penting sehingga tujuan dari pemberdayaan dapat tercapai secara maksimal. Program yang mengikutsertakan UKM, memliki beberapa tujuan, yaitu agar bantuan tersebut efektif karena sesuai dengan kehendak dan mengenali kemampuan serta kebutuhan mereka, serta meningkatkan keberdayaan *(empowering)* UKM dengan pengalaman merancang, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan upaya peningkatan diri dan ekonomi.

Dari segi proses, pemberdayaan sebagai suatu proses perlu adanya pengembangan dari keadaan yang tidak atau kurang berdaya menjadi mempunyai daya guna mencapai kehidupan yang lebih baik. Untuk meningkatkan kapasitas UKM agar mampu mentransfer daya adalah dengan strategi peningkatan pendidikan dan kesadaran.

**b. Meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UKM**

Pemberdayaan masyarakat seperti yang dilakukan pada usaha pengusaha keripik tempe ini merupakan upaya mempersiapkan masyarakat untuk lebih maju dalam usahanya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Pemberdayaan yang diiringi dengan upaya memperkuat kelembagaan masyarakat akan mewujudkan kemajuan, kemandirian dan kesejahteraan yang berkelanjutan. Pemberdayaan ini

juga merupakan upaya meningkatkan harkat dan martabat masyarakat yang dalam kondisi sekarang mengalami kesulitan sebagai akibat krisis ekonomi yang dialami bangsa Indonesia.

Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi adalah sebagai salah satu jajaran pemerintahan yang tugasnya berkaitan dengan jalannya perekonomian nasional, mengembangkan usaha kecil dengan jalan meningkatkan mutu kualitas, kemampuan daya saing. Untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan, maka dalam program pengembangan usaha kecil mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia yang ditujukan untuk mengembangkan jiwa kewirausahaan, ketrampilan dan keahlian yang bertujuan untuk memanfaatkan potensi sumber daya dan nilai-nilai budaya setempat untuk memenuhi kebutuhan teknologi tradisional.

Sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Trenggalek Tahun 2011, pemberdayaan usaha kecil yang menjadi tugas Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dilaksanakan secara terus menerus dengan selalu memperhatikan aspek–aspek, diantaranya adalah:

1. Penguatan aspek permodalan, efisiensi proses, spesifikasi mutu, manajemen pemasaran.
2. Pengembangan pola kemitraan berdasarkan prinsip saling menguntungkan dan membutuhkan.

3. Bantuan fasilitas diberikan secara selektif dalam bentuk sarana dan permodalan.

Orientasi kewirausahaan dan kemampuan manajemen bersinergi baik secara sengaja atau tidak melalui inovasi dan gagasan kreatif yang diwujudkan pengusaha dan dilaksanakan untuk mencapai kinerja usaha yang menguntungkan. Pengembangan dalam kewirausahaan merupakan strategi utama karena bersangkut paut dengan kreativitas dan inovasi yang merupakan bagian orientasi kewirausahaan, penelitian dan pengembangan akan dapat dilaksanakan pada produk, harga, tempat dan promosi. Pengusaha berkembang dan berhasil karena memiliki kemampuan penelitian dan pengembangan yang memadai sehingga tercipta strategi bisnis yang tepat untuk menciptakan barangbarang bernilai dan unggul di pasar.

Manajemen yang baik dalam hal ini kemampuan berkomunikasi, kemampuan mengantar barang pesanan dengan cepat, kemampuan membuat keputusan sendiri, kemampuan menyelesaikan masalah usaha, kemampuan mengarahkan dan memotivasi karyawan, mampu mendelegasikan pekerjaan, mampu membuat rencana strategi yang baik, kemampuan melihat perubahan lingkungan, mampu membangun tim kerja yang handal serta memiliki kemampuan untuk menyelesaikan konflik internal, maka dia akan mendapatkan kepercayaan yang tinggi baik dari para karyawannya ataupun dari konsumennya. Dengan adanya keseimbangan baik dari sisi internal

yang kondusif maupun tingkat kepercayaan konsumen dalam hal ketepatan dari proses pemesanan barang, hal ini akan berdampak terhadap kinerja usaha yang makin meningkat.

Kebijakan kewirausahaan bagi UKM yang dilakukan Diperindakop Kabupetn Trenggalek bertujuan untuk mendorong terciptanya *governance* yang lebih baik. Tentu saja tidak semua kebijakan publik yang membentuk konteks kewirausahaan dan ketersediaan wirausaha potensial dapat digolongkan sebagai kebijakan kewirausahaan. Kebijakan pendidikan, misalnya, dapat mempengaruhi motivasi berbisnis, pengetahuan, keahlian, dan terbentuknya jejaring yang bermanfaat bagi pelajar atau mahasiswa untuk kelak menjadi wirausaha. Kebijakan makro ekonomi, misalnya dapat mempengaruhi ketersediaan modal jangka pendek dan kondisi perdagangan internasional yang juga mempengaruhi gairah mengembangkan bisnis baru dalam konteks kewirausahaan. Diperlukan beragam masukan dari sistem hukum, budaya, kelembagaan, kebijakan perekonomian dan pendidikan yang kondusif untuk kewirausahaan.

**c. Pengembangan pemasaran dalam upaya meningkatkan akses pasar**

Program pemberdayaan UKM tersebut mencakup kegiatan pengembangan jaringan pemasaran. Kegiatan ini lahir dengan asumsi bahwa sebaik apapun UKM dalam mengelola usahanya jika tidak memiliki pasar untuk memasarkan produknya maka UKM tersebut

akan mati secara perlahan. Hal ini merupakan salah satu indikator keberhasilan UKM. Karena UKM yang dikatakan berhasil adalah bila memiliki jaringan pemasaran yang baik dan kuat, yang dapat diandalkan bagi penjualan dan pengembangan produk-produknya.

Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Trenggalek berharap bahwa dengan teratasinya kendala dalam pengembangan jaringan pemasaran UKM di Kabupaten Trenggalek, UKM yang ada mampu semakin berkembang dan bertumbuh dan masyarakat tidak lagi khawatir untuk membuka usaha-usaha kecil menengah karena kendala tersebut sehingga harapan bahwa UKM nantinya dapat berperan sebagai tulang punggung perekonomian masyarakat dapat terwujud.

Semakin agresifnya pelaku pasar dalam merebut porsi pasar yang menyebabkan industri kecil dan menengah memandang perlu untuk menerapkan strategi produk inovatif yang bersaing disamping meningkatkan kepuasan pelanggan. Kasus yang terjadi pada usaha kecil dan menengah yang ada di Kabupaten Trenggalek, dapat ditarik kesimpulan bahwa keunggulan bersaing produk yang inovatif dengan produk sejenis menarik untuk ditelaah lebih lanjut dalam ruang lingkup yang berbeda untuk memberikan kontribusi perusahaan berupa implikasi manajerial yang berhubungan dengan pengaruh orientasi kewirausahaan, orientasi pasar, dan inovasi terhadap keunggulan bersaing untuk meningkatkan kinerja pemasaran.

Orientasi pasar sangat efektif dalam mendapatkan dan mempertahankan keunggulan kompetitif, yang dimulai dengan perencanaan dan koordinasi dengan semua bagian yang ada dalam organisasi untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oleh karena itu orientasi pasar harus menekankan pentingnya analisis kebutuhan dan keinginan target pasar secara lebih efisien dan efektif dibandingkan dengan pesaingnya dalam usaha untuk mencapai keunggulan bersaing. Penekanan orientasi pasar terhadap daya saing berdasarkan pada pengidentifikasian kebutuhan pelanggan sehingga setiap perusahaan dituntut untuk dapat menjawab kebutuhan yang diinginkan konsumen baik itu melalui penciptaan produk yang baru atau pengembangan dari produk yang sudah ada, agar dapat menciptakan *superior value* bagi konsumennya secara berkelanjutan dan dapat menjadi modal utama bagi perusahaan untuk dapat memenangkan persaingan.

2. **Dampaknya terhadap sosial ekonomi masyarakat Kelurahan Ngantru:**

Sektor industri dan UKM telah berperan sebagai penggerak utama untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi secara berkelanjutan meningkatkan produktifitas masyarakat. Di samping itu ukm juga berperan menciptakan lapangan usaha serta memperluas kesempatan kerja, meningkatkan serta menghemat

devisa, mendorong pembangunan daerah, meningkatkan serta memeratakan pendapatan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.

Dalam memilih komponen-komponen lainnya perlu diprioritaskan komponen-komponen yang merupakan komponen kritis atau sangat penting dan menentukan kehidupan masyarakat setempat. Adapun indikator tersebut antara lain terdiri dari (Suratmo, 2002):

e. Penyerapan tenaga kerja. Dampak penyerapan tenaga kerja tidak selalu berupa dampak langsung tetapi juga dampak tidak langsung, artinya timbulnya sumber-sumber pekerjaan baru dan merupakan komponen berikutnya yang penting.
f. Berkembangnya struktur ekonomi. Dimaksudkan dengan timbulnya aktivitas perekonomian lain akibat adanya proyek sehingga merupakan sumber-sumber pekerjaan baru yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih besar dari yang tersebar oleh proyek.
g. Peningkatan pendapatan masyarakat. Keadaan umum masyarakat yang ada di negara berkembang adalah rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dari proyek akan memberikan dampak yang berarti.
h. Perubahan lapangan pekerjaan. Dengan timbulnya lapangan pekerjaan yang baru baik yang langsung maupun tidak langsung karena perubahan struktur ekonomi perlu

diperhatikan karena tidak selalu peerubahan itu menguntungkan bagi masyarakat. Misalnya pemuda desa enggan bekerja di pertanian lagi, mereka lebih merasa bangga apabila bekerja sebagai buruh atau sebagai pemberi jasa.

Beberapa poin yang telah disampaikan oleh Suratmo tersebut sesuai dengan dampak yang timbul akibat adanya pemberdayaan UKM yang telah dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek kepada Sentra Industri dan UKM Kelurahan Ngantru Kabupaten Trenggalek.

**a. Peningkatan pendapatan: perbandingan pendapatan antara sebelum dan sesudah adanya industri kripik tempe.**

Pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UKM) merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian terbesar rakyat Indonesia, khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan tingkat kemiskinan**.** Dengan demikian upaya untuk memberdayakan UKM harus terencana, sistematis dan menyeluruh baik pada tataran makro, meso dan mikro yang meliputi (1) penciptaan iklim usaha dalam rangka membuka kesempatan berusaha seluas-luasnya, serta menjamin kepastian usaha disertai adanya efisiensi ekonomi; (2) pengembangan sistem pendukung usaha bagi UKM untuk meningkatkan akses kepada sumber daya produktif sehingga dapat memanfaatkan kesempatan yang terbuka dan potensi

sumber daya, terutama sumber daya lokal yang tersedia; (3) pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif usaha kecil dan menengah (UKM); dan (4) pemberdayaan usaha skala kecil untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang bergerak dalam kegiatan usaha ekonomi di sektor informal yang berskala usaha kecil, terutama yang masih berstatus keluarga miskin. Selain itu, peningkatan kualitas UKM untuk berkembang secara sehat sesuai dengan jati dirinya dan membangun efisiensi kolektif terutama bagi pengusaha mikro dan kecil.

Pemberdayaan usaha kecil utamanya diarahkan untuk mendukung penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pendapatan masyarakat berpendapatan rendah, yaitu dengan: (1) memperluas jangkauan dan kapasitas pelayanan lembaga keuangan mikro (LKM) baik pola pembiayaan konvensional maupun pola bagi hasil/syariah, termasuk dengan memberdayakan perempuan sebagai pengusaha kecil; (2) meningkatkan kemampuan pengusaha kecil dalam aspek manajemen usaha dan teknis produksi; dan (3) memfasilitasi pembinaan sentra-sentra produksi tradisional dan usaha ekonomi produktif lainnya di perdesaan dan daerah tertinggal.

Pemberdayan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek merupakan kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat

dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Meskipun usaha mikro, kecil dan menengah telah menunjukkan perannanya dalam perekonomian nasional, namun masih menghadapi berbagai hambatan dan kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, dalam hal produksi dan pengelolaan, pemasaran, sumber daya manusia, desain dan teknologi, permodalan, serta iklim usaha

Pada Kabupaten Trenggalek Sentra Industri dan UKM Keripik Tempe merupakan salah satu daerah yang mempunyai potensi industri yang cukup baik, sebagai salah satu Kabupaten yang menerapkan kebijakan otonomi daerah dan kebijakan tersebut diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun daerah Trenggalek secara khusus dan Indonesia secara umum.

**b. Lapangan kerja baru: memberikan kesempatan baru dalam peluang kerja dan usaha baru**

Di kelurahan Ngantru ini, terdapat Sentra Industri dan UKM Kripik Tempe yang mengolah bahan mentah kedelai untuk dijadikan bahan kripik tempe. Sentra Industri dan UKM Kripik Tempe ini merupakan salah satu industri ukm yang saat ini ingin meningkatkan kualitas penyediaan barang dan jasanya agar mampu bersaing dalam era globalisasi. Dengan berkembangnya usaha kerajinan tersebut, masyarakat sekitar merasakan dampak positif. Keuntungan yang

dirasakan masyarakat sekitar adalah mereka dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja sehingga mampu menambah pendapatan masyarakat setempat.

Usaha kecil dikembangkan untuk memperluas kesempatan kerja dan kesempatan usaha, peningkatan pendapatan yang lebih meratapenciptaan keseimbangan peran serta masyarakat dan usahanya yang lebih sehat, dan bagi pemerintah adalah untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian masyarakat. UKM kripik tempe yang berada di Ngantru ini merupakan salah satu usaha kecil yang telah mampu memproduksi makanan khas yang tidak hanya diminati masyarakat daerah sekitar Trenggalek saja. Hal ini dapat dilihat dari jumlah permintaan yang tidak hanya dating dari daerah setempat, permintaan juga datang dari daerah-daerah lain diluar Kabupaten Trenggalek.

Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 secara jelas telah merinci solusi untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan pembukaan lapangan usaha bagi UKM, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 butir huruf (f). Di sini ditegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus menumbuhkan Iklim usaha dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi beberapa aspek, antara lain (huruf f) kesempatan berusaha. Akan tetapi jika diperhatikan lebih jauh, ruang lingkup aspek yang dimaksud dalam pasal tersebut sangatlah luas dan berkaitan dengan kebijakan makro tentang semua pelaku usaha termasuk usaha besar dan kalangan usaha

lainnya. Oleh sebab itu, apa yang diatur dalam UU Nomor 20 Tahun 2008 tersebut patut dikhawatirkan tidak akan efektif. Pengaturan kesempatan usaha tersebut juga akan berkaitan langsung dengan kepentingan dunia usaha, seperti para investor asing yang sengaja diundang untuk mendorong dunia usaha.

Berbicara masalah menggerakkan ekonomi rakyat sesungguhnya tidak terlepas dari pembicaraan terhadap usaha memberdayakan UKM. Kementerian Negara Koperasi dan UKM menyatakan bahwa Indonesia saat ini memiliki hampir 50 juta unit UKM. Dapat diperkirakan bahwa ada sekitar 99% lebih dari total unit usaha yang ada Dari seluruh UMKM yang ada tersebut, yang paling banyak adalah usaha mikro dengan jumlah 47.702.310 atau sekitar 95% lebih (Raja. 2010: 9-10).

Hal tersebut akan mengurangi tingkat pengangguran, baik pada tingkat lokal pun nasional, produk-produk UKM setidaknya telah memberikan kontribusi bagi pertumbuhan ekonomi dan pendapatan nasional karena tidak sedikit produk-produk UKM itu mampu menembus pasar internasional. Konkretnya, kehadiran UKM telah membantu program pemerintah untuk menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan mampu meningkatkan PDB secara signifikan. Selain berpotensi meciptakan kesempatan kerja dan meningkatkan PDB, UKM juga dapat memiliki sumbangan kepada devisa nagara dengan nilai ekspor yang cukup tinggi.

# BAB V

# KESIMPULAN DAN SARAN

## A. Kesimpulan

1. Secara konseptual pemberdayaan UKM terutama dapat dilakukan dengan sistem pemberdayaan pelaku UKM itu sendiri. Keberhasilan pemberdayaan sangat bergantung pada partisipasi UKM sebagai pelaku maupun *stakeholder* lain yang turut serta dan berperan dalam pengembangannya. Program pemberdayaan yang dilakukan Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek meliputi :

   a. Identifikasi potensi dan program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi. Hal ini dilakukan dengan pengembangan dan Sumberdaya Manusia (SDM) UKM itu sendiri, pembinaan dalam peningkatan sarana dan prasarana usaha industri

   b. Pembinaan terhadap majamenen pengelolaan industri dan meningkatkan kewirausahaan dan kemampuan UKM dengan cara : (1) Pembentukan badan pembina dan pelatih UKM yang terdiri dari unsur lembaga pendidikan dan pelatihan, asosiasiasosiasi, dan perusahaan-perusahaan besar, (2) Pemberian sertifikasi kompetensi kepada UKM dalam pengelolaan usaha atau koperasi, (3) Penyelengaraan pelatihan budaya usaha dan kewirausahaan, serta bimbingan teknis manajemen usaha., (4) Pemasyarakatan

kewirausahaan , termasuk memperluas pengenalan dan semangat kewirausahaan dalam kurikulum pendidikan., (5) Pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penyuluhan perkoperasian bagi anggota dan pengelolanya. dan (6) Pemberian insentif dan kemudahan fasilitas bagi UKM yang berprestasi.

c. Pengembangan pemasaran dalam upaya meningkatkan akses pasar melalui peningkatan kualitas produk serta pemasaran produk. Peningkatan kualitas produk UKM yang disertai dengan perbaikan kualitas kemasan, peningkatan higienis dan sertifikasi produk, melakukan pameran industri kecil.

2. Dampak pemberdayaan UKM yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek antara lain :

   a. Produktivitas pengusaha keripik tempe dengan adanya pemberdayaan UKM sudah menampakan hasil yang optimal. Hal ini terlihat dari UKM keripik tempe hasil pembinaan dan pemberdayaan yang dapat meningkatkan produksi dan pendapatan usahanya. usaha yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dalam mendukung pemberdayaan UKM keripik tempe mulai dari pelatihan, bantuan akses permodalan dan peralatan serta pameran untuk memperluas pemasaran telah

memberikan hasil yang bermanfaat bagi peningkatan UKM keripik tempe itu sendiri dan masyarakat sekitar.

b. Dampak dari adanya pemberdayaan UKM tersebut selain berpengaruh pada peluang kerja pada masyarakat sekitar, tentu saja juga berimbas terhadap pendapatan masyarakat sekitar. Biasanya para penduduk sekitar sebagai buruh tani mendapatkan upah dalam proses pengarapan sawah dihitung perhari akibat dari pemberdayaan UKM omset meningkat kebutuhan tenaga kerja harian untuk memproduksi keripik tempe juga meningkat.

**B. Saran**

1. Hendaknya dilakukan sosialisasi secara menyeluruh, berkelanjutan, dan bertahap untuk mengikuti semua program yang dilaksanakn oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek kepada seluruh UKM Pengusaha Keripik Tempe, dengan begitu semua Pengusaha Keripik Tempe mampu menguasai informasi dan meningkatkan ketrampilam mereka program pemberdayaan yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.
2. Untuk mengatasi masalah pemasaran produk UKM yang dialami oleh pengusaha, maka perlu dipikirkan paradigma baru dalam mengatasi masalah tersebut. Salah satu alternatif pemecahannya adalah memberdayakan lembaga ekonomi pedesaan yaitu koperasi. Koperasi harus berfungsi sebagai badan usaha di daerah dan pelaksana penuh

pemasaran produk UKM. Fungsi, antara lain: *Pertama*, mencarikan alternatif pemecahan masalah pengusaha kecil seperti penyediaan kredit, pembentukan modal bersama melalui tabungan, penyediaan sarana produksi, pelaku agroindustri, memasarkan produk dan sebagainya; *Kedua*, memberikan kemudahan berupa pelatihan dan pembinaan kepada pengusaha dalam usaha-usaha yang dilakukannya; dan *ketiga*, pengusaha di pedesaan perlu diorganisir untuk memperkuat posisi tawar-menawarnya dalam menghadapi persaingan dan melakukan kemitraan dengan pihak lain.

3. Implementasi kebijakan dalam rangka strategi pemberdayaan masyarakat untuk mengembangkan UKM tidak bisa secara parsial hanya bidang ekonomi permodalan saja, namun juga harus berorientasi secara keseluruhan atas kebutuhan UKM baik secara individu maupun kelompok termasuk mendasarkan pada potensi sumberdaya manusianya. Dengan melibatkan secara partisipatif dan lebih bersifat *bottom up* ternyata partisipasi UKM untuk pemberdayaan diri mereka sendiri akan berhasil dan pada gilirannya secara intergral akan mampu memberikan dampak perkembangan bagi perekonomian wilayah

# DAFTAR PUSTAKA

**Literatur:**


Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan.* Yogyakarta: BP. STIE-YKPN

Dipta, Wayan. 2008. *Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah*. Jakarta: Baratha

Dunn, William N, 2000, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik,* Terjemahan Samodra Wibawa Dkk, University Press, Yogyakarta

Hidayat, Syarif. 2001. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat: Sebuah Rekonstruksi Konsep Community Based Development***.** Jakarta: Pustaka Quantum.

Karsidi. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro, Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah*. Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.

Kuncoro, Mudrajad. 2007. *Ekonomika Industri Indonesia: Menjadi Negara Industri Baru*. Yogyakarta: Andi

Miles, B. Matthew dan Huberman, A. Michael. 1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia *press*

Moleong, Lexy. J. 2001**.** *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

M. Tohar. 2002. *Membuka Usaha Kecil*. Yogyakarta: Kanisaus.

Nazir, Moh. 2005. *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia

Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Riyadi, Slamet, 2002, *Pembangunan Dasar-Dasar dan Pengertiannya*. Surabaya: Usaha Nasional

Saleh, Irsyad Anshari. 1986. *Industri Kecil Sebuah Tinjauan dan Perbandingan.* Jakarta: LP3ES.

Santana K, Septiawan. 2007. *Menulis Ilmiah : Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Siagian, Sondang, 2004, Administrasi Pembangunan. Jakarta: Bumi Aksara

Singarimbun, Masri dan Sofia Efendi. 1987. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: LB3ES

Subanar, Harimurti, 2001, *Manajemen Usaha Kecil,* Yogyakarta : BPFE.

Suharto, Edi, 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat : Kajian Strategis Pembangunan Kesejahtraan Sosial dan Pekerjaan Sosial.* Bandung: PT Refika Aditama

Sulistiyani, A.T. 2004. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media

Sumodiningrat, Gunawan. 1999. *Pembangunan Daerah dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Bina Rena Pariwara

Suratmo, Gunawan. 2002. *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.* UGM, Yogyakarta.

Suryono, A. 2004. *Pengantar Teori Pembangunan.* Malang: Universitas Negeri Malang.

Syaifudin, H. H, D. Maspiyati. 1995. *Strategi dan Agenda Pengembangan Usaha Kecil.* Bandung: Yayasan Akartiga.

Syarif, Syahrial. 1991. *Industri Kecil dan Kesempatan Kerja.* Padang: Pusat Penelitian Universitas Andalas.

Tambunan, Tulus T.H 2002. *Usaha Kecil dan Menengah di Indonesia: Beberapa Isu Penting*. Jakarta: PT. Salemba Emban Patria.

Taufik, Muhamad. 2004. *Proyeksi Sentra Menjadi Klaster*. Jakarta: Rineka Cipta

Tugiman, Hiro, 1995. *Peranan Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Sisa Laba BUMN*. Bandung: ERESCO.

Wibawa, Samodra dan Purbokusumo, Yuyun dan Pramusinto, Agus. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik.* Raja Grafindo Persada. Jakarta.

Wrihatnolo, Randy R, Riant Nugroho Dwijowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: PT Gramedia

**Sumber dari Internet:**

Kartasasmita, G. 1996. *Pemberdayaan Usaha Kecil*. (http:www.ginanjar.com)

Putra. 2009. "*Usaha Mikro dan UKM dalam Perekonomian di Indonesia*", diakses pada tanggal 28 Oktober 2010 dari http://putracenter.net/2009/01/10/usaha-mikro-dan-ukm-dalam-perekonomian-indonesia/

Solihin, Dadang. 2010. *Tujuan Pembangunan*. Diakses 30 Agustus 2010, http//www.slideshare.com

*trenggalekkab.go.id*

---------- 2010. *Masyarakat Pelaku Utama Pembangunan*. Diakses 25 Agustus 2010, http//www.damandiri.or.id/file/arirahmadhakimundipbab1.pdf

**Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984. Tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tentang Usaha Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995. Tentang Usaha Kecil

**Lampiran 1.**
**Pedoman Wawancara.**

**Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek**

1. Bagaimana pemberdayaan yang dilakukan Diskoperindagtamben untuk UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?
2. Seperti apa identifikasi potensi yang dilakukan untuk UKM tersebut?
3. Apa saja peran dan upaya Diskoperindagtamben untuk memacu kemampuan UKM dan peningkatan SDM masyarakat pelaku UKM tersebut?
4. Apa saja langkah Diskoperindagtamben untuk memperdayakan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru dalam segi pengembangan usahanya?
5. Bagaimana upaya Diskoperindagtamben dalam rangka peningkatan akses pasar UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?
6. Seberapa besar kapasitas produksi dan nilai produksi yang dihasilkan oleh UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Daftar Pertanyaan yang diajukan kepada pengusaha keripik tempe di Sentra Industri dan UKM Keripik Tempe Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek**

1. Bagaimana sejarah adanya UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?
2. Seperti apa identifikasi potensi yang dilakukan oleh Diskoperindagtamben untuk UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?
3. Apa saja peran dan upaya Diskoperindagtamben untuk memacu kemampuan UKM dan peningkatan SDM para pengusaha UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?
4. Apa saja langkah Diskoperindagtamben untuk memperdayakan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru dalam segi pengembangan usaha keripik tempe?
5. Bagaimana upaya Diskoperindagtamben dalam rangka peningkatan akses pasar UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?
6. Bagaimana dampak yang di terima setelah adanya pemberdayaan di sector UKM khususnya UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru?

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**Lampiran 2.**
**Struktur Organisasi Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambang dan Energi Kabupaten Trenggalek.**

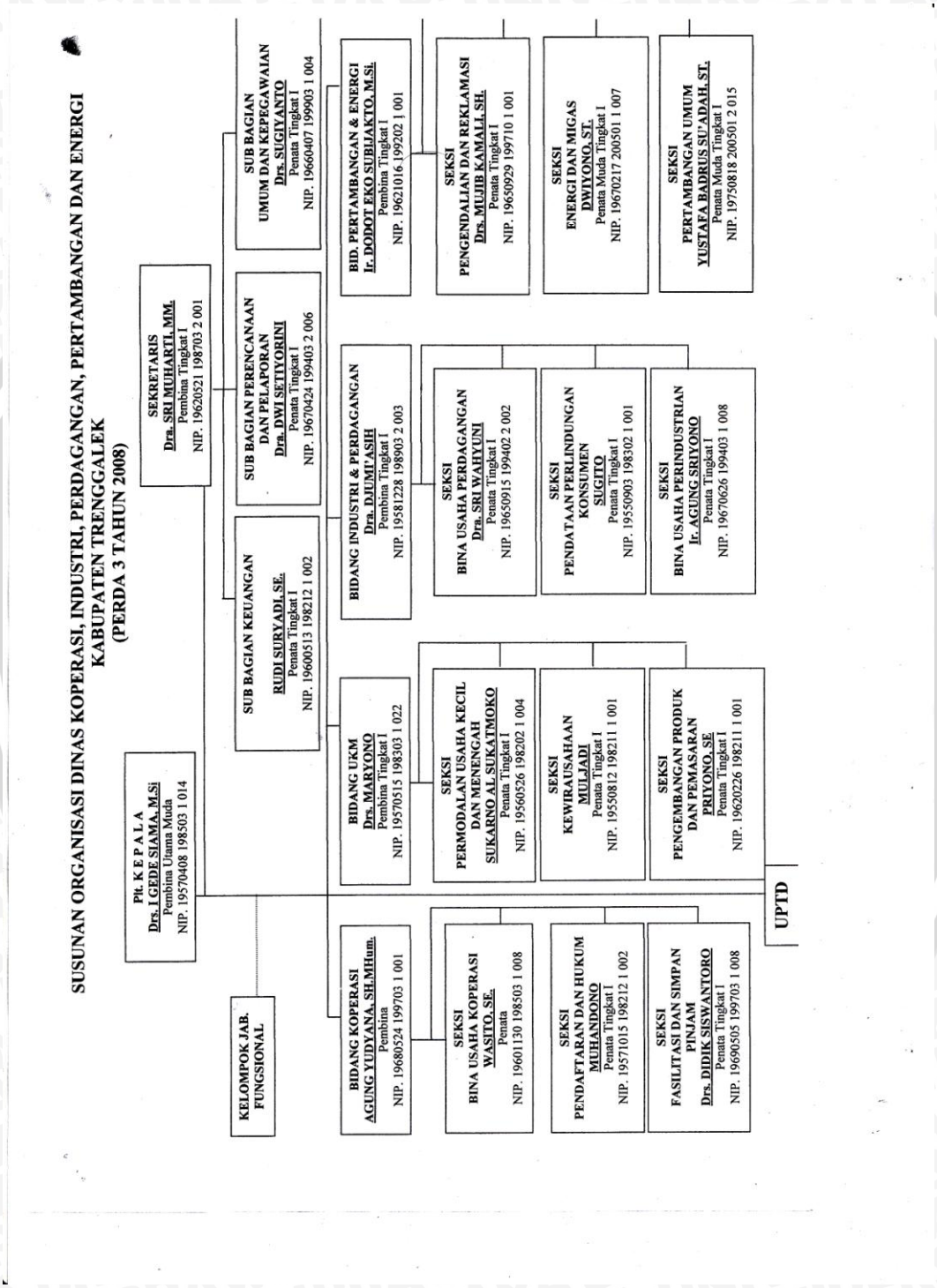

**Lampiran 3.**
**Rekomendasi Penelitian.**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**
**FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI**
***(FACULTY OF ADMINISTRATIVE SCIENCE)***
Jalan. Mayjen Haryono No.163 Malang 65145; . Telp. (0341) 553737, 568914, 558226
Fax. (0341) 558227; Laman : www.fia.ub.ac.id ; E-mail:fia@ub.ac.id

**Program Studi**: •S1 Ilmu Administrasi Publik •S1 Administrasi Pemerintahan •S1 Perencanaan Pembangunan • S1 Ilmu Perpustakaan • S1 Ilmu Administrasi Bisnis • S1 Perpajakan • S1 Bisnis Internasional • S1 Hospitality dan Pariwisata • Magister Ilmu Administrasi Publik • Magister Ilmu Administrasi Bisnis, dan • S3 Ilmu Administrasi

Nomor : 11197 /UN10.3/PG/2011
Lampiran : -
Hal : Riset/Survey

Kepada : Ketua Paguyuban Kelompok Industri Kripik Tempe Sentra Industri Kripik Tempe Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek

Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, mohon dengan hormat bantuan Bapak/Ibu/Saudara untuk memberikan kesempatan melakukan riset/survey bagi mahasiswa:

Nama : Dhani Wahyu Karuniawan
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 36 Trenggalek
NIM : 0610313044
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Tema : "Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Sentra Industri Kripik Tempe Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek)".
Lamanya : 2 (dua) minggu
Peserta : 1 (satu) orang

Demikian atas bantuan dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, kami ucapkan terima kasih

Malang, November 2011
a.n. Dekan
Ketua Jurusan Administrasi Publik
U.b. Sekretaris

**Drs. Minto Hadi, M.Si**
NIP. 19541270 198103 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
**KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**
**Jln. HOS. Cokroaminoto No. 1 Telp. (0355) 796547**
**TRENGGALEK Kode Pos. 66316**

Trenggalek, 14 November 2011

Kepada :
Yth. 1. Sdr. Kepala Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek
2. Sdr. Camat Trenggalek
Di
**TRENGGALEK**

**SURAT KETERANGAN UNTUK MELAKUKAN SURVEY/KKN/KKL/PPL/PSG/PRAKERIN**
Nomor : 072/ 469 /406.089/2011

| | | |
|---|---|---|
| MEMBACA | : | Surat dari Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang Nomor : 11197/UN.10.3/PG/2011, tanggal 14 November 2011 |
| NAMA PENANGGUNG JAWAB | : | **Drs. MINTO HADI, M. Si** |
| ALAMAT | : | Jl. Mayjend. Haryono No. 163 Malang |
| TEMA/ACARA SURVEY/KKN/ PPL/PSG | : | Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah Dan Dampaknya Terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Pada Sentra Industri Kripik Tempe Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek) |
| TUJUAN | : | Melaksanakan Penelitian guna penyusunan Skripsi/ Tugas Akhir |
| LAMANYA SURVEY/KKN/KKL/ PPL/PSG | : | 14 November s/d 30 November 2011 |
| TEMPAT DILAKUKAN SURVEY/ KKN/KKL/PPL/PSG | : | Dinas Koperindagtamben Kab. Trenggalek, Kelurahan Ngantru |
| PENGIKUT/PESERTA SURVEY/ KKN/KKL/PPL/PSG | : | **DHANI WAHYU KARUNIAWAN** |
| LAIN-LAIN | : | 1. Wajib mentaati segala peraturan setempat dimana yang bersangkutan mengadakan kegiatan.<br>2. Selesai melakukan ***Penelitian,*** melaporkan hasil kegiatan secara tertulis kepada Bupati Trenggalek lewat Kepala Kantor Kesbangpol dan Linmas Kabupaten Trenggalek. |

KEPALA KANTOR KESBANGPOL DAN LINMAS
KABUPATEN TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

**Ir. MULYONO, MH**
Pembina
NIP. 19660511 198603 1 017

*Tembusan Disampaikan Kepada :*
Yth. 1. Sdr. Dekan Fak. Ilmu Administrasi, UB Malang;
2. Sdr. Peserta Survey yang bersangkutan.

**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK**
**DINAS KOPERASI, INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN DAN ENERGI**
**Jalan Raya Buluagung No. 8 Telp. 0355-791689**
**TRENGGALEK**

Trenggalek, 3 Januari 2012

Nomor : 045/ 10 /406.055/ 2012
Lampiran :
Perihal : Laporan Penelitian

Kepada :
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya
Malang

Di
**MALANG**

Membaca surat dari Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang Nomor 11197/UN.10.3/PG/2011 tanggal 14 Novenber 2011 dan surat keterangan untuk melakukan survey dari kepala kantor Kesbangpol dan Linmas Kab.Trenggalek Nomor 072/464/406.089/2011, maka perlu kami beritahukan bahwa :

Nama : DHANI WAHYU KARUNIAWAN

Benar-benar telah melaksanakan penelitian di Dinas Koperasi, Industri, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek dipergunakan untuk penyusunan skripsi/ tugas akhir.

Demikian untuk menjadikan maklum dan dipergunakan seperlunya.

PLT. KEPALA DINAS KOPERASI,
INDUSTRI, PERDAGANGAN, PERTAMBANGAN
DAN ENERGI
KABUPATEN TRENGGALEK

PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS KOPERASI INDUSTRI PERDAGANGAN PERTAMBANGAN DAN ENERGI

**Drs. I GEDE SIAMA,M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP.19570408 198503 1 015

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang: a. bahwa Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Jawa Timur sebagai pelaku usaha memiliki arti penting dan peran serta kedudukan yang strategis dalam menopang ketahanan ekonomi masyarakat dan sebagai wahana penciptaan lapangan kerja ;

b. bahwa sumber daya manusia Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah tersebut belum disertai dengan kemampuan yang memadai dalam bidang manajemen, permodalan, teknologi, dan kemampuan berkompetisi ;

c. bahwa dalam usaha meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ketahanan ekonomi maka Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagai salah satu pelaku pembangunan ekonomi Jawa Timur perlu diberdayakan ;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dibentuk Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur tentang pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Mengingat: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara RI 1945

2. Undang Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang pembentukan Provinsi Jawa Timur jo.dto Undang-undang Nomor 18 Tahun 1950 Peraturan tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 dari hal Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32) ;

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790) ;

3. Undang-

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502) ;
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 74. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611) ;
6. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah beserta Benda-benda yang berkaitan dengan Tanah. (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara 3632) ;
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 33. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3817) ;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3889) ;
10. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) ;
11. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ;
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi. (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 19. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3591) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3718) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3743) ;

16 Peraturan

16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3740) ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 77 ) ;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2000 tentang Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur ( Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 16 Seri D ) ;
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2000 Nomor 5 seri E).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
dan
GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH

## B A B I
## KETENTUAN UMUM
### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur
4. Dinas adalah Dinas Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.
5. Dinas/Badan/Kantor adalah Dinas/Badan/Kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

6. Dewan

6. Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah adalah Dewan Koperasi Indonesia Wilayah Provinsi Jawa Timur/ Dewan Koperasi Indonesia Daerah Kabupaten/Kota se Jawa Timur, merupakan bagian integral dari Dewan Koperasi Indonesia sebagai wadah perjuangan cita-cita, nilai-nilai, dan prinsip-prinsip Koperasi serta sebagai mitra pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan koperasi.
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
8. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah dan atau dengan Usaha Besar disertai pembinaan dan pengembangan oleh Usaha Menengah dan atau Usaha Besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
9. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik keluarga atau perorangan warga negara Indonesia secara individu atau bergabung dalam koperasi yang memiliki hasil penjualan secara individu paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per tahun.
10. Usaha Kecil adalah kegiatan usaha warga negara Indonesia, berdiri sendiri, bukan anak perusahaan atau cabang, yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau usaha besar, yang memiliki kekayaan paling banyak Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), berbentuk usaha orang perseorangan badan usaha yang tidak berbadan hukum atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.
11. Usaha Menengah adalah kegiatan ekonomi yang mempunyai kriteria kekayaan bersih paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan, hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 50.000.000.000,- (lima puluh milyar) per tahun, modal usaha tidak lebih dari Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan.
12. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah upaya yang dilakukan dalam bentuk pertumbuhan iklim usaha, pembinaan, dan pengembangan usaha, sehingga mampu memperkuat dirinya menjadi usaha kuat, tangguh, dan mandiri serta bersaing dengan pelaku usaha lainnya.



repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

13. Iklim usaha adalah kondisi yang memungkinkan pelaku usaha mendapatkan kepastian dalam kesempatan berusaha.
14. Perlindungan usaha adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada usaha untuk menghindari praktik monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi oleh pelaku usaha.
15. Pelaku usaha adalah setiap orang per orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di daerah atau melakukan kegiatan dalam daerah, baik sendiri maupun bersama-sama melalui kesepakatan menyelenggarakan kegiatan mikro, usaha kecil dan menengah dalam berbagai bidang ekonomi rakyat
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur.
17. Jaringan Usaha adalah kumpulan usaha yang berada dalam industri sama atau berbeda yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan kepentingan yang sama.

## BAB II
## TUJUAN DAN PRINSIP PEMBERDAYAAN

### Pasal 2

Tujuan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah adalah :

a. meningkatkan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk menumbuhkan koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah.
b. meningkatkan produktivitas, daya saing, dan pangsa pasar koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.
c. meningkatkan akses terhadap sumber daya produktif.
d. meningkatkan peran koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah sebagai pelaku ekonomi yang tangguh, profesional, dan mandiri sebagai basis pengembangan ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan, berbasis pada sumber daya alam serta sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

### Pasal 3

Pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah didasarkan kepada prinsip-prinsip sebagai berikut :

a. Efektif ;

b. Efisien

b. Efisien ;
c. Terpadu ;
d. Berkesinambungan ;
e. Profesional ;
f. Adil ;
g. Transparan ;
h. Akuntabel.
i. Kemandirian.
j. Etika Usaha

BAB III
PELAKSANAAN DAN KOORDINASI PEMBERDAYAAN

Bagian Pertama
Pelaksanaan Pemberdayaan

Pasal 4

Pelaksanaan pemberdayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan maupun Dewan Koperasi Indonesia Wilayah

Pasal 5

(1) Dalam hal pemberdayaan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan oleh dinas/badan/kantor di lingkungan Pemerintah Provinsi;

(2) Pelaksanaan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Pasal 4 wajib berkoordinasi dengan Dinas.

Pasal 6

(1) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) Pemerintah Provinsi menyediakan dana dari APBD pada setiap tahun anggaran, yang didukung oleh dana APBD Kabupaten/Kota.

(2) Badan Usaha Milik Negara / Daerah dapat menyediakan pembiayaan dari penyisihan bagian laba tahunan yang dialokasikan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam bentuk pemberian pinjaman, penjaminan, pembiayaan lainnya serta hibah.

(3) Pemerintah

(3) Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota dapat memberikan insentif kepada dunia usaha yang menyediakan pembiayaan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua
Koordinasi Pemberdayaan

Pasal 7

(1) Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan hingga pelaporan.

(2) Dalam pelaksanaan pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah wajib dilakukan koordinasi antara Dinas dan Dinas/Kantor yang membidangi urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten/Kota.

Pasal 8

Tata cara dan bentuk koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV
BENTUK-BENTUK PEMBERDAYAAN
Bagian Pertama
Pemberdayaan Koperasi

Pasal 9

(1) Pemberdayaan terhadap koperasi dapat dilakukan dalam bentuk:
   a. pendidikan dan pelatihan ;
   b. perkuatan permodalan ;
   c. pembinaan manajemen ;
   d. bimbingan teknis ;
   e. pemasaran produk ;
   f. fasilitasi Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI).

(2) Tata cara pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 10

(1) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dilakukan terhadap koperasi yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
   a. telah berbadan hukum koperasi ;
   b. usaha lebih mengutamakan kepentingan dan kesejahteraan anggota;
   c. memiliki klasifikasi minimal B dan predikat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam cukup sehat ;
   d. telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua kali dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut.

(2) Dalam hal pemberdayaan dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha, maka kriteria sebagaimana ayat (1) dapat disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat pada dunia usaha dan masyarakat itu sendiri.

Pasal 11

Untuk memperoleh fasilitas pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b, koperasi wajib mengajukan permohonan secara tertulis kepada pelaksana pemberdayaan, dan diketahui oleh Kepala Dinas/Kantor yang membidangi Koperasi dan PKM Kabupaten/Kota setempat dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
a. salinan dokumen koperasi ;
b. laporan keuangan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ;
c. dokumen hasil Rapat Anggota Tahunan sekurang-kurangnya dua tahun terakhir ;
d. menyerahkan agunan.

Pasal 12

Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi, penyalurannya melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 13

Dalam pemberdayaan terhadap Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dewan Koperasi Indonesia Wilayah/Daerah dapat diberi peran :

a. menyerap dan menyalurkan aspirasi Koperasi ;
b. meningkatkan kesadaran berkoperasi di kalangan masyarakat ;
c. melakukan pendidikan perkoperasian melalui pengembangan modul;
d. mengembangkan kerjasama antara koperasi dan antara koperasi dengan badan usaha lain;
e. membantu Pemerintah dalam proses pendataan Koperasi;
f. meningkatkan penataan kelembagaan dan pengembangan usaha Koperasi;
g. meningkatkan koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Koperasi dengan Pemerintah Provinsi, Dunia Usaha dan Lembaga Masyarakat.

Bagian Kedua
Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 14

Pemberdayaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk:
a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
b. fasilitasi perkuatan permodalan.

Pasal 15

(1) Pemberdayaan dalam bentuk perkuatan permodalan untuk Usaha Mikro yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi penyalurannya dapat melalui bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

(2) Lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat rekomendasi dari dinas/kantor yang membidangi Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten/Kota setempat.

Pasal 16

Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, usaha mikro wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa/Lurah setempat.

Bagian Keliga
Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah

Pasal 17

Pemberdayaan terhadap Usaha Kecil dan Menengah dapat dilakukan dalam bentuk:

a. pendidikan dan pelatihan serta fasilitasi kelembagaan dan usaha;
b. fasilitasi perkuatan permodalan ;
c. fasilitasi hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Pasal 18

Perkuatan Permodalan untuk usaha kecil dan menengah yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi penyeluranya lewat bank atau lembaga keuangan bukan bank yang ditunjuk.

Pasal 19

(1) Sebelum memperoleh pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, usaha kecil wajib menyerahkan salinan Surat Keterangan Domisili/Tempat Usaha yang diterbitkan oleh Kepala Desa / Lurah setempat.

(2) Sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan, usaha menengah wajib menyerahkan salinan :
   a. Akta Pendirian ;
   b. Ijin Usaha ;
   c. Tanda Daftar Perusahaan dan atau tanda daftar industri ;
   d. Nomor Pokok Wajib Pajak ;
   e. Laporan Keuangan 2 (dua) tahun terakhir.

(3) Dalam hal pemberdayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, maka sebelum memperoleh fasilitas pemberdayaan perkuatan permodalan, usaha menengah wajib menyerahkan agunan.

Pasal 20

Untuk mempercepat dan memperbanyak sasaran pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dilakukan dengan pendekatan pengelompokan jenis usaha dan / atau asosiasi serta selanjutnya dapat dikembangkan dalam bentuk koperasi.

Bagian Keempat
Pelaporan

Pasal 21

(1) Bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang telah memperoleh pemberdayaan dari Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan laporan kinerja.

(2) Tatacara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN IKLIM USAHA
Bagian Pertama
Perlindungan Usaha

Pasal 22

(1) Pemerintah Provinsi, masyarakat dan Dunia Usaha wajib memberikan perlindungan usaha kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

(2) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan upaya yang diarahkan pada terjaminnya kelangsungan hidup Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, dalam kemitraan dengan usaha besar.

(3) Perlindungan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Iklim Usaha

Pasal 23

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi penciptaan iklim usaha yang kondusif bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah melalui penerapan ketentuan peraturan yang meliputi aspek :
a. Permodalan ;
b. Persaingan ;
c. Prasarana ;

d. Informasi

Huruf c : "Pola Dagang Umum" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menegah atau Usaha Besar, yang didalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar memasarkan hasil produksi Usaha Kecil atau Usaha Kecil memasok kebutuhan yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya.

Huruf d : "Pola Waralaba" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya pemberi waralaba memberikan hak penggunaan licenci, merek dagang dan saluran distribusi perusahaannya kepada penerima waralaba dengan disertai bantuan bimbingan manajemen.

Huruf e : "Pola Keagenan" adalah hubungan kemitraan, yang didalamnya Usaha Kecil diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa Usaha Menengah atau Usaha Besar mitranya

Huruf f : Pola bentuk-bentuk lain di luar pola sebagaimana tertera dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e pasal ini adalah pola kemitraan yang pada saat ini sudah berkembang, tetapi belum dibakukan, atau pola baru yang akan timbul di masa yang akan datang..

Pasal 30 : Cukup Jelas.

Pasal 31 : Cukup Jelas.

Pasal 32 : Cukup Jelas.

Pasal 33 : Cukup Jelas.

Pasal 34 : Cukup Jelas.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

huruf b : Cukup jelas.

Pasal 15 : Cukup jelas.

Pasal 16 : Cukup Jelas.

Pasal 17 huruf a : Fasilitas kelembagaan terhadap usaha kecil dan menengah meliputi :

a. pembinaan manajemen ;
b. bimbingan teknis ;
c. pemasaran produk ;
d. akses sumberdaya produktif ;
e. pendaftaran usaha ;
f. sertifikasi produk ;
g. ekspor-impor ;
h. perpajakan.

huruf b : Cukup jelas

huruf c : Cukup jelas.

Pasal 18 : Cukup jelas.

Pasal 19 : Cukup jelas.

Pasal 20 : Cukup jelas.

Pasal 21 : Cukup jelas.

Pasal 22 : Cukup Jelas.

Pasal 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 : Cukup jelas.

Pasal 25 : Cukup jelas.

Pasal 26 : Cukup jelas.

Pasal 27 : Cukup jelas.

Pasal 28 : Cukup jelas.

Pasal 29 huruf a : "Pola inti plasma" adalah hubungan kemitraan antara Usaha kecil dengan Usaha Menengah atau Usaha Besar, yang di dalamnya Usaha Menengah atau Usaha Besar bertindak sebagai inti dan Usaha Kecil selaku plasma, perusahaan inti melaksanakan pembinaan mulai dari penyediaan sarana produksi, bimbingan teknis, sampai dengan pemasaran hasil produksi.

huruf b : "Pola Sub kontrak" adalah hubungan kemitraan antara Usaha Kecil dengan Usaha Menengah atau usaha Besar, yang didalamnya Usaha Kecil memproduksi komponen yang diperlukan oleh Usaha Menengah atau Usaha Besar sebagai bagian dari Produksinya.

huruf e : "Profesional", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan oleh pihak yang memiliki kompetensi dan pengalaman yang memadai dibidangnya sesuai kebutuhan.

huruf f : "Adil", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang hendak diberdayakan dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu dengan cara dan atau dasar apapun.

huruf g : "Transparan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilakukan secara terbuka khususnya pada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dipilih serta pihak lain pada umumnya.

huruf h : "Akuntabel", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat sesuai prinsip-prinsip pemberdayaan.

huruf i : "Kemandirian", berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dilakukan harus bertumpu dan ditopang kekuatan sumberdaya internal yang dikelola dengan sistem ekonomi kerakyatan sehingga tidak tergantung pada kekuatan ekonomi diluar ekonomi rakyat itu sendiri dan tidak boleh menjadi objek belas kasihan tetapi ditempatkan sebagai pelaku ekonomi.

huruf j : "Etika Usaha" berarti Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang dapat menumbuhkan kesadaran atas perilaku berusaha yang sportif melalui persaingan yang sehat, etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.

Pasal 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Cukup Jelas.

Pasal 6 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : yang dimaksud dengan "penyediaan pembiayaan lainnya" antara lain yaitu dalam bentuk pembiayaan syariah (bagi hasil) anjak piutang dan modal ventura, yang dimaksud dengan "hibah" yaitu pemberian bantuan untuk menambah modal investasi dan/atau modal kerja yang diperlukan Usaha Mikro dan Kecil.

| | | |
|---|---|---|
| ayat (3) | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 9 ayat (1) huruf a | : | Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan koperasi Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia baik anggota, pengurus, pengawas, maupun karyawan Koperasi, sedangkan bentuk pelatihan tersebut antara lain : pendidikan mengenai akuntansi, Manajemen Koperasi, Bisnis Plan. |
| huruf b | : | Cukup jelas |
| huruf c | : | Pembinaan menajemen ditujukan untuk pengembangan lembaga koperasi, peningkatan kualitas kelembagaan koperasi, advokasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi, serta pengendalian dan pengawasan organisasi koperasi |
| huruf d | : | Bimbingan teknis merupakan pemberdayaan yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk-produk koperasi, baik yang berupa barang maupun jasa. Bimbingan teknis ini dapat dilakukan dengan cara pemagangan, pelatihan yang ditujukan untuk meningkaykan produktifitas. |
| huruf e | : | Pemasaran produk merupakan pemberdayaan yang dapat dilakukan dalam bentuk memfasilitasi pameran, misi dagang dan atau promosi. |
| huruf f | : | Dinas memberikan wawasan, pembekalan dan fasilitasi dalam rangka perolehan Hak Atas Kekayaan Intelektual. |
| ayat (2) | : | Cukup jelas |
| Pasal 10 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 11 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 12 | : | lembaga keuangan bukan Bank antara lain meliputi koperasi, lembaga keuangan mikro, maupun lembaga keuangan syariah |
| Pasal 13 | : | Cukup Jelas. |
| Pasal 14 huruf a | : | Fasilitas kelembagaan terhadap usaha mikro dapat dilakukan dalam bentuk :<br>a. pembinaan manajemen ;<br>b. bimbingan teknis ;<br>c. pemasaran produk ; |

Jumlah Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) apabila dibandingkan dengan usaha besar selalu menunjukkan angka yang lebih besar. Namun apabila dibandingkan kontribusinya, UMKMK masih kalah dengan usaha besar. Kondisi demikian juga terdapat di Jawa Timur. Sementara itu, dalam upaya meningkatkan perekonomian Jawa Timur diperlukan peran semua pelaku ekonomi tidak terkecuali usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi.

Bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, adanya Peraturan Daerah (Perda) mengenai Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi dipandang penting mengingat belum adanya payung hukum mengenai hal ini dan penting adanya suatu acuan bagi program pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi pada Kabupaten dan Kota se-Jawa Timur. Adanya fungsi-fungsi desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan yang selaras dengan semangat dan prinsip otonomi daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah semakin mengakuhkan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk tidak lagi sekedar melindungi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Koperasi, namun juga memberdayakannya.

II. PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---|---|---|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas. |
| Pasal 2 huruf a s/d d | : | Cukup jelas. |
| Pasal 3 huruf a | : | "Efektif", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus sesuai dengan kebutuhan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. |
| huruf b | : | "Efisien", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan. |
| huruf c | : | "Terpadu", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus dilaksanakan melalui koordinasi agar tidak terjadi tumpang tindih. |
| huruf d | : | "Berkesinambungan", berarti pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah harus memiliki keterkaitan dengan pemberdayaan yang dilakukan sebelumnya atau yang akan datang. |

Campur tangan pemerintah tersebut, dimaksudkan untuk mencegah akibat buruk dari mekanisme pasar terhadap pembangunan daerah serta menjaga agar pembangunan dan hasil-hasilnya dapat dinikmati pelaku ekonomi daerah. Hal tersebut sangat dimungkinkan mengingat bahwa, Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 menganut sistem otonomi seluas-luasnya, dimana kewenangan Provinsi sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (1) huruf i "fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/ kota".

Memperhatikan salah satu kewenangan Provinsi tersebut, nampak jelas bahwa kewenangan daerah yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi menjadi kewenangan wajib daerah provinsi. Di samping kewenangan Provinsi tersebut maka menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi, dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang masing-masing mempunyai pemerintahan daerah". Dengan demikian tampak bahwa sebenarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menganut prinsip "Otonomi bertingkat/ berjenjang", dalam hal ini daerah Provinsi ditempatkan pada tingkat/ jenjang "lebih tinggi" terhadap daerah Kabupaten/ Kota pada tingkat/ jenjang berikutnya. Prinsip "Otonomi Bertingkat/ Berjenjang" sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga sesuai dengan pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua yang menyatakan "Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah Provinsi dan daerah Provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota".

Adapun kewenangan Provinsi dalam memfasilitasi koperasi, usaha kecil, dan menengah kiranya tidak dapat dilepaskan dengan perkembangan lingkungan strategic baik pada tataran global maupun nasional dan diperkuat terjadinya perubahan paradigma dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya pemerintahan daerah. Perubahan paradigma ini tentunya juga berpengaruh pada perubahan konsep tentang pembangunan ekonomi yang semula sentralistik dengan sistem konglomerasi berubah dalam suatu sistem yang demokratis, dimana peran serta masyarakat sangat diperlukan dalam peningkatan kesejahteraan.

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa pembangunan ekonomi tidak dapat dipisahkan dengan peran serta masyarakat maupun daerah, demikian pula peran serta daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dan daerah dalam pembangunan ekonomi ini tentunya tidak dapat dilepaskan dengan kondisi masa lalu yang bersifat sentralistik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut nampak bahwa para pelaku ekonomi yang ada di daerah kebanyakan para pengusaha kecil menengah ini kurang, atau belum meratanya perhatian dari pemerintah, baik berkaitan dengan permodalan maupun aspek lainnya. Walaupun demikian kelompok usaha kecil menengah ini pada masa krisis ekonomi mampu bertahan dibanding usaha besar.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 4 TAHUN 2007
TENTANG
PEMBERDAYAAN KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

## I. UMUM

Kurang meratanya penyebaran pelaksanaan pembangunan menimbulkan kesenjangan pertumbuhan antar daerah. Untuk itu diperlukan adanya reformasi perekonomian yang menuju keberhasilan pembangunan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Untuk percepatan usaha peningkatan aktivitas perekonomian melalui desentralisasi diperlukan adanya instrumen hukum guna lebih memperkuat keberadaan organisasi pemerintah daerah sebagai sarana untuk menggerakkan perekonomian daerah. Instrumen hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Bila diperhatikan dasar menimbang huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, maka jelas bahwa politik hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah terselenggaranya otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, pemerataan dan keadilan yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi.

Dari uraian di atas, nampak jelas bahwa otonomi daerah yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 ini juga dalam usaha mewujudkan perekonomian yang lebih adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat. Dalam usaha untuk mewujudkan tujuan tersebut, kiranya pembangunan perekonomian perlu dilaksanakan guna mewujudkan perekonomian yang adil dan merata, mencerminkan peningkatan peran daerah dan pemberdayaan seluruh rakyat, berdaya saing dengan basis efisiensi, serta menjamin keberlanjutan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan hidup.

Dalam pelaksanaan otonomi daerah, campur tangan pemerintah dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah tetap diperlukan, mengingat bahwa "mekanisme pasar tidak mampu menciptakan penyesuaian dengan cepat kalau terjadi perubahan, serta tidak mampu menciptakan laju pembangunan yang cepat".

Campur

Diundangkan di Surabaya
Pada tanggal 30 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TIMUR

ttd.

Dr. H. SOEKARWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007
NOMOR 3 TAHUN 2007 SERI E.

Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

INDRA WIRAGANA, SH
Pembina Utama Muda
NIP. 510 090 148

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 31 Juli 2007

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd.

H. IMAM UTOMO. S

PENJELASAN

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Bagian Kedua
Jaringan Usaha

Pasal 31

(1) Setiap Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat membentuk jaringan usaha.

(2) Jaringan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi bidang usaha yang mencakup bidang-bidang yang disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan kesusilaan.

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 32

(1) Dalam hal ditemukan dokumen dan atau informasi yang diberikan oleh Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah tidak benar dan atau menyalahgunakan fasilitas pemberdayaan yang diterimanya maka pemberdayaan pada yang bersangkutan dapat dihentikan atau dialihkan kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah lainnya.

(2) Tata cara pengenaan sanksi administrasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

b. mencegah terjadinya hal-hal yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dalam pelaksanaan transaksi usaha dengan Usaha Besar ;
c. mengembangkan kerjasama untuk meningkatkan posisi tawar (bargaining position) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
d. mencegah pembentukan struktur pasar yang mengarah terjadinya persaingan tidak sehat dalam bentuk monopoli, oligopoli dan monopsoni ;
e. mencegah terjadinya penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perseorangan atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 28

(1) Pemerintah Provinsi memfasilitasi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

(2) Dunia usaha dan masyarakat memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah untuk melakukan hubungan kemitraan dalam berbagai bentuk bidang usaha.

Pasal 29

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dapat dilakukan dengan pola :
a. inti plasma ;
b. sub kontrak ;
c. dagang umum ;
d. waralaba ;
e. keagenan ;
f. bentuk lain.

Pasal 30

Dalam mewujudkan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Pemerintah Provinsi selain berperan sebagai fasilitator, juga berperan sebagai regulator dan stimulator.

Bagian

d. Informasi ;
e. Kemitraan ;
f. Perizinan Usaha dan ;
g. Perlindungan.

(2) Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang memasarkan produk usahanya harus bisa memberikan jaminan kualitas produk.

(3) Dunia usaha dan masyarakat harus berperan aktif untuk menumbuhkan iklim usaha yang kondusif.

Pasal 24

Pemerintah Provinsi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) melakukan pembinaan dan pengembangan melalui regulasi kebijakan.

Pasal 25

(1) Pemerintah Provinsi wajib melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian terhadap pelaksanaan program pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

(2) Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas

(3) Tata cara dan bentuk pemantauan, evaluasi, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB V
KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA
Bagian Pertama
Kemitraan

Pasal 26

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dapat melakukan kerjasama usaha dengan pihak lain dalam bentuk kemitraan berdasar kesetaraan.

Pasal 27

Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ditujukan untuk :
a. mewujudkan kemitraan antara Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dengan Usaha Besar ;

b. mencegah

**DOKUMENTASI**

Kantor Dinas Koperasi Industri Perdagangan Pertambangan dan Energi Kabupaten Trenggalek.

Wawancara dengan Dra. Djumi'asih selaku Kepala Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek di Kantor Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek.

Wawancara dengan Nurun Nadjmi, ST selaku Staf Bidang Industri dan Perdagangan Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek di Kantor Dinas Koperindagtamben Kabupaten Trenggalek.

Kios keripik tempe milik mbak Menur cap “Kiko Putra” yang berada diSentra Industri dan UKM keripik tempe kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Wawancara dengan Ibu Tutik selaku pengusaha keripik tempe di sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Proses penggorengan kripik tempe yang berada di lokasi industri keripik tempe mbak Menur yang dilakukan oleh salah seorang karyawannya di sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Proses penggorengan kripik tempe yang berada di lokasi industri keripik tempe mbak Siti yang dilakukan oleh salah karyawannya di sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Contoh tempe yang sebelum melalui proses penggorengan di sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Contoh keripik tempe yang dihasilkan oleh industri UKM mbak Siti di sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

Contoh kemasan keripik tempe yang digunakan oleh industri UKM mbak Siti di sentra industri dan UKM keripik tempe di Kelurahan Ngantru Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek.

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

# RIWAYAT HIDUP

## DATA PRIBADI

Nama : Dhani Wahyu Karuniawan
Nama Panggilan : Dani
NIM : 0610313044
Jurusan : Administrasi Publik
Konsentrasi : Administrasi Pembangunan
Tempat Tanggal Lahir: Trenggalek, 13 Februari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat Asal : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 36 Trenggalek
Alamat di Malang : Jl. Sukarno Hatta Perum Griya Shanta A/12 Malang
Telepon/HP : 081334307150

## DATA ORANG TUA

Nama Ayah : Bambang Wahyu Triwarno
Tempat Tanggal Lahir: Madiun, 30 Maret 1963
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 36 Trenggalek

Nama Ibu : Sri Rahayu Wahyuni
Tempat Tanggal Lahir: Trenggalek, 29 Januari 1964
Pekerjaan : Wiraswasta
Agama : Islam
Kebangsaan : Indonesia
Alamat : Jl. Pangeran Hidayatullah No. 36 Trenggalek

## RIWAYAT PENDIDIKAN

1. 2006 – 2012 : Universitas Brawijaya Malang
2. 2003 – 2006 : SMA Negeri 1 Trenggalek
3. 2000 – 2003 : SLTP Negeri 1 Trenggalek
4. 1994 – 2000 : SDN Surodakan III Trenggalek

repository.ub.ac.id
UNIVERSITAS BRAWIJAYA